

# RENCANA STRATEGIS 2017 - 2022

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI DKI JAKARTA



@dkijakarta



@COMPANY NAME



[www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id)



000-111-1111

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dapat selesai tepat waktu. Diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat dalam hal merumuskan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Sebagai acuan penyelenggaraan layanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta berkewajiban menyiapkan rencana strategis perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terwujud dalam dokumen Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pelayanan jangka menengah perangkat daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang dirumuskan ke dalam rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini merupakan acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) sekaligus bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2022.

Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dalam setiap implementasi Renstra ini harus senantiasa dikendalikan, dimonitor dan dievaluasi untuk langkah perbaikan sesuai dengan perkembangan keadaan. Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Mei 2018  
Kepala Dinas Kominfo dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta



Dian Ekowati  
NIP 196409221992032003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	2
I.2 Landasan Hukum .....	4
I.3 Maksud dan Tujuan .....	7
I.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO DAN STATISTIK.....</b>	<b>9</b>
II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo dan Statistik.....	10
II.2 Sumber Daya Dinas Kominfo dan Statistik .....	26
II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik.....	31
II.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik...60	
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO DAN STATISTIK.....</b>	<b>64</b>
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik.....	65
III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	77
III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	80
III.4 Penentuan Isu-isu Strategis .....	85
III.5 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG'S) .....	91
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>94</b>
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo dan Statistik. ....	96
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>103</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>114</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>130</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>132</b>



## DAFTAR ISTILAH

Arah Kebijakan	Rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
Badan Publik	Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
BPKD	Badan Pengelola Keuangan Daerah
BPPBJ	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
CCTV	<i>Closed Circuit Television</i> adalah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat.
CROP	Cepat Respon Opini Publik adalah <i>dashboard mapping</i> yang menggunakan <i>platform google maps</i> sebagai dasar pemetaan digital dan digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai aplikasi utama <i>smart city</i> , dimana dapat mengintegrasikan data-data yang terkoleksi lama oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
DC	<i>Data Center</i> (pusat data) yaitu suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Fasilitas ini biasanya mencakup juga catudaya redundan atau cadangan, koneksi komunikasi data redundan, pengontrol lingkungan (misal AC, ventilasi), pencegah bahaya kebakaran, serta piranti keamanan fisik. Dengan kata lain, <i>data center</i> merupakan salah satu penempatan <i>server</i> untuk <i>website</i> atau <i>database</i> .
Diseminasi	Suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
Indikator Kinerja	Tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran ( <i>output</i> ), hasil ( <i>outcome</i> ), dampak ( <i>impact</i> ).
Interoperabilitas	Kapabilitas dari suatu sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.





Isu Strategis	Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
JSC	<i>Jakarta Smart City</i> , yaitu Kota cerdas/pintar yang inovatif menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi perkotaan, jasa dan daya saing sambil memastikan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang partisipatif.
Kabupaten Administrasi	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Kota Administrasi	Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
KPKIP	Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi adalah Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
LPSE	Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
Misi	Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Peta Digital	Representasi fenomena geografik yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisis oleh komputer.
Renja	Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Renstra	Rencana Strategis, yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan



	pekerjaan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
Sasaran	Rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, merupakan hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil ( <i>outcome</i> ) program perangkat daerah.
SIPD	Sistem Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi DKI Jakarta.
<i>Source Code</i>	Kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah aplikasi atau sistem informasi yang dibuat oleh LKPP.
Statistik Sektoral	Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.
Strategi	Langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
Tiras	Oplah (dari bahasa Belanda <i>oplage</i> ) yaitu jumlah salinan surat kabar atau majalah yang dijual.
Tujuan	Sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
UKPD	Unit Kerja Perangkat Daerah atau subordinat SKPD.
Visi	Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	13
Gambar 2.2	Enam Pilar JSC	33
Gambar 2.3	Ekosistem TIK <i>Smart City</i>	34
Gambar 2.4	Produk dan Layanan Jakarta <i>Smart City</i>	34
Gambar 2.5	Topologi <i>Backbone</i> Jaringan Pemprov DKI Jakarta 2017	35
Gambar 2.6	Infrastruktur Pajak Kendaraan Bermotor (SAMSAT, SAMLING, GERAJ, Drive Thru)	36
Gambar 2.7	Target dan Realisasi Pusat Data	40
Gambar 2.8	Kondisi <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) Tahun 2017	41
Gambar 2.9	Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan e-Gov	43
Gambar 2.10	Pola Pengelolaan Aplikasi	44
Gambar 2.11	Target dan Realisasi Integrasi Aplikasi	44
Gambar 2.12	Target dan Realisasi Aplikasi Keuangan	45
Gambar 2.13	Target dan Realisasi Jaringan Komunikasi	46
Gambar 3.1	Kerangka Logis: Analisis Permasalahan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	68
Gambar 3.2	Pemetaan Analisis Permasalahan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	70
Gambar 4.1	Menerjemahkan Visi dan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta ke Visi Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	95
Gambar 4.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	97
Gambar 4.3	Provinsi DKI Jakarta <i>Open Government</i>	98
Gambar 4.4	Kerangka Logis: Struktur Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	99
Gambar 4.5	Memahami Keterbukaan Informasi Publik	101
Gambar 5.1	Pemetaan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kominfo dan Statistik Tahun 2017-2022	105
Gambar 6.1	Menghubungkan Arah Kebijakan dan Program Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	114

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Data Pegawai Jabatan Struktural Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Per Desember 2017	26
Tabel 2.2	Data Pegawai Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Per Desember 2017	27
Tabel 2.3	Data Pegawai Berdasar Usia Aparatur Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Per Desember 2017	27
Tabel 2.4	Data Pegawai Berdasar Golongan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Per Desember 2017	28
Tabel 2.5	Data Kendaraan Dinas Operasional Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Per Desember 2017	30
Tabel 2.6	Nilai Aset Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Per Desember 2017	30
Tabel 2.7	Kapasitas <i>Data Center</i> (DC) – Rekap Perangkat Per SKPD/UKPD	36
Tabel 2.8	Kapasitas <i>Data Center</i> (DC) – Rekap Perangkat Per Golongan dan Kelompok	37
Tabel 2.9	Kapasitas <i>Data Center</i> (DC) – Rekap Per Ruang	38
Tabel 2.10	Kapasitas <i>Data Center</i> (DC) – Rekap Perangkat Ruang Colo dan Ruang Farm Server	38
Tabel 2.11	Kapasitas <i>Data Center</i> (DC) – Rekap Perangkat Ruang Network	39
Tabel 2.12	Kapasitas <i>Data Center</i> (DC) Per 20 Oktober 2017	39
Tabel 2.13	Kapasitas Rak <i>Server</i> di <i>Data Center</i> Balaikota per Desember 2017	40
Tabel 2.14	Komponen Arsitektur Teknis <i>Data Center</i>	41
Tabel 2.15	Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)	42
Tabel 2.16	Integrasi Sistem Informasi Provinsi DKI Jakarta	43
Tabel 2.17	Pengembangan Website di Pemprov DKI Jakarta	46
Tabel 2.18	Pengembangan 11 Aplikasi yang Terintegrasi	47
Tabel 2.19	Monitoring dan Evaluasi Berita Berdasarkan Manfaatnya Tahun 2017	48
Tabel 2.20	Deskripsi Monitoring Berita Provinsi DKI Jakarta	48
Tabel 2.21	Tenaga Ahli Portal Berita Pemprov DKI Jakarta	49
Tabel 2.22	Jumlah Produksi Portal Berita Pemprov DKI Jakarta Tahun 2017	49
Tabel 2.23	Jumlah Pengunjung Portal Jakarta 2017	50
Tabel 2.24	Laporan Layanan Informasi Publik PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	51
Tabel 2.25	Rekapitulasi Dokumentasi Kegiatan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2017	52
Tabel 2.26	Rekapitulasi Percetakan Majalah Media Jaya 6 edisi	52
Tabel 2.27	Rekapitulasi Percetakan 8 Tema Poster & Leaflet	52



Tabel 2.28	Distribusi barang cetakan Majalah Media Jaya, Poster, Leflet dan CD Kewilayah DKI Jakarta	53
Tabel 2.29	Data Kontribusi CCTV dari Penyedia Menara Microcell (s/d Oktober 2017)	54
Tabel 2.30	CCTV Milik SKPD yang Terintegrasi Dengan Jakarta <i>Smart City</i>	54
Tabel 2.31	Jumlah Aspirasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	55
Tabel 2.32	Pengaduan Masyarakat Melalui Kanal Qlue Per Wilayah Tahun 2017	56
Tabel 2.33	Pengaduan Masyarakat Melalui Kanal Qlue Berdasarkan Status Laporan Tahun 2017	56
Tabel 2.34	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta berdasarkan RPJMD 2012-2017	57
Tabel 2.35	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	59
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	69
Tabel 3.2	Telaahan Bidang Urusan Informasi dan Komunikasi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	77
Tabel 3.3	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs)	79
Tabel 3.4	Telaahan Bidang Urusan Informasi dan Komunikasi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	93
Tabel 4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	100
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran dan Target Capaian Kinerja Dinas Kominfo dan Statistik DKI Jakarta Tahun 2017-2022	102
Tabel 5.1	Janji Kerja, Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi ke-3 RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	103
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	115
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	131
Tabel 7.2	Indikator Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022	131

## BAB I PENDAHULUAN

Pesatnya informasi global kini telah mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski demikian, masih terdapat adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan antara lain oleh: keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur. Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara sebagai fasilitator dalam rangka mengurangi kesenjangan sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi melalui pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Pendekatan tata kelola pemerintahan yang dinamis menunjukkan *trend* pergeseran dari pemerintah sebagai aktor utama (*driving*) menjadi pelayan (*rowing*) sehingga birokrasi menjadi alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara (opini) rakyat, sepanjang opini tersebut rasional dan sah secara normatif dan konstitusional. Dengan demikian, pemerintah harus lebih banyak mendengar suara publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah untuk mencapai birokrasi profesional yang berciri *open government partnership*, mendasarkan pada keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, sistem manajemen SDM birokrasi pada penciptaan inovasi kerja, dan layanan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan daya saing negara di kompetisi global.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan *e-Government* (*eGov*). *e-Government* bukan sekedar mengganti teknologi konvensional dengan perangkat sistem elektronik yang canggih namun tentang merubah budaya birokrasi melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai instrumen untuk mendukung jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan publik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan bertanggungjawab. *e-Government* dengan demikian merupakan suatu mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan



masyarakat dan *stakeholder* melalui pemanfaatan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan untuk memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama ini berjalan. *e-Government* dengan demikian dapat dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. *e-Government* merupakan suatu konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumber daya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

### **I.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan *open government*, peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan komunikasi dan informatika mutlak dibutuhkan melalui perencanaan pembangunan yang terukur. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan (Renstra) maupun tahunan (Renja), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain tercantum dalam Pasal 272 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Kemudian, Pasal 1 Ayat (29) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD juga menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.



Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Mengacu kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka peran dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menjadi semakin kompleks. Hal tersebut mengingat sebagai pelaksana urusan komunikasi, informatika dan statistik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta memiliki serangkaian tugas pokok yang perlu menjadi fokus perhatian diantaranya: (1) mengembangkan komunikasi dan pembudayaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan kota Jakarta yang aman, nyaman dan sejahtera, (2) menyediakan dan memberikan informasi seputar kota Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada publik setiap saat, sewaktu-waktu, maupun secara berkala.

Di samping itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, khususnya terkait penambahan urusan persandian dan statistik menjadi hal baru yang perlu diperhatikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang sudah mengampu urusan statistik dan persandian. Dengan masuknya urusan statistik maka penyediaan statistik sektoral menjadi salah satu bentuk pelayanan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Disamping itu, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan urusan persandian maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menjadi koordinator dalam mewujudkan ketahanan informasi nasional di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan upaya identifikasi dan analisis terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi, informatika dan statistik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menyusun berbagai program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta periode 5 (lima) tahun ke depan. DKI Jakarta sebagai ibukota negara diharapkan menjadi *role model* dan barometer pembangunan, terutama dalam implementasi pemanfaatan TIK dan *smart city*

yang terintegrasi antara kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat. Dengan adanya rencana strategis ini diharapkan pembangunan bisa sesuai dengan visi misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta serta selaras dengan RPJMN.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi komunikasi, informatika dan statistik tentu diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika dan statistik kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi dapat terlaksana. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi, informatika dan statistik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika melalui implementasi *e-Government* dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di DKI Jakarta, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017–2022 ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2079);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);



23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 305 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62202);
24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 306 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62203);
25. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 307 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Pusat Pelayanan Statistik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62204); dan
26. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyusunan dan Penginputan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, Rancangan Awal RPJMD DKI Jakarta Tahun 2018-2022 Pada Sistem Informasi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 ini dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan dan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaras dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Adapun tujuan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 ini adalah:

1. Memberikan gambaran umum tentang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta pada periode lima tahun yang lalu;
2. Menggambarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi;
3. Menentukan tujuan dan sasaran yang akan dijadikan indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta beserta strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkannya; dan
4. Indikasi program dan kegiatan beserta pagu dan target kinerja selama lima tahun mendatang yang harus diacu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya.



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201);
18. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017- 2022;
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62163);
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 304 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62201);





Dengan demikian maka rencana strategis yang telah disusun ini harus dijadikan sebagai acuan oleh seluruh bidang termasuk suku dinas dan UPT dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan orientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara berjenjang. Guna mewujudkan indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang selaras dengan kinerja masing-masing jenjang jabatan maka pada periode renstra ini akan dilakukan pengendalian dan evaluasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 ini mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Menjelaskan tentang hasil identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, dan program Gubernur DKI periode 2017-2022, telaahan Renstra K/L dan penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam jangka menengah berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta.

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.



**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017–2022 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan guna memecahkan dan mengantisipasi permasalahan dan isu strategis.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,**

Menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dicantumkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta.

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah, di mana dalam hal ini difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta selama periode 2013-2017 menunjukkan beberapa perkembangan yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa titik penting yang harus dipercepat progres pencapaiannya. Pada periode 2017-2022 ini, arah pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam bidang peningkatan teknologi informasi, komunikasi dan statistik sangat membutuhkan perhatian yang serius dan harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta serta harus pula dikondisikan sesuai realisasi pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini. Oleh karena itu, perlu adanya gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta selama periode 2013-2017 sebagai panduan dalam menyusun kebijakan periode berikutnya (2017-2022) agar rumusan program dan kegiatan yang ditetapkan memiliki relevansi terhadap target kinerja pembangunan.

Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta selama periode 2012-2017 terlihat pada analisis indikator capaian kinerja pelayanan, khususnya terkait dengan peran, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana pemerintah Provinsi DKI Jakarta; segala sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya; capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya; dan mengulas hambatan-hambatan utama

yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta ini.

## **II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 265 Tahun 2016 berkedudukan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja & anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
3. Pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
6. Pengelolaan opini dan aspirasi publik;
7. Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik;
8. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
9. Pelaksanaan layanan hubungan media;
10. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
11. Penyelenggaraan layanan infrastruktur *data center*, *disaster recovery center* serta teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
12. Penyelenggaraan layanan pengembangan jaringan internet dan penggunaan akses internet;



13. Pelaksanaan layanan keamanan informasi *e-Government*;
14. Pelaksanaan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
15. Penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi;
16. Penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart Province*;
17. Pelaksanaan layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga;
18. Pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah;
19. Pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di daerah;
20. Pengkoordinasian kegiatan statistik sektoral, regional dan nasional;
21. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar pemerintah daerah;
22. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan di bidang statistik;
23. Penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi melalui survei dan jajak pendapat tentang program dan kinerja pemerintah daerah provinsi;
24. Penetapan, pengukuran dan penyajian statistik pemerintah daerah;
25. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan statistik daerah;
26. Memelihara dan mengembangkan statistik daerah;
27. Pelaksanaan analisis dan pengkajian data dan informasi statistik pendukung pembangunan daerah;
28. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang komunikasi, informatika dan statistik;
29. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
30. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
31. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
32. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta didukung oleh manajemen dengan perangkat-perangkat organisasi sebagai berikut:

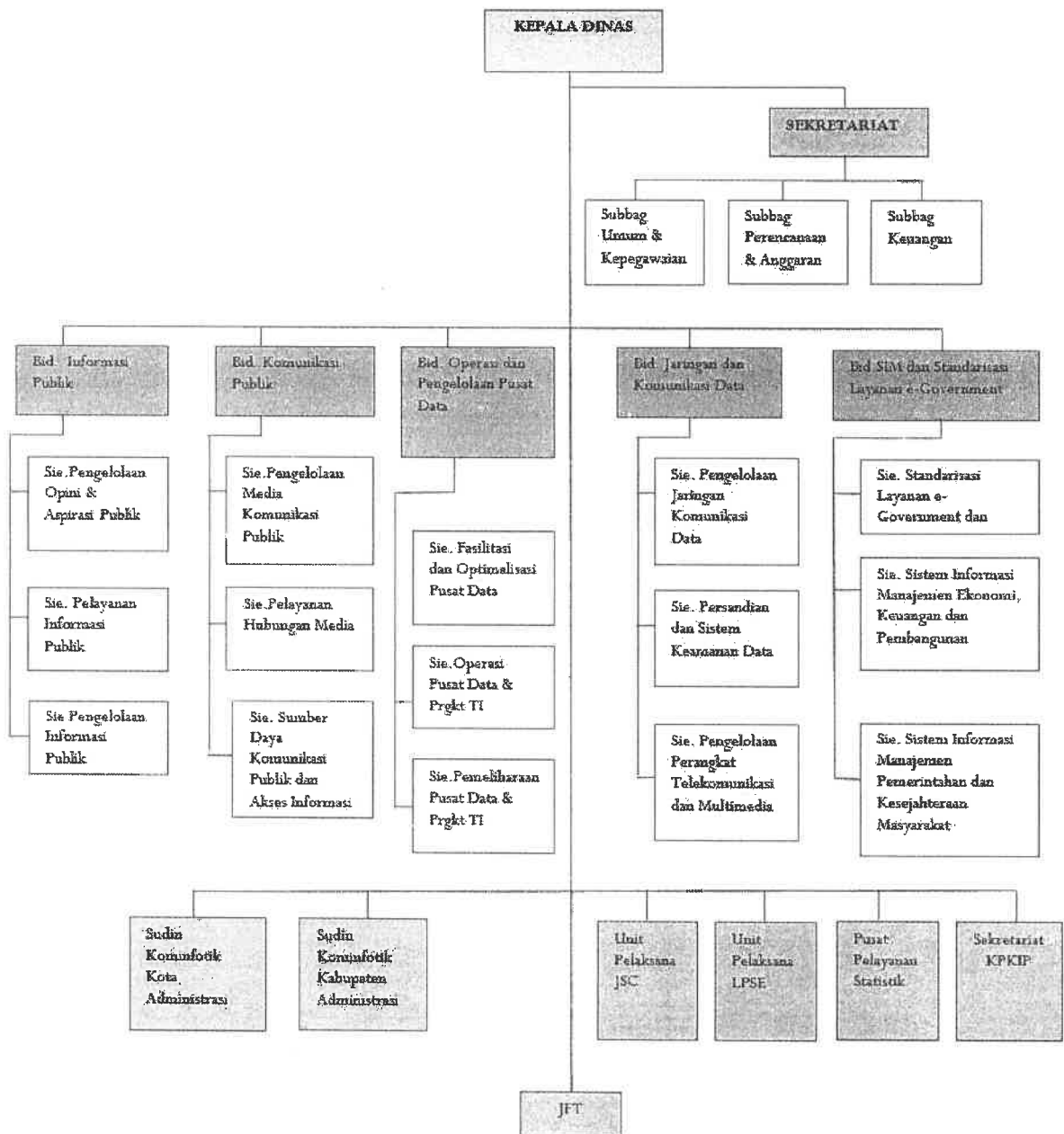
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
  - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Informasi Publik, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
  - b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
  - c. Seksi Pelayanan Informasi Publik.
4. Bidang Komunikasi Publik, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
  - b. Seksi Pelayanan Hubungan Media; dan
  - c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi.
5. Bidang Operasi dan Pengelolaan Pusat Data, terdiri dari:
  - a. Seksi Fasilitasi dan Optimalisasi Pusat Data;
  - b. Seksi Pengelolaan Perangkat Pusat Data; dan
  - c. Seksi Operasi dan Monitoring Pusat Data.
6. Bidang Jaringan dan Komunikasi Data, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data;
  - b. Seksi Persandian dan Sistem Keamanan Data; serta
  - c. Seksi Pengelolaan Perangkat Telekomunikasi dan Multimedia.
7. Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan *eGovernment*, terdiri dari:
  - a. Seksi Standarisasi Layanan *eGovernment* dan Basis Data;
  - b. Seksi Sistem Informasi Manajemen Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; serta
  - c. Seksi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.
8. Suku Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Kota Administrasi;
9. Suku Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi;



- 10. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 265 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 304 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 305 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 306 Tahun 2016, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 307 Tahun 2016; dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta**





Adapun uraian tugas dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 265 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

**1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta**

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; serta
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

**2. Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta**

Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh seorang sekretaris dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat melaksanakan tugas administrasi dinas dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- d. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas oleh Unit Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- e. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;



- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Informasi Publik;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, serta pelayanan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, serta pelayanan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- e. Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, serta pelayanan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, serta pelayanan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring isu publik di media massa, kliping digital dan analisa pemberitaan media massa;
- h. Penyusunan materi dari hasil monitoring pemberitaan media massa sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan;
- i. Pengolahan opini dan aspirasi publik di media massa, serta penyampaian tanggapan dan/ atau klarifikasi atas surat pembaca di media massa;
- j. Pemantauan, pengolahan, dan analisa tema informasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- k. Pengelolaan informasi program, kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah provinsi melalui portal berita resmi pemerintah daerah;
- l. Pengolahan hasil monitoring dan analisa isu publik serta *counter issue* melalui pemberitaan pada portal berita resmi pemerintah daerah;
- m. Pengelolaan informasi program, kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah melalui *sms blast*;



- g. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- h. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- i. Pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- j. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- k. Pengoordinasian perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan urusan komunikasi, informatika dan statistik;
- l. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang membawahi 3 (tiga) subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Anggaran
- c. Subbagian Keuangan

### **3. Bidang Informasi Publik**

Bidang Informasi Publik merupakan Unit Kerja lini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan informasi publik serta pengelolaan opini dan aspirasi publik yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik dan statistik, serta pelayanan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Informasi Publik;



- n. Penghimpunan, pengolahan, pengklasifikasian, pemutakhiran dan penyajian data dan informasi publik dari seluruh SKPD/UKPD Pemerintah Daerah Provinsi melalui portal pelayanan informasi publik;
- o. Pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah sebagai pengimplementasian Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
- p. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga/SKPD/UKPD dalam pelayanan informasi publik;
- q. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
- r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Informasi Publik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Informasi Publik membawahi tiga seksi sebagai berikut:

- a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- c. Seksi Pelayanan Informasi Publik.

#### **4. Bidang Komunikasi Publik**

Bidang Komunikasi Publik merupakan Unit Kerja lini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam pelaksanaan pembinaan, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah dengan menjalankan berbagai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Komunikasi Publik;

- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Komunikasi Publik;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di pemerintah daerah;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di pemerintah daerah;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di pemerintah daerah;
- g. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan komunikasi publik konten lokal dan pengemasan konten nasional menjadi konten lokal dalam rangka citra positif pemerintah daerah;
- h. Pelaksanaan sosialisasi program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah daerah sebagai bahan publikasi melalui media tercetak, media luar ruang dan media komunikasi publik lainnya;
- i. Produksi dan pendistribusian media tercetak, konten media luar ruang dan konten media komunikasi publik lainnya melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di daerah;
- j. Fasilitasi hubungan pemerintah daerah dengan media (*media relations*);
- k. Penyiapan, penyusunan dan fasilitasi bahan komunikasi pimpinan daerah serta pelaksanaan jumpa pers dan publikasi di media massa;
- l. Pelaksanaan peliputan, pendokumentasian dan pengelolaan materi dokumentasi visual dan audio visual kegiatan pimpinan daerah pemerintah daerah;



- m. Pelaksanaan kerjasama/kemitraan dan penyediaan akses informasi antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga kehumasan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan non pemerintah serta institusi media massa; dan
- n. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi Publik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Komunikasi Publik terdapat tiga seksi berikut:

- a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- b. Seksi Pelayanan Hubungan Media;
- c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi.

#### **5. Bidang Operasi dan Pengelolaan Pusat Data**

Bidang Operasi dan Pengelolaan Pusat Data merupakan Unit Kerja lini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan di bidang layanan infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan dan dalam pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan di bidang layanan infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Operasi dan Pengelolaan Pusat Data menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Operasi dan Pengelolaan Pusat Data;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Operasi dan Pengelolaan Pusat Data;
- c. Penyusunan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penyediaan, penataan dan pemeliharaan infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- f. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- g. Fasilitasi pengembangan layanan dan implementasi *Government Cloud Computing*;
- h. Pengkoordinasian, pengoperasian, dan pengendalian infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- i. Penyusunan perencanaan konfigurasi dan standarisasi infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- j. Pengendalian arus data, perekaman dan penyimpanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Provinsi;
- k. Pelaksanaan pengamanan data, *backup* data, pemeliharaan dan penyimpanan sistem dan data;
- l. Pelaksanaan pengembangan sistem operasi *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- m. Pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- n. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pendayagunaan infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- o. Pelaksanaan layanan *recovery* data dan informasi;
- p. Pelaksanaan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- q. Pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- r. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Operasi dan Pengelolaan Pusat Data.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat tiga seksi dalam Bidang Operasi dan Pengelolaan Pusat Data ini, yaitu:

- a. Seksi Fasilitasi dan Optimalisasi Pusat Data



- b. Seksi Pengelolaan Perangkat Pusat Data
- c. Seksi Operasi dan Monitoring Pusat Data

#### 6. Bidang Jaringan dan Komunikasi Data

Bidang Jaringan dan Komunikasi Data merupakan Unit Kerja lini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam pelaksanaan pembinaan, pengelolaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan serta pengintegrasian jaringan dan komunikasi data, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *eGovernment* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas utamanya yaitu melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan serta pengintegrasian jaringan dan komunikasi data, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Bidang Jaringan dan Komunikasi Data menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Jaringan dan Komunikasi data;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Jaringan dan Komunikasi data;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan pengembangan jaringan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *eGovernment* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan jaringan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *eGovernment* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
- e. Pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Daerah;
- f. Pelaksanaan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- g. Pelaksanaan layanan filtering konten negatif;
- h. Pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah;

- i. Pelaksanaan layanan Keamanan Informasi *eGovernment*;
- j. Pelaksanaan layanan Sistem Telekomunikasi Intra Pemerintah Daerah;
- k. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik intranet dan jaringan internet;
- l. Pelaksanaan layanan penanganan insiden keamanan informasi,
- m. Pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
- n. Pelaksanaan layanan keamanan informasi pada Sistem informasi Pemerintah Daerah;
- o. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif di pemerintah daerah;
- p. Pelaksanaan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- q. Pelaksanaan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- r. Penyusunan kebijakan, standar dan pedoman teknis pengelolaan infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak serta sistem pengamanan jaringan dan komunikasi data;
- s. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan serta penataan infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak serta sistem pengamanan jaringan dan komunikasi data pemerintah daerah;
- t. Penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak serta sistem pengamanan jaringan dan komunikasi data pemerintah daerah;
- u. Pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak serta sistem pengamanan jaringan dan komunikasi data pemerintah daerah; dan
- v. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang jaringan dan komunikasi data.

Bidang Jaringan dan Komunikasi Data memiliki tiga seksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data
- b. Seksi Persandian dan Sistem Keamanan Data
- c. Seksi Pengelolaan Perangkat Telekomunikasi dan Multimedia

#### **7. Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan *eGovernment***



Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan *eGovernment* merupakan unit kerja lini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan teknis, pembinaan, evaluasi sistem informasi, standarisasi layanan *eGovernment* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan tugasnya yaitu melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan teknis Sistem Informasi yang terintegrasi, penyusunan kebijakan statistik daerah, kegiatan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengintegrasian, pengelolaan basis data dan perangkat lunak penunjang sistem informasi dengan rincian fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan *eGovernment*;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan *eGovernment*;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan *eGovernment*;
- d. Penyusunan kebijakan, standarisasi, integrasi data dan statistik daerah berbasis elektronik;
- e. Penyusunan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, pengelolaan sistem informasi dan basis data serta perangkat lunak penunjang sistem informasi;
- f. Pelaksanaan Administrator Utama Sistem Informasi Daerah;
- g. Pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sistem informasi dan basis data serta perangkat lunak penunjang sistem informasi;
- h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknis Sistem Informasi yang terintegrasi;
- i. Perumusan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah Provinsi;

- j. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah Provinsi;
- k. Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);
- l. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknis sistem informasi yang terintegrasi;
- m. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknis sistem informasi yang terintegrasi;
- n. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknis sistem informasi yang terintegrasi;
- o. Pelaksanaan integrasi layanan publik dan pemerintahan di provinsi;
- p. Pelaksanaan layanan interoperabilitas dan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- q. Pelaksanaan layanan *Application Programme Interface (API)* daerah;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknis sistem informasi yang terintegrasi; dan
- s. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan *eGovernment*.

Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan *eGovernment* dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki tiga seksi, yaitu:

- a. Seksi Standarisasi Layanan *eGovernment* dan Basis Data
- b. Seksi Sistem Informasi Manajemen Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- c. Seksi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat

#### **8. Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi**

Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Kota Administrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota.

#### **9. Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi**



Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Kabupaten Administrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati dengan tugas melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian di wilayah Kabupaten administrasi.

#### **10. Unit Pelaksana Teknis**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dimana pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan peraturan gubernur. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis, yaitu:

- a. Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- b. Unit Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi (KPKIP)
- c. Unit *Jakarta Smart City* (JSC)
- d. Unit Pelayanan Statistik

#### **11. Kelompok Jabatan Fungsional**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional dapat membentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun untuk lingkup Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat membentuk Subkelompok Jabatan Fungsional dan dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Kepala Dinas dari pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan dengan menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

**II.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

**2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta didukung oleh sumber daya aparatur pegawai negeri sipil sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) orang yang memiliki latar belakang dari berbagai kelompok jabatan, disiplin ilmu, pangkat dan golongan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Data Pegawai Jabatan Struktural**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta**  
**Per Desember 2017**

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1
3.	Kepala Bidang	5
4.	Kepala Unit Pelayanan	4
5.	Kepala Suku Dinas	6
6.	Kepala Subbag dan Seksi	40
	Jumlah	57

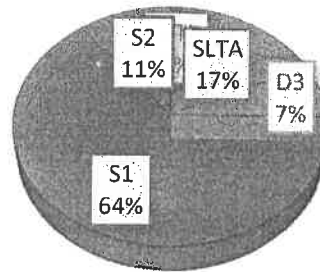
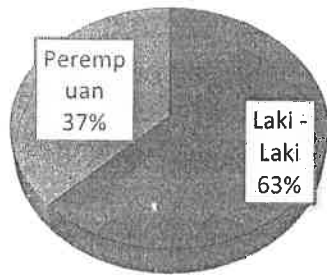
*Sumber: Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Anggaran 2017*

Adapun kondisi aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta berdasarkan jenis kelamin, dari total aparatur yang ada terdiri dari laki-laki sebanyak 149 orang dan perempuan sebanyak 89 orang dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (S2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2.2**  
**Data Pegawai Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta**  
**Per Desember 2017**

Jumlah	Jenis Kelamin		Pendidikan					
	L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
238	149	89	2	1	40	17	153	25



Sumber: Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Kemudian dilihat dari rata-rata usia aparaturnya, rentang usia aparatur di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta cukup bervariasi dengan usia termuda 21 tahun dan tertua 58 tahun dengan jumlah pegawai terbanyak berada pada usia 31-40 tahun, yaitu sebanyak 105 aparatur sebagaimana tampak pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Data Pegawai Berdasar Usia Aparatur**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta**  
**Per Desember 2017**

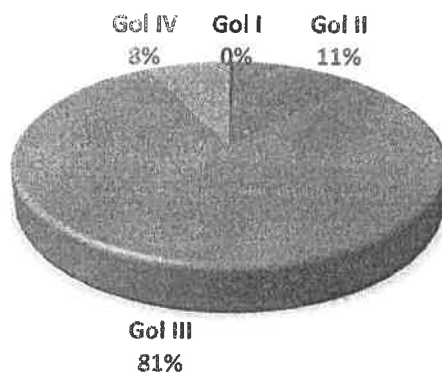
Jumlah	Usia Aparatur				
	s/d 20	21 s/d 30	31 s/d 40	41 s/d 50	51 s/d 58
238	-	10	105	45	75

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Sesuai data per Desember 2017, komposisi aparatur berdasar golongan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 orang golongan I, sebanyak 27 golongan II, sebanyak 192 orang golongan III, dan 18 orang golongan IV.

**Tabel 2.4**  
**Data Pegawai Berdasar Golongan**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta**  
**Per Desember 2017**

Jumlah	Golongan			
	I	II	III	IV
238	1	27	192	18



Sumber: Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Anggaran 2017

Melihat jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan pelayanan yang harus dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di seluruh unit wilayah Provinsi DKI Jakarta, yaitu di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

### 2.2.2 Aset atau Modal

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Sarana dan prasarana tersebut terbagi dalam setiap unit wilayah sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
Beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Blok G Lt.3 dan 13 Blok F Lt.2.
2. Suku Dinas Komunikasi, Informatika Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Beralamat di Jl. Tanah Abang I No.1, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160, Indonesia.
3. Suku Dinas Komunikasi, Informatika Kota Administrasi Jakarta Barat



- Beralamat Jalan Raya Kembangan No.2, Kembangan Selatan, Kembangan, RT.2/RW.2, Kembangan Sel., Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.
4. Suku Dinas Komunikasi, Informatika Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Beralamat Jalan Prapanca Raya No. 9, Blok A Lt.7, RT. 1 / RW. 1, Petogogan, Kebayoran Baru, RT.1/RW.1, Petogogan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160.
  5. Suku Dinas Komunikasi, Informatika Kota Administrasi Jakarta Timur  
Beralamat Komplek Kantor Walikota, Jl. DR. Sumarno, RT.11/RW.8, Pulo Gebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13940, Indonesia.
  6. Suku Dinas Komunikasi, Informatika Kota Administrasi Jakarta Utara  
Beralamat Jl. Laksda Yos Sudarso No. 27-29 Blok P Lantai 5, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kebon Bawang, RT.6/RW.13, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 Blok P lantai 5.
  7. Suku Dinas Kabupaten/Kota Kepulauan Seribu  
Beralamat Jl. Barakuda No. 14, Pulau Pramuka, Kec. Kepulauan Seribu, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14520.

Setiap unit wilayah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta di atas dilengkapi dengan peralatan mebeulair kantor yang masih dalam kondisi baik, namun untuk peralatan kantor seperti komputer sudah mulai mengalami ketertinggalan akibat kemajuan penggunaan sistem informasi yang menuntut penggunaan sarana teknologi yang lebih mutakhir.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan mobilitas kerja setiap harinya didukung pula dengan kendaraan operasional yang sejauh ini dalam kondisi cukup baik untuk dapat digunakan dalam melaksanakan berbagai tugas, baik di dalam maupun di luar wilayah unit kerja. Adapun kendaraan dinas operasional yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) unit kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda empat 9 (sembilan) unit dan kendaraan roda dua 12 (dua belas) unit dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 2.5**  
**Data Kendaraan Dinas Operasional**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta**  
**Per Desember 2017**

No	Jenis Kendaraan	Tahun Pembuatan	Jumlah
1	Sepeda Motor Honda Supra X NF 125 TD	2011	5 unit
2	Sepeda Motor Honda Vario NC 110 D	2009	3 unit
3	Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW FI	2015	4 unit
4	Mobil Toyota Kijang Innova E	2008	1 unit
5	Mobil Toyota New Avanza 1.5G MT	2012	1 unit
6	Mobil Isuzu TBR 54 PU Turbo	2012	2 unit
7	Mobil Isuzu Panther Turbo H Tour	2013	2 unit
8	Mobil Isuzu Panther TBR 54F Turbo H	2013	3 unit
jumlah			21 unit

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Anggaran 2017

Adapun aset tetap Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta terhitung sampai dengan 31 Desember 2017 sejumlah Rp **819.084.550.205,-** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Nilai Aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Per Desember 2017**

NO	URAIAN	NILAI ASET (Rp)	
		2016	2017
1.	Tanah	8,000,000,000	8,000,000,000
2.	Peralatan dan Mesin	393,003,331,424	415,060,264,018
6.	Gedung dan Bangunan	9,369,299,446	1,089,000,000
7.	Jalan, jaringan dan Instalasi	4,267,235,293	4,267,235,293
8.	Aset Tetap lainnya	-	8,014,957,446
9.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
10.	Aset Tidak berwujud	21,982,546,926	39,430,369,706
11.	Akumulasi penyusutan	307,192,120,131	343,222,723,742
<b>JUMLAH</b>		<b>743.814.533.220</b>	<b>819.084.550.205</b>

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Anggaran 2017

Secara keseluruhan, jenis dan jumlah sarana prasarana pendukung serta total aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sudah cukup memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya namun untuk pemeliharaan sarana serta *upgrade* teknologi



harus terus dilakukan guna menjaga ketersediaan sarana dan prasaran serta teknologi yang senantiasa *up to date* agar tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya.

### **II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Selama periode tahun 2013-2017, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta telah mencapai target-target pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian antara lain melalui penyusunan dan pengembangan kebijakan dan regulasi komunikasi dan informatika; pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; mendorong pemanfaatan yang produktif, sehat dan aman; diseminasi informasi publik; serta penelitian dan pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

#### **A. Penyusunan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika**

Kegiatan penyusunan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika merupakan pendukung penyusunan kebijakan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 guna mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil kegiatan tersediannya kebijakan dalam bidang komunikasi dan informatika dengan pelaksanaan kegiatan menghadirkan narasumber profesional dalam bidang komunikasi dan informatika serta ahli perencanaan secara nasional agar dapat tersinkronisasi dan terintegrasi dengan program pemerintahan pusat.

Terkait pencapaian dalam penetapan kebijakan, ada beberapa kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan TIK di Pemprov DKI Jakarta yang harus dijadikan acuan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu:

- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2001 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*);
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK);
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 39 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA); dan
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.



- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik

## **B. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas**

Dalam era globalisasi saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengatasi masalah dan perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, faktor yang harus diperhatikan tidak hanya berfokus pada pengelolaan informasi semata, melainkan juga harus fokus untuk menjaga dan meningkatkan mutu informasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dalam konteks ini, informasi dapat dikatakan menjadi kunci untuk mendukung dan meningkatkan manajemen agar dapat memenangkan persaingan yang semakin lama semakin cepat dan meningkat. Pemanfaatan teknologi informasi memberi peluang terjadinya transformasi dan peningkatan produktifitas. Namun demikian, penerapan teknologi informasi membutuhkan biaya yang cukup besar dengan resiko kegagalan yang tidak kecil. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi di dalam organisasi harus dapat digunakan secara maksimal dengan didukung pemahaman yang tepat mengenai konsep dasar dari sistem yang berlaku, teknologi yang dimanfaatkan, aplikasi yang digunakan dan pengelolaan operasi dan pengelolaan pusat data serta pengembangan sistem yang dilakukan. Upaya ini penting mengingat adanya peningkatan kebutuhan dari para pelanggan terhadap tuntutan kinerja yang lebih baik. Melihat kepada penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi, dalam kurun waktu tahun 2013-2017 capaian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta terkait pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas adalah:

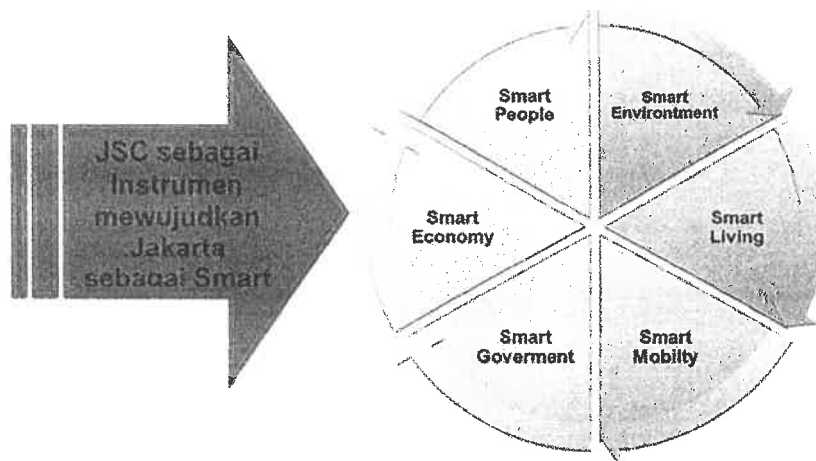
1. *Jakarta Smart City Control Room*;
2. 432 Gedung Pemerintah terhubung dengan Fiber Optic, 266 koneksi wifi, 9 Pulau di Kepulauan 1000 terhubung dengan Microwave;
3. Perangkat Keamanan Jaringan;
4. Memiliki 1 (satu) *Data Center* dan 1(satu) *Disaster Recovery Center Sistem Informasi*;
5. Memiliki Perangkat *middleware* untuk integrasi Sistem Informasi;
6. 20 integrasi Sistem Informasi; dan
7. *BigData Analysis*.

### ***Jakarta Smart City***

*Jakarta Smart City* adalah pengaplikasian konsep *smart city* yang mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami, dan

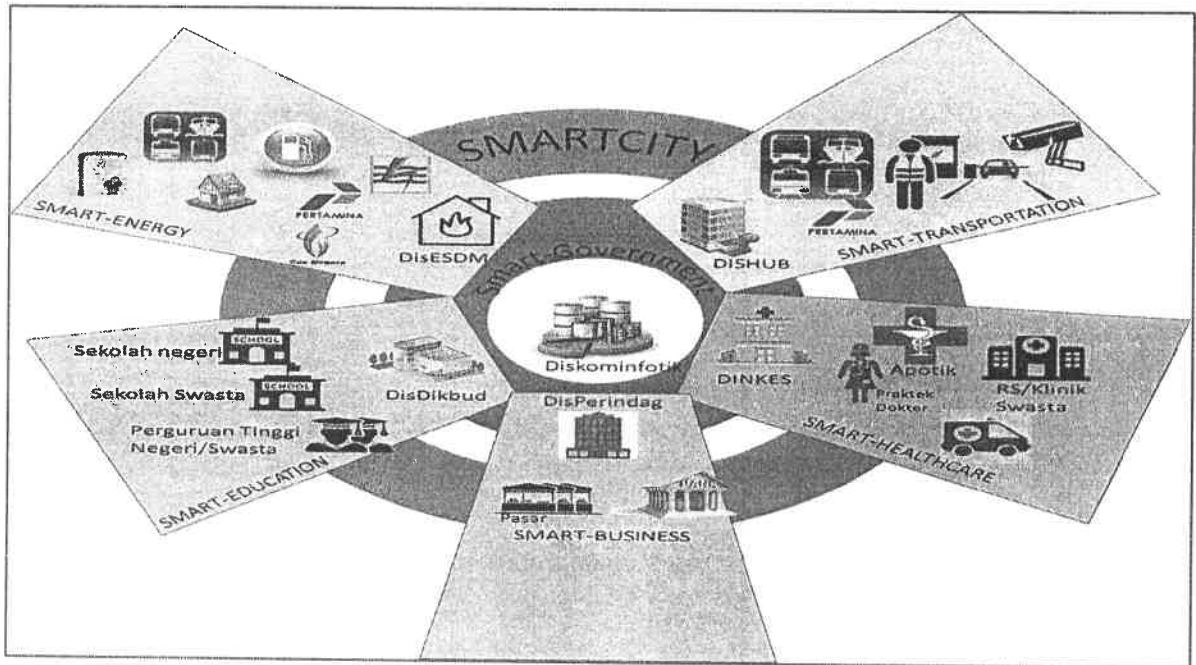
mengontrol berbagai sumber daya di suatu kota dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Visi Jakarta *Smart City* ini adalah Jakarta Baru yang efisien dan inovatif dengan misinya untuk mewujudkan Jakarta Baru yang informatif, transparan, serta mendukung kolaborasi menggunakan teknologi untuk pelayanan publik yang lebih baik. Konsep *smart city* di Jakarta dibuat berdasarkan 6 pilar: *Smart Governance*, *Smart People*, *Smart Living*, *Smart Mobility*, *Smart Economy*, dan *Smart Environment* agar Jakarta *smart city* dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat dengan mendapatkan hidup yang lebih baik.

**Gambar 2.2**  
**Enam Pilar JSC**



Dengan *smart city*, data disajikan dengan lebih transparan. Selain itu, *smart city* dapat meningkatkan partisipasi warga seperti membuat data, aplikasi, memberikan masukan, dan memberikan kritikan sehingga kota ini menjadi kota yang pintar karena melibatkan warganya, melibatkan pemerintahnya, kekuasaannya, investornya, swastanya, anggarannya, dan ruangnya untuk menjadikan semua kehidupan lebih baik.

Gambar 2.3  
Ekosistem TIK Smart City



Gambar 2.4  
Produk dan Layanan Jakarta Smart City

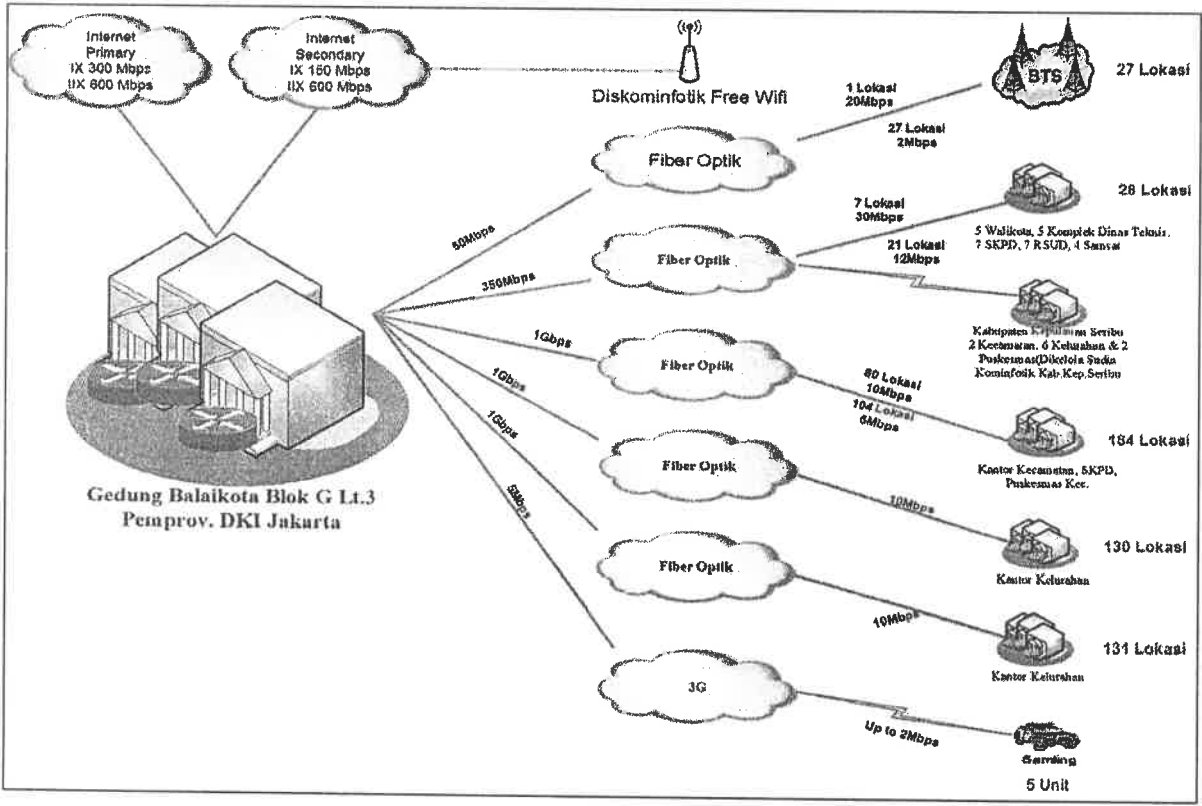




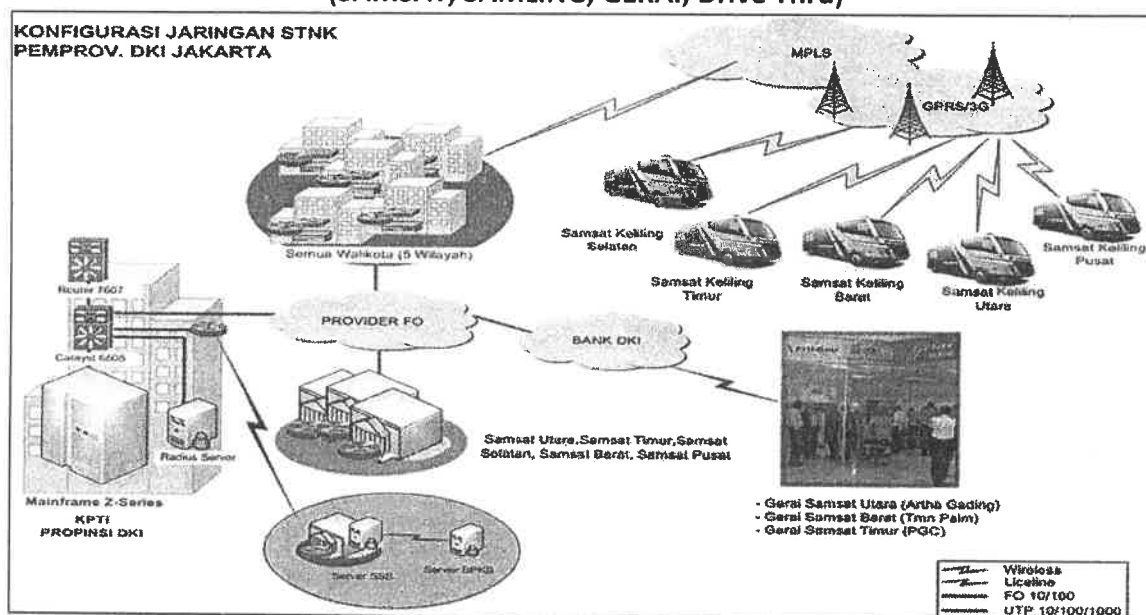
Secara umum, manfaat dari pengembangan teknologi dalam Jakarta *Smart City* ini adalah:

1. Portal Jakarta Smart City (JSC) -smartcity.jakarta.go.id- merupakan website untuk menampilkan data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Keberadaan portal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan transparansi yang terverifikasi dengan memusatkan dan mengintegrasikan semua data dalam satu wadah.
2. Aplikasi untuk Melibatkan Masyarakat KPI Lurah, SMS Gubernur, CRM;
3. Digitalisasi Data, yaitu mengelola dan mengubah semua data menjadi data digital untuk diintegrasikan ke portal smart city;
4. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga, seperti: go-food, zomato, traffi, google transit.
5. Bimbingan teknis untuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan pengaduan masyarakat;
6. Membantu Kelurahan dan SKPD untuk memecahkan permasalahan teknis;
7. Mensosialisasikan program-program unggulan Jakarta.

**Gambar 2.5**  
**Topologi *Backbone* Jaringan Pemrov DKI Jakarta 2017**



Gambar 2.6  
Infrastruktur Pajak Kendaraan Bermotor  
(SAMSAT, SAMLING, GERAJ, Drive Thru)



Semua data yang terkoneksi sebagaimana tampak pada gambar di atas, tersimpan dalam data center (DC) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7  
Kapasitas Data Center (DC) – Rekap Perangkat Per SKPD/UKPD

No	SKPD/UKPD	Penanggung Jawab	Jumlah
1	Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Daerah	6
2	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	Kepala Inspektorat	1
3	Biro Umum	Kepala Biro	1
4	Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	Kepala Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sdm	2
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan	3
6	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Kepala Badan	21
7	Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Badan	1
8	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Bidang Pengembangan Dan Teknologi Kediklatan	1
9	Badan Pembinaan BUMD Dan Penanaman Modal	Kepala Subbagian Perencanaan Dan Anggaran	1
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan	1
11	Pusat Data Dan Informasi Kebencanaan	Kepala Pusat	5
12	Dinas Kesehatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Anggaran	1

13	Pusat Perenc Pengend Pend Personal & Operasional	Kepala Pusat	1
14	Dinas Sosial	Kepala Dinas	1
15	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Kepala Dinas	2
16	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Kepala Seksi Analisa Dan Monitoring Berita	2
17	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	3
18	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi	151
19	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Kepala Seksi Pusat Data Dan Perangkat Teknologi Informasi	84
20	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen	50
21	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Kepala Bidang Jaringan Teknologi Komunikasi	73
22	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi Dan Multimedia	35
23	Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Kepala Unit	18
24	Unit Pengelola Jakarta Smart City	Kepala Unit	46
25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	1
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Bidang Aktivitas Usaha	19
<b>Total</b>			<b>530</b>

**Tabel 2.8**  
**Kapasitas Data Center (DC) – Rekap Perangkat Per Golongan dan Kelompok**

No	Golongan	Kelompok	Jumlah
1	Bangunan Fisik / Sipil DataCenter	Ceiling	4
2	Distribusi Kelistrikan	Panel Listrik	20
3	Pembangkit Kelistrikan dan Pencahayaan	UPS Controller and Inverter	2
4	Pembangkit Kelistrikan dan Pencahayaan	Baterai	2
5	Pendinginan	In-Door Unit	13
6	Pencegah dan Pemadam Kebakaran	Tabung Racun Api	5
7	Pencegah dan Pemadam Kebakaran	Controller Sistem Pemadam Api	4
8	Perangkat Komunikasi	Data Switching	117
9	Perangkat Komunikasi	Data Terminal (PatchPanel/OTB)	7
10	Keamanan dan Pemantau Elektronik	CCTV Camera	19
11	Keamanan dan Pemantau Elektronik	Software Monitoring	4
12	Keamanan dan Pemantau Elektronik	Access Door	8
13	Perangkat Komputer	Storage / Penyimpanan	20
14	Perangkat Komputer	Server / Mainframe	268
15	Perangkat Komputer	PC /Laptop	14
16	Perangkat Komputer	Monitor / TV	17



17	Perangkat Komputer	Keyboard, Video, Mouse	3
18	Perangkat Komputer	Printer	3
<b>Total</b>			<b>530</b>

**Tabel 2.9**  
**Kapasitas Data Center (DC) – Rekap Per Ruang Data Center**

No	Nama Ruang	Jumlah
1	Ruang Power-A	10
2	Ruang Power-B	11
3	Ruang Server	213
4	Ruang MainFrame	10
5	Ruang MeetMe	1
6	Ruang NOC	6
7	Ruang Vendor	4
8	Ruang Co-location	125
9	Koridor Utama	12
10	Ruang Network	103
11	Koridor ke NOC	3
12	Koridor Dalam DC	32
<b>Total</b>		<b>530</b>

**Tabel 2.10**  
**Kapasitas Data Center (DC) – Rekap Perangkat Ruang Colo dan Ruang Farm Server**

Ruang Colo dan Ruang Farm Server					
No	Ruang	Rack	Terisi	Kosong	Jumlah
1	3 - Ruang Server	3 - Rak 1	41	1	42
2	3 - Ruang Server	4 - Rak 2	41	1	42
3	3 - Ruang Server	5 - Rak 3	24	18	42
4	3 - Ruang Server	6 - Rak 4	27	15	42
5	3 - Ruang Server	7 - Rak 5	35	7	42
6	3 - Ruang Server	8 - Rak 6	30	12	42
7	3 - Ruang Server	9 - Rak 7	30	12	42
8	3 - Ruang Server	10 - Rak 8	15	27	42
9	3 - Ruang Server	11 - Rak 9	17	25	42
10	3 - Ruang Server	12 - Rak 10	33	9	42
11	3 - Ruang Server	13 - Rak 11	32	10	42
12	3 - Ruang Server	14 - Rak 12	30	12	42
13	3 - Ruang Server	15 - Rak 13	34	8	42
14	3 - Ruang Server	16 - Rak 14	42		42
15	3 - Ruang Server	17 - Rak 15	32	10	42
16	3 - Ruang Server	18 - Rak 16	33	9	42
17	3 - Ruang Server	78 - Rak 17	35	7	42
18	3 - Ruang Server	79 - Rak 18	18	24	42
19	11 - Ruang Co-location	39 - Rak 1	14	28	42
20	11 - Ruang Co-location	40 - Rak 2	20	22	42
21	11 - Ruang Co-location	41 - Rak 3	28	14	42
22	11 - Ruang Co-location	42 - Rak 4	37	5	42
23	11 - Ruang Co-location	43 - Rak 5	37	5	42
24	11 - Ruang Co-location	44 - Rak 6	31	11	42
25	11 - Ruang Co-location	45 - Rak 7	35	7	42
26	11 - Ruang Co-location	46 - Rak 8	39	3	42
<b>Total</b>			<b>790</b>	<b>302</b>	<b>1,092</b>
			72%	28%	

**Tabel 2.11**  
**Kapasitas Data Center (DC) – Rekap Perangkat Ruang Network**

No	Ruang	Rack	Terisi	Kosong	Jumlah
1	14 - Ruang Network	21 - Rak 1	2	40	42
2	14 - Ruang Network	22 - Rak 2	5	37	42
3	14 - Ruang Network	23 - Rak 3		42	42
4	14 - Ruang Network	24 - Rak 4		42	42
5	14 - Ruang Network	25 - Rak 5	26	16	42
6	14 - Ruang Network	26 - Rak 6	33	9	42
7	14 - Ruang Network	27 - Rak 7	35	7	42
8	14 - Ruang Network	28 - Rak 8		42	42
9	14 - Ruang Network	29 - Rak 9	30	12	42
10	14 - Ruang Network	30 - Rak 10	27	15	42
		<b>Total</b>	<b>182</b>	<b>364</b>	<b>420</b>
			43%	87%	

**Tabel 2.12**  
**Kapasitas Data Center (DC) Per 20 Oktober 2017**

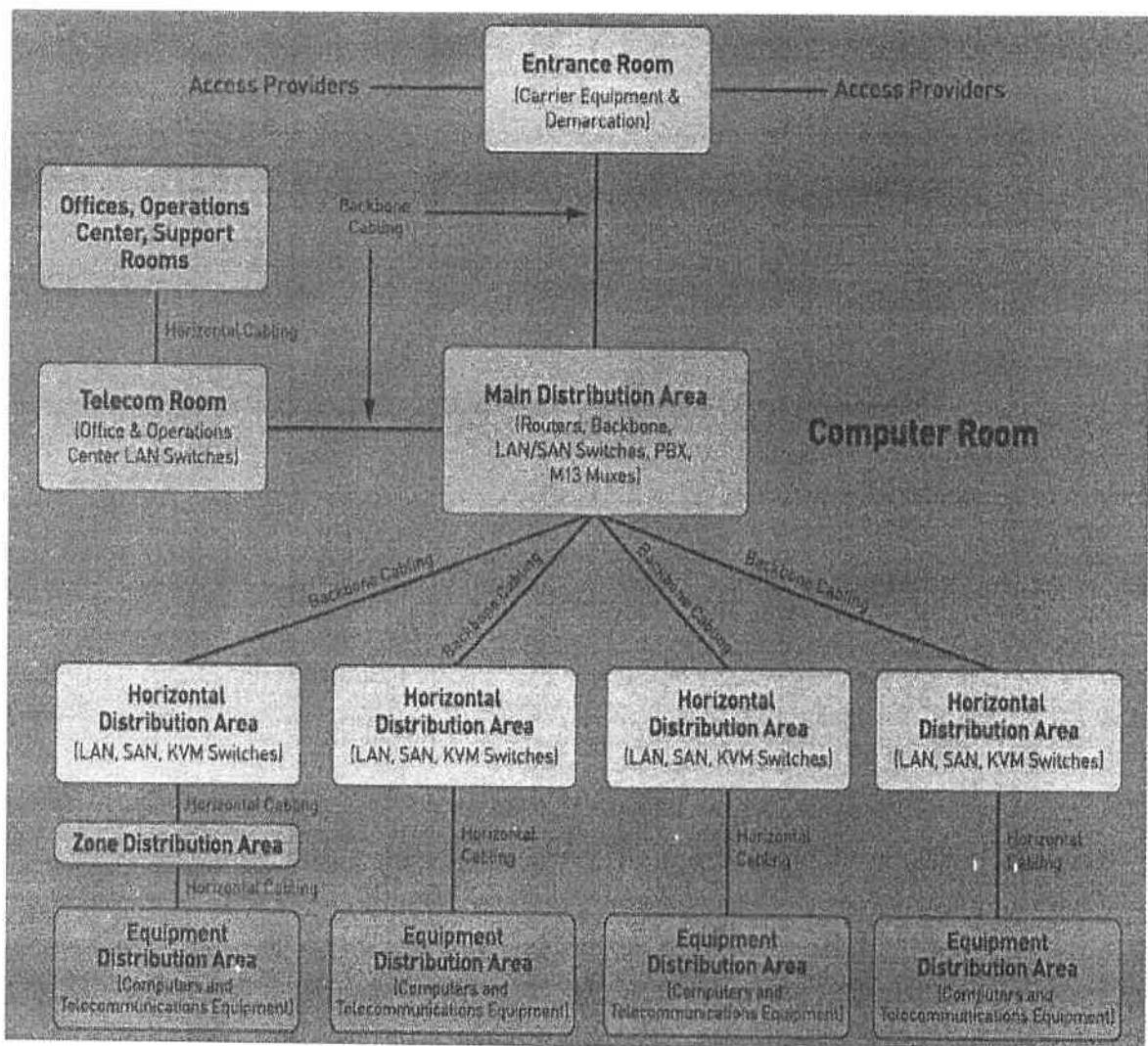
Kapasitas DC Pemprov DKI Jakarta Per 20 Oktober 2017													
No	Simulasi Kapasitas DC	Sisa U		Kebutuhan U per Server	Asumsi				Pertumbuhan Pembangunan Aplikasi per Tahun	Sisa Daya Tampung			
		R. Colo & Server	R. Network		Kebutuhan Server per aplikasi					R. Colo & Server	R. Network	Total	Satuan
					App	Databases	Backup	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menghitung Sisa daya tampung collocation Server	302	364		-	-	-	-	-	75.5	91	166.5	Unit
2	Menghitung sisa kapasitas DC utk mengcover kebutuhan Server Aplikasi	-	-	-	1	2	1		-	18.88	22.75	41.63	App
3	Menghitung limit Tahun kapasitas DC utk mengcover kebutuhan Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1.89	2.28	4.16	Tahun



Tabel 2.13  
Kapasitas Rak Server di Data Center Balaikota per Desember 2017

No	Nama Ruang	Kapasitas Rak	Terisi	Kosong
1.	Ruang Server	756 U	549 U	207 U
2.	Ruang Co-location	336 U	259 U	77 U
3.	Ruang Network	546 U	182 U	364 U
<b>Total</b>		<b>1638 U</b>	<b>990 U</b>	<b>648 U</b>

Gambar 2.7  
Target dan Realisasi Pusat Data



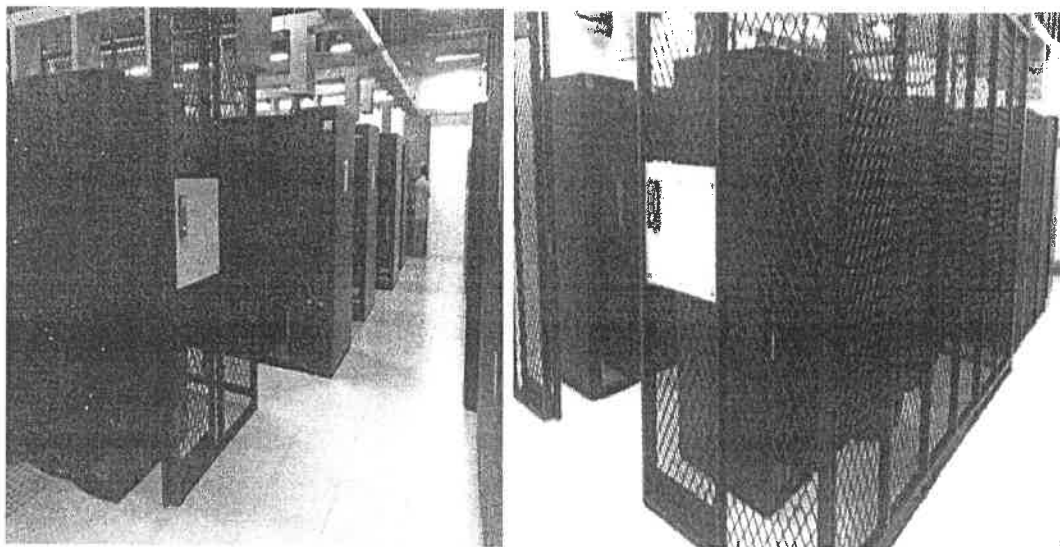
Pengelompokan server atau Equipment Distribution Area bisa menggunakan 4 bidang yang terdapat dalam fungsi Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini akan dianalisa lebih lanjut dalam implementasi berdasarkan integrasi antar server serta kebutuhan manajemen dan karakteristik server secara keseluruhan.



Tabel 2.14  
Komponen Arsitektur Teknis Data Center

Komponen		Aplikasi
Sistem Sipil DC	Memaparkan komponen-komponen sipil yang mendukung arsitektur data center.	<a href="http://dcoss.jakarta.go.id/monitoring">http://dcoss.jakarta.go.id/monitoring</a> <a href="http://dcdki.jakarta.go.id">http://dcdki.jakarta.go.id</a> <a href="http://dcoss.jakarta.go.id/dashboard">http://dcoss.jakarta.go.id/dashboard</a>
Sistem Pendingin	Memaparkan komponen-komponen pengatur pendinginan yang mendukung arsitektur data center.	
Sistem Pencegah Kebakaran	Memaparkan komponen-komponen pencegah kebakaran yang mendukung arsitektur data center.	
Jaringan Data	Memberikan gambaran infrastruktur jaringan data pendukung arsitektur data center.	
Sistem Kelistrikan	Memberikan gambaran infrastruktur kelistrikan pendukung arsitektur data center	
Sistem Keamanan	Memberikan kriteria dan tuntunan dalam mengamankan dan memberikan akses keluar masuk pada data center	
Aplikasi Manajemen DataCenter	Memberikan kriteria dan tuntunan dalam mendokumentasi semua asset dan kondisi lingkungan dalam data center.	
Perangkat Non Infra DataCenter	Memberikan gambaran infrastruktur sistem server dan storage yang terpasang pada data center.	

Gambar 2.8  
Kondisi *Disaster Recovery Center (DRC)* Tahun 2017



Langkah berikutnya setelah pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas dilakukan adalah pentingnya penataan, pengembangan dan pengelolaan segala infrastruktur dan



aksesibilitas yang dimiliki. Salah satunya adalah penataan, pengembangan dan pengelolaan *Disaster Recovery Center* (DRC). Kegiatan ini merupakan penataan, pengembangan dan pengelolaan *Disaster Recovery Center* (DRC) dengan pejabat pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan Monitoring Pusat Data. Fungsi Pengelolaan *Disaster Recovery Center* (DRC) digunakan sebagai backup/replikasi data center Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga sewaktu-waktu jika terjadi bencana di data center maka akan menimbulkan dampak yang minimal terhadap layanan yang ada. Adapun cakupan kegiatan ini antara lain tampak pada tabel berikut.

**Tabel 2.15**  
**Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan *Disaster Recovery Center* (DRC)**

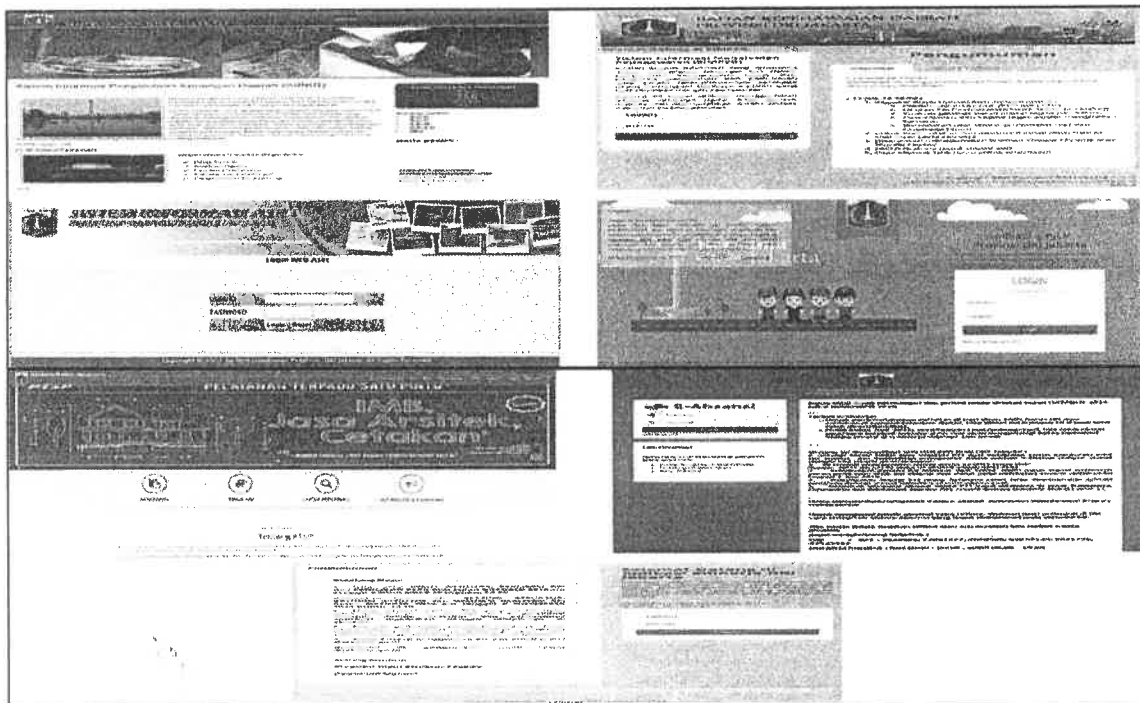
No.	Nama Barang dan Spesifikasi Teknis	Jumlah
1.	Working Space Dedicated	12 bulan
2.	Ruang Operator Dedicated	12 bulan
3.	Dedicated CCTV (3 Unit)	12 bulan
4.	Power AC (100 KVA)	12 bulan
5.	Link Backhaul Point to point dari DRC ke Data Center Balaikota (Dedicated P to P 2 (dua) core FO, link backhaul FO 2 (dua) core throughput 100 Mbps, Backup link FO 2 (dua) core)	12 bulan
6.	Ruang/Space DRC min: 8 x 1,2 x 2,4 m, termasuk Link Bandwidth Internet sebesar 40 Mbps, Fasilitas Service Networking untuk Firewall, Routing Internet, Switch untuk server farm dan mikrotik, Sinkronisasi/ Interkoneksi dan integrasi network yang ada: bandwidth, backhaul, server jaringan dan jaringan internet	12 bulan

Kemudian, dalam rangka mewujudkan *eGovernment*, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, khususnya Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan *eGovernment*, selama kurun waktu hingga akhir 2017 telah melaksanakan: (1) pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi bidang keuangan yang mencakup pembangunan dan pengembangan sistem informasi SIPKD, Aset, Perjalanan Dinas, ePerkara dan Anjab ABK; (2) Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Bidang Pemerintahan yang mencakup pembangunan dan pengembangan sistem informasi absensi, kepegawaian, eKinerja, PTSP, ePJLP, inventarisasi TIK, pesan ruang; dan (3) Pengadaan dan pemeliharaan database dan aplikasi software yang mencakup pekerjaan *webmethods annual software support contract ID: 2037719* dan *contract ID: 2041174*, kegiatan pengadaan lisensi database



MySQL, kegiatan pengadaan penambahan lisensi dan perpanjangan ATS Oracle Enterprise, pekerjaan tuning aplikasi *interkoneksi dan Relation Database Management Sistem (RDBMS)*.

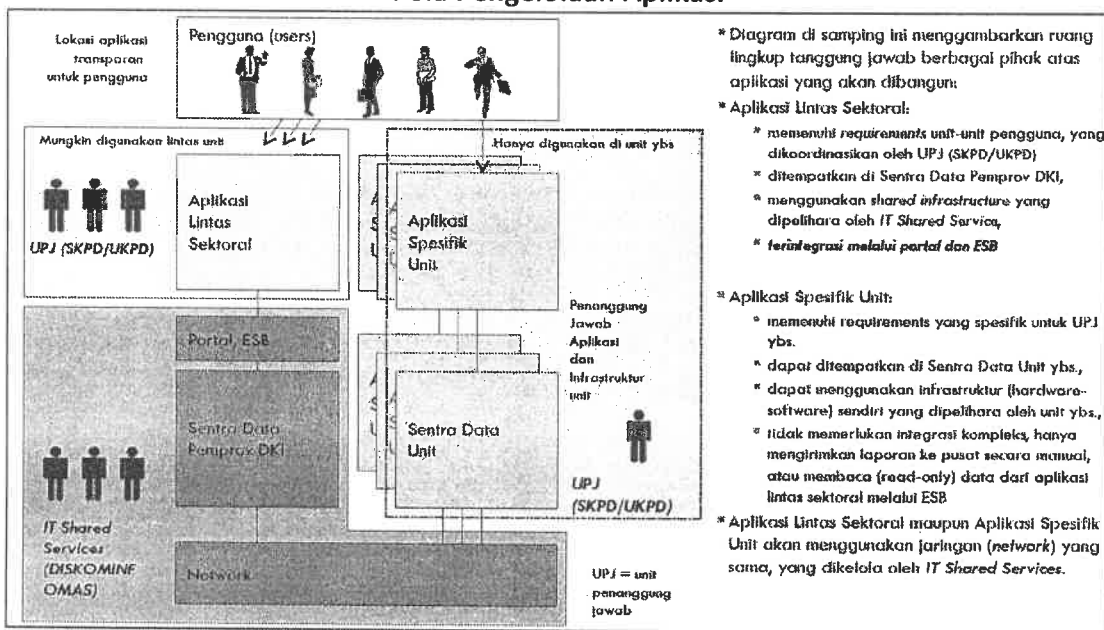
**Gambar 2.9**  
**Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan e-Gov**



**Tabel 2.16**  
**Integrasi Sistem Informasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017**

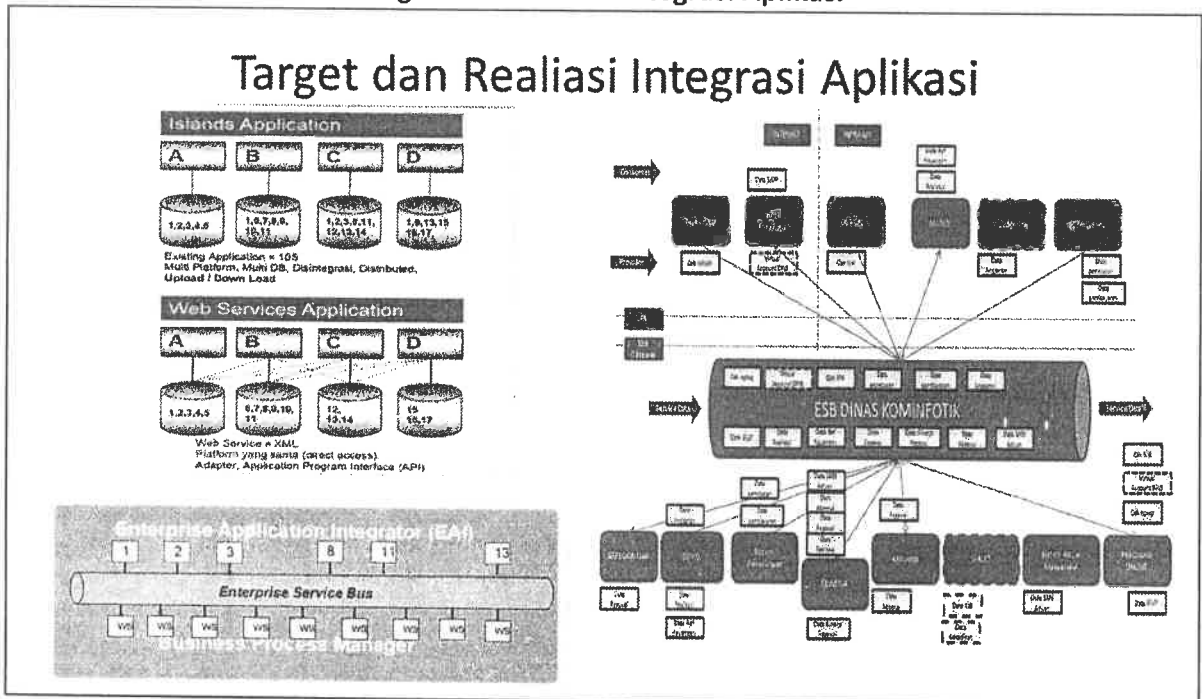
No	Intergrasi Sistem Informasi	Keterangan
1	Data Profil Penduduk berdasarkan NIK dan KK	Aplikasi Sistem informasi adminstrasi kependudukan aplikasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) (Data NIK dan KK)
2	Data Perizinan TDP dan TDG	Aplikasi Sistem Perizinan Online untuk Kementerian Perdagangan (Data TDP dan TDG)
3	Data DPA, Data Realisasi	Aplikasi SIPKD dengan aplikasi E-Lang BPPBJ
4	Data Profil Pegawai, Referensi Unit Kerja	Aplikasi SIMPEG untuk kebutuhan aplikasi e-Perkara milik Biro Hukum
5	Data Profil Pegawai, Referensi Unit Kerja	Aplikasi SIMPEG untuk kebutuhan aplikasi e-PJLP milik BKD
6	Data Profil Pegawai	Aplikasi SIMPEG untuk kebutuhan aplikasi SIJALDIS Perjalanan Dinas milik KDH
7	Data Profil dan Status Pajak Kendaraan bermotor berdasarkan No Plat Mobil	Aplikasi Pajak Kendaraan Bermotor untuk kebutuhan E-samsat Nasional
8	Data Profil dan Status Pajak Kendaraan bermotor berdasarkan No Plat Mobil	Aplikasi Pajak Kendaraan Bermotor untuk kebutuhan Korlantas POLRI
9	Data NPWP	Aplikasi Pajak Dirjen Pajak ke Aplikasi Pajak BPRD
10	Data user Aset	Aplikasi E-ASET ke portal bpad.jakarta.go.id
11	Data Kejadian / bencana	Aplikasi Kejadian BPBD dengan Jakarta Kini (JAKI) milik JSC
12	Data Aset TIK	Aplikasi Aset dengan Inventik

Gambar 2.10  
Pola Pengelolaan Aplikasi

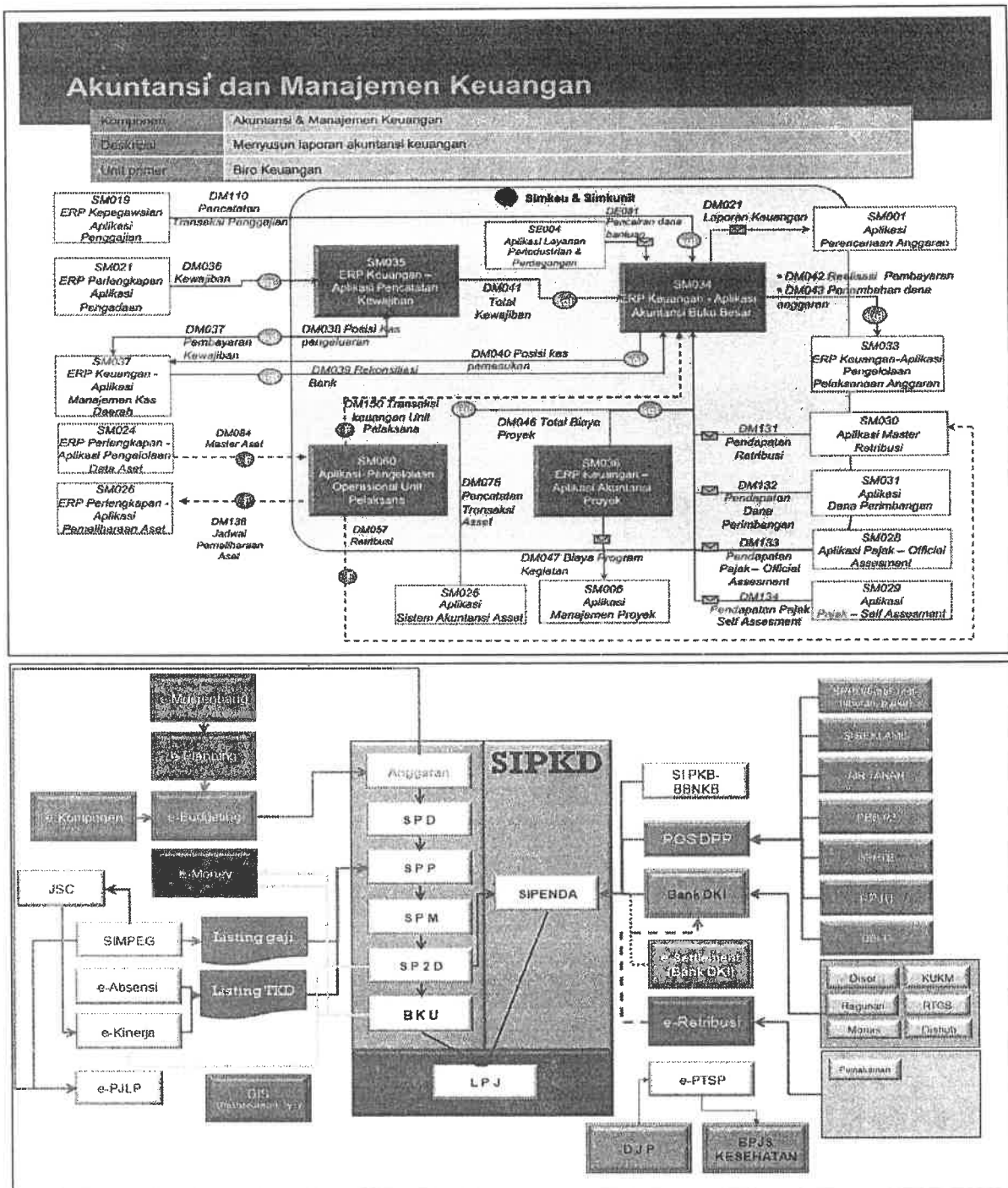


Berdasarkan inventarisasi aplikasi sampai dengan bulan Agustus 2017, terdapat 130 aplikasi dengan kategorisasi bidang kesejahteraan rakyat 54 aplikasi, bidang keuangan 30 aplikasi, bidang pembangunan lingkungan hidup 13 aplikasi, bidang pemerintahan 25 aplikasi, bidang perekonomian 8 aplikasi.

Gambar 2.11  
Target dan Realisasi Integrasi Aplikasi



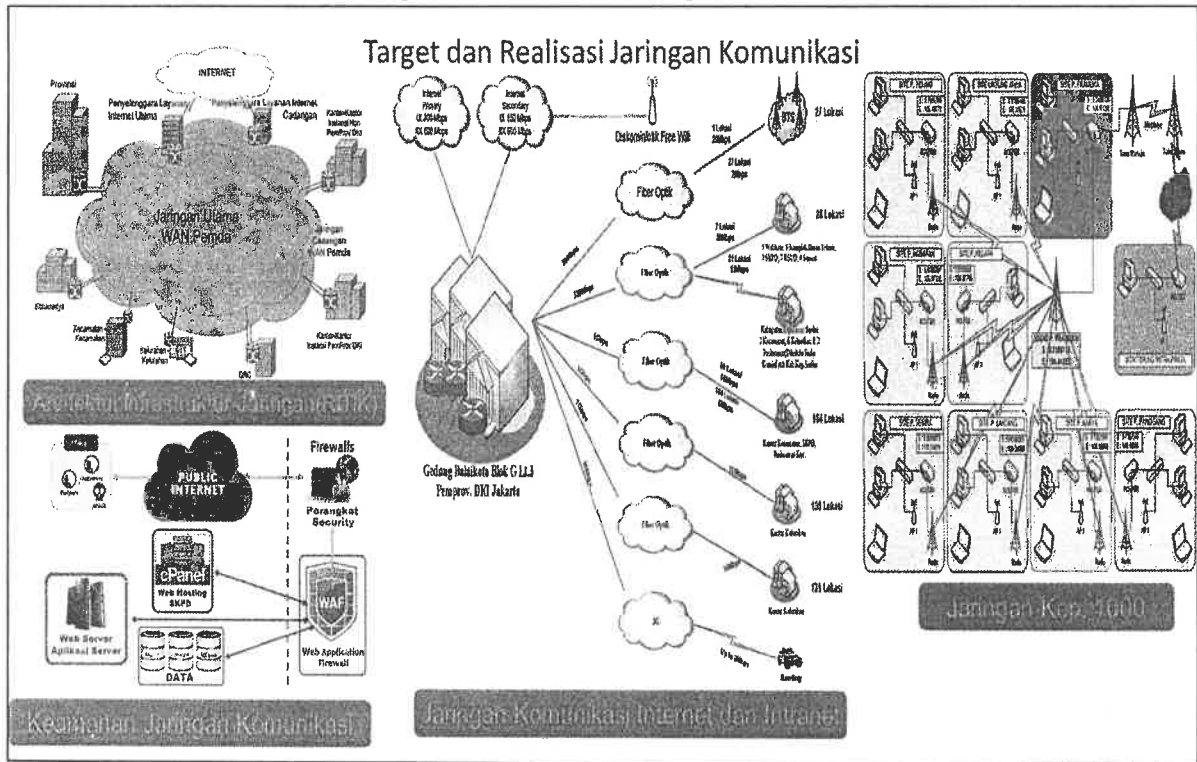
Gambar 2.12  
Target dan Realisasi Aplikasi Keuangan



Dalam era transparansi sekarang ini, setiap orang berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah dan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik, termasuk pula Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, untuk menyediakan informasi

diminta atau tidak kecuali informasi tertentu, secara cepat, tepat waktu, sederhana dengan biaya ringan bagi seluruh warga masyarakat maka dalam hal ini pemanfaatan teknologi komunikasi dalam penyebaran informasi publik saat ini dalam tahap yang sudah menjadi kelumrahan.

**Gambar 2.13**  
Target dan Realisasi Jaringan Komunikasi



**Tabel 2.17**  
Pengembangan Website di Pemprov DKI Jakarta  
Website yang dikembangkan

No	Website yang dikembangkan	
	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Inspektorat DKI Jakarta	Pelampauan KLB
2	Dinas Kesehatan	Statistik DKI Jakarta
3	Unit Pengendalian Grafikasi	Puskesmas Gambir
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta	Panti Sosial Bina Remaja
5	UP Monas	Pekan Olahraga Seni dan Budaya Korpri DKI Jakarta
6	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Panti Sosial Pulo Gadung
7	Taman Ismail Marzuki	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
8	Kelurahan Kota Bambu Selatan	Inspektorat Kepulauan Seribu
9	RKPD Bappeda	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta

**Tabel 2.18**  
**Pengembangan 11 Aplikasi yang Terintegrasi Jakarta Smart City**

No	Nama Aplikasi	Overview	Fitur
1	Citizen relation management	Sistem penanganan dan pengelolaan pengaduan dan pelaporan masyarakat yang dapat diakses via mobile dan web	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima laporan masuk</li> <li>- Melakukan disposisi</li> <li>- Melakukan koordinasi</li> <li>- Melakukan tindak lanjut</li> <li>- Melihat progress laporan</li> <li>- Melakukan pemantauan laporan</li> <li>- Menampilkan penilaian penanganan aduan</li> </ul>
2	Scorecard lurah dan Camat	Aplikasi web internal pengelolaan pendataan, perencanaan kerja, pencapaian dan juga pelaporan hasil kerja kelurahan dan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan aset dan kondisi lapangan</li> <li>- Perencanaan kerja untuk melengkapi 16 indikator</li> <li>- Pencapaian hasil kerja bulanan</li> </ul>
3	Kinerja. Jakarta.go.id	Aplikasi web untuk menampilkan hasil kerja SKPD, Kelurahan dan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menampilkan data hasil kinerja SKPD Kelurahan dan Kecamatan</li> <li>- Melihat detail pencapaian kinerja</li> </ul>
4	Portal Jakarta Smart City	Aplikasi web menampilkan profil dan informasi detail Jakarta Smart City	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menampilkan informasi detail dan profil Jakarta Smart City</li> <li>- Menampilkan event Jakarta Smart City</li> <li>- Menampilkan Blok Jakarta Smart City</li> </ul>
5	Peta Jakarta Smart City	Aplikasi web dan mobile menampilkan peta yang berisikan dataset yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menampilkan data dan layer dataset yang dipublikasikan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam bentuk Peta</li> </ul>
6	Web Builder	Aplikasi web untuk membuat web profil SKPD dan Kelurahan/ Kecamatan sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menampilkan profil dari SKPD</li> <li>- Menampilkan event/informasi berita</li> </ul>
7	Pantau Banjir	Aplikasi web internal untuk melihat kondisi lapangan terkait banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melihat laporan terkait banjir dari Qlue</li> <li>- Melihat laporan banjir dari BPBD</li> <li>- Melihat laporan banjir dari petajakarta.org</li> </ul>
8	Mobile app input	Aplikasi mobile untuk proses pendataan di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pendataan untuk menyimpan data seperti teks, gambar dan koordinasi</li> </ul>
9	Aplikasi Pendataan Warga	Aplikasi mobile untuk membantu pendataan di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pendataan berdasarkan form pendataan yang diperlukan</li> <li>- Terintegrasi dengan data kependudukan agar penggunaan data dapat lebih efektif</li> </ul>
10	Executive Dashboard	Aplikasi mobile untuk pimpinan untuk dapat memantau kondisi umum dari Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memantau Status</li> <li>- Transjakarta</li> <li>- Penyerapan Anggaran</li> <li>- Lampu Jalan Cerdas</li> <li>- Truk Sampah</li> <li>- Alat Berat</li> </ul>
11	Jakarta.go.id	Portal web berisikan informasi terpadu mengenai Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengenal Jakarta</li> <li>- Profil tentang Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta</li> <li>- Datang dan Kunjungi Jakarta</li> <li>- Informasi wisata berita dan Artikel</li> <li>- Informasi mengenai bisnis di Jakarta</li> <li>- Informasi mengenai layanan masyarakat Pemprov DKI Jakarta</li> </ul>

Teknologi informasi membuka peluang bagi akses, pengelolaan data informasi dan pendayagunaan dalam volume besar secara tepat dan akurat. Dalam proses pemerintahan, hal ini akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, kemudahan akses informasi ini harus pula dibarengi dengan monitoring dan evaluasi terhadap segala informasi yang beredar guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hasil dari pengelolaan monitoring dan analisa pemberitaan dari media massa cetak, televisi dan online Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diantaranya: (1) Isu harian berita media massa: 650 berita; (2) Isu Mingguan: 49 berita; (3) Isu Kasuistik: 12 berita; dan (4) Agenda rapim: 47 berita. Adapun rincian berita berdasarkan kelompok manfaatnya tersaji sebagai berikut.

**Tabel 2.19**  
**Monitoring dan Evaluasi Berita Berdasarkan Manfaatnya Tahun 2017**

Berita	Media Cetak	Media Online	Media TV
Berita Positif	12.115	41.013	3.937
Berita Netral	24.604	54.204	28.890
Berita Negatif	10.712	36.105	189
<b>Total</b>	<b>47.431</b>	<b>131.322</b>	<b>33.016</b>

**Tabel 2.20**  
**Deskripsi Monitoring Berita Provinsi DKI Jakarta**

MONITORING BERITA CETAK	MONITORING MEDIA TV	MONITORING BERITA ONLINE
Monitoring terhadap 18 Koran dan 2 majalah mingguan. Kliping digital (flipbook/ebook) ditujukan ke Gubernur, Wagub, Sekda, Asisten Sekda, Deputi Gub dan Asdep Gub dan para Pimpinan SKPD melalui web: <a href="http://analisaberita.jakarta.go.id">analisaberita.jakarta.go.id</a>	Merekam 24 jam setiap hari sebanyak 16 stasiun televisi.	Media online adalah suatu fenomena. Arus pertukaran informasi banyak terjadi disini, atas dasar tersebut maka media online juga harus terarsipkan dengan baik.
	Penyaringan hanya berita seputar Program Kegiatan Pemprov DKI Jakarta dan pimpinan, hasil pengumpulan berita dishare langsung ke ruang pimpinan.	Sebanyak 35 media online yang terpantau pada sistem monitoring berita online.
	Melayani kebutuhan copy tayang bagi para SKPD/UKPD.	Analisa statistik pemberitaan media massa online, trend, sentimen sampai dengan narasumber yang berpengaruh.

Terkait dengan penataan, pengembangan dan pengelolaan PORTAL Berita Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan melalui kegiatan pengelolaan website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan alamat website [www.beritajakarta.go.id](http://www.beritajakarta.go.id) dan melibatkan tenaga ahli yang berjumlah 49 orang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.21**  
**Tenaga Ahli Portal Berita Pemprov DKI Jakarta**

Jabatan	Jumlah
Redaktur Pelaksana	1
Redaktur Berita Bhs. Indonesia	5
Redaktur Audio Video	1
Redaktur Bahasa Inggris	1
Editor Audio Video	2
Editor Bahasa Inggris	2
Editor Foto	1
Reporter	12
Kameramen	6
Fotografer	2
Data Entry Redaksi	4
Computer Operator/Typist	1
Operator Social Media	4
Master Programmer (Web Master)	2
Web Design	1
Security System	1
Master Programmer (Web Programmer)	1
Master Programmer for Development Android & iOS	2
<b>Total</b>	<b>49</b>

**Tabel 2.22**  
**Jumlah Produksi Portal Berita Pemprov DKI Jakarta Tahun 2017**

Produksi Berita	Berita Bahasa Indonesia	Berita Bahasa Inggris	Berita Foto	Berita Video
<b>Jumlah</b>	13.407	5.506	15.641	2.379

Selain melalui portal berita Pemprov DKI Jakarta, pelayanan dan penyediaan informasi publik juga dilakukan dan dapat diakses melalui Portal Data Terbuka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan alamat website <http://data.iakarta.go.id> (Jakarta Open Data). Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi pertama yang memiliki portal data melalui *Jakarta Open Data* dimana hingga saat ini telah menampung 1.112 set data lebih yang mencakup 46 SKPD dari 114 SKPD yang terdaftar di *Open Data*, 25 topik data dengan desain menu infografis data visual serta menampilkan data dengan tampilan yang menarik untuk mempermudah pembacaan data sehingga pemerintah daerah dan masyarakat dapat lebih fokus terhadap poin-poin yang ditampilkan dalam infografis.



**Tabel 2.23**  
**Jumlah Pengunjung Portal Jakarta 2017**

Bulan	Jumlah Pengunjung
Januari	5,544,601
Februari	5,300,492
Maret	5,769,763
April	5,027,105
Mei	10,929,002
Juni	5,904,100
Juli	6,288,058
Agustus	6,449,487
September	4,764,387
Oktober	4,263,861
November	4,312,183
Desember	3,766,098
<b>Total</b>	<b>68,319,137</b>

Selain melalui Jakarta Open Data, pelayanan dan penyediaan informasi publik juga dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pengelolaan dan Pengembangan Portal PPID Provinsi DKI Jakarta dengan alamat website <http://ppid.jakarta.go.id>. Sepanjang tahun 2017, PPID Provinsi DKI Jakarta memberikan pelayanan informasi kepada 159 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 150 pemohon informasi individu (perseorangan) dan 9 pemohon informasi berbentuk lembaga/badan hukum. Pemohon menyampaikan permohonan informasi publiknya dengan cara mendatangi langsung *desk* pelayanan informasi sebanyak 23 pemohon dan melalui portal/website PPID <http://ppid.jakarta.go.id> sebanyak 136 pemohon, dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Pada 21 Desember 2017, dalam penilaian kinerja atas hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik untuk kategori Badan Publik pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta naik 2 peringkat dari posisi sebelumnya dengan mendapatkan posisi pada peringkat 4 terbaik dengan total nilai 85,7 dengan hasil kualifikasi “menuju informatif”.



**Tabel 2.24**  
**Laporan Layanan Informasi Publik PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK																		
PPID PROVINSI DKI JAKARTA																		
TAHUN 2017																		
BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN			JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENKETA INFORMASI	
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Datang Langsung	Website	Cetak (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	DIBERIKAN			DITOLAK			
												Sebagian	Seluruhnya	Total Diberikan	Dikecualikan	Tidak dikuasai		Total Ditolak
1. JANUARI	8	1	0	2	7	0	0	0	0	9	0	9	9	0	0	0	0	
2. FEBRUARI	11	0	0	1	10	0	0	3	0	8	0	9	9	0	2	2	0	
3. MARET	14	2	0	1	15	0	0	0	0	16	0	16	16	0	0	0	1	
4. APRIL	13	1	0	1	13	0	2	0	0	12	0	13	13	0	1	1	0	
5. MEI	13	0	0	1	12	0	3	0	0	10	0	11	11	0	2	2	0	
6. JUNI	12	1	0	2	11	0	3	0	0	10	0	13	13	0	0	0	1	
7. JULI	9	0	0	0	9	0	5	0	0	4	0	8	8	0	1	1	0	
8. AGUSTUS	14	1	0	1	14	0	4	0	0	11	0	15	15	0	0	0	0	
9. SEPTEMBER	8	0	0	1	7	0	5	0	0	3	0	8	8	0	0	0	0	
10. OKTOBER	10	1	0	2	9	0	1	0	0	10	0	11	11	0	0	0	0	
11. NOVEMBER	21	1	0	6	16	0	2	0	0	20	0	20	20	0	2	2	0	
12. DESEMBER	17	1	0	5	13	0	2	0	0	16	0	17	17	0	1	1	0	
JUMLAH	150	9	0	23	136	0	27	3	0	129	0	150	150	0	9	9	2	

Selain informasi online, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kegiatan dokumentasi dan publikasi kehumasan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dilingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sepanjang tahun 2017, dokumentasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta serta sejumlah kegiatan lainnya diantaranya kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta, PKK Provinsi DKI Jakarta, dan kegiatan unggulan SKPD Provinsi DKI Jakarta, dengan total kegiatan yang didokumentasikan dalam bentuk foto dan video sebanyak 2243 kegiatan sebagai berikut.

**Tabel 2.25****Rekapitulasi Dokumentasi Kegiatan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2017**

Bulan	Jumlah
Januari	116
Februari	148
Maret	168
April	109
Mei	190
Juni	135
Juli	195
Agustus	205
September	173
Oktober	210
November	305
Desember	289
<b>Total</b>	<b>2243</b>

**Tabel 2.26****Rekapitulasi Percetakan Majalah Media Jaya 6 edisi**

No	Tema	Eksemplar
1	Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta	5.800
2	Transportasi di Jakarta	5.800
3	Ekonomi Kreatif di Jakarta	5.800
4	Penataan Rusun di Jakarta	5.800
5	Asian Games	5.800
6	Terima Kasih Ahok - Djarot	5.800
	<b>Total</b>	<b>34.800</b>

**Tabel 2.27****Rekapitulasi Percetakan 8 Tema Poster & Leaflet**

No	Tema	Eksemplar
1	Prosedur Pengurusan IPTM	1.450
2	Mengenal PPID DKI Jakarta	1.450
3	8 Ikon Budaya Betawi	1.450
4	Pengelolaan Limbah B3	1.450
5	DKI Jakarta Bebas Rabies	1.450
6	Cegah Kematian Akibat Kehamilan	1.450
7	Asian Games 2018	1.450
8	Kinerja Pemprov DKI Jakarta 2013 - 2017	1.450
	<b>Total</b>	<b>11.600</b>



**Tabel 2.28**  
**Distribusi barang cetakan Majalah Media Jaya, Poster, Leflet dan CD**  
**Kewilayah DKI Jakarta**

No	Lokasi Distribusi	Kategori	Jumlah Eksemplar
1	SKPD/UKPD DKI Jakarta	Majalah	225 Eks / Edisi
2	Kecamatan & Kelurahan	Majalah	1.555 Eks / Edisi
3	Kotamadya & Kabupaten	Majalah	30 Eks / Edisi
4	RPTRA	Majalah	945 Eks / Edisi
5	Rusun	Majalah	772 Eks / Edisi
6	Perpustakaan	Majalah	96 Eks / Edisi
7	RSUD & Puskesmas	Majalah	1.041 Eks / Edisi
8	BUMD	Majalah	72 Eks / Edisi
9	Universitas	Majalah	98 Eks / Edisi
10	Perwakilan Daerah	Majalah	66 Eks / Edisi
11	Kedutaan	Majalah	74 Eks / Edisi
12	Kementerian	Majalah	68 Eks / Edisi
13	Surat Kabar & Radio	Majalah	100 Eks / Edisi
14	Biro Humas Daerah	Majalah	70 Eks / Edisi
15	Komunitas	Majalah	88 Eks / Edisi
16	Kecamatan & Kelurahan	Poster	311 Eks / Tema
17	RSUD & Puskesmas	Poster	347 Eks / Tema
18	Sekolah	Poster	500 Eks / Tema
19	Terminal	Poster	19 Eks / Tema
20	RPTRA	Poster	189 Eks / Tema
21	Halte Transjakarta	Poster	34 Eks / Tema
22	Kecamatan	Leaflet	528 Eks / Tema
23	Puskesmas Kecamatan	Leaflet	472 Eks / Tema
24	Kecamatan & Kelurahan	CD Motion Grafis	311 Keping
25	Puskesmas Kecamatan	CD Motion Grafis	44 Keping

Selanjutnya, terkait dengan persandian dan sistem keamanan data, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 2017 telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengamankan data melalui: kegiatan penataan, pengembangan dan pengelolaan *security network system*; pengadaan *load balancing application accelerator*, *web application firewall*; pengadaan lisensi anti virus dan pengadaan *SSL Certificated dan Watchguard*. Kemudian, dalam rangka meningkatkan keamanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, pemasangan CCTV telah dilakukan di beberapa titik sebagai berikut.



**Tabel 2.29**  
**Data Kontribusi CCTV dari Penyedia Menara Microcell (s/d Oktober 2017)**

NO	NAMA PENYELENGGARA	IZIN MICROCELL (3 JULI 2017)	CCTV TERINTEGRASI (18 AGUSTUS 2017)	CCTV TERINTEGRASI (5 OKTOBER 2017)
1	PT. Bali Towerindo Sentra	3,208	3,289	3,346
2	PT. BIT Teknologi Nusantara	515	520	515
3	PT. Dayamitra Telekomunikasi	861	682	684
4	PT. Iforte Solusi Infotek	810	706	706
5	PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera	744	744	744
6	PT. Delta Art Star	200	184	184
	<b>TOTAL</b>	<b>6,338</b>	<b>6,125</b>	<b>6,179</b>

**Tabel 2.30**  
**CCTV Milik SKPD yang terintegrasi Dengan Jakarta Smart City**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH CCTV
1	Dinas Perhubungan	120
2	Dinas PU	5
3	PD.Pasar Jaya	8
4	Dinas Sumberdaya Air	50
5	Transjakarta	205
6	Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	16
7	Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung	7
8	Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng	16
9	KPU	4
	<b>TOTAL</b>	<b>431</b>

Perihal penting berikutnya terkait dengan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta adalah kegiatan pengelolaan opini publik. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membentuk opini publik dalam mengimplementasikan program, kegiatan dan kebijakan guna memperluas pemahaman dan dukungan publik sehingga konsep kota cerdas dalam pengelolaan aspirasi publik menjadi unsur penting bagi pemerintahan yang efektif dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada publik serta

memiliki peran asistensi terhadap manajemen pemerintahan dengan menyediakan alternatif penyelesaian permasalahan, menjadi fasilitator dengan masyarakat penerima layanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi. Selama tahun 2017, jumlah aspirasi yang disampaikan melalu kanal resmi Pemprov DKI Jakarta sebanyak 6.078 laporan dan melalui Qlue sebanyak 235.447 laporan serta Laporan! SP4N sebanyak 4.034 laporan dengan total 245.559 laporan. Hasil rata-rata dari Pengelolaan respon opini publik dengan  $(905+859+215.810 = 217.574)$  Total Laporan 245.559 presentase 89%. Saluran pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta, dengan presentase tindak lanjut 15% (905 laporan) dan tindak lanjut laporan! Sp4n 21% (859 laporan) sebagaimana tampak pada tabel berikut.

**Tabel 2.31**  
**Jumlah Aspirasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017**

Bulan	Media News Online	Twitter	Face book	SMS Center	Email	Kliping Media	Balai Warga	Pengaduan-Tk. Kecamatan	Total	Laporan! SP4N	Tindak Lanjut ROP
JAN	23	160	58	37	117	248	11	-	654	162	144
FEB	42	137	42	31	93	232	13	-	590	290	112
MAR	11	150	45	38	86	275	10	-	615	371	123
APR	5	64	32	44	35	123	12	-	315	368	47
MEI	3	67	47	29	51	227	8	-	432	395	51
JUNI	1	53	18	10	41	145	3	-	271	277	46
JULI	7	62	68	32	76	134	5	-	384	299	42
AGS	3	85	43	37	133	249	7	-	557	360	33
SEP	0	44	7	23	28	94	5	-	201	356	12
OKT	3	28	17	15	19	90	4	-	176	439	24
NOP	0	110	74	54	133	0	11	409	791	431	126
DES	0	69	28	16	49	0	3	927	1092	286	145
<b>Total</b>	<b>98</b>	<b>1029</b>	<b>479</b>	<b>366</b>	<b>861</b>	<b>1817</b>	<b>92</b>	<b>1336</b>	<b>6078</b>	<b>4034</b>	<b>905</b>
Tindak Lanjut										859	905
Proses										558	0
Belum										2617	5173
TL %										21%	14.8%

**Tabel 2.32**  
**Pengaduan Masyarakat Melalui Kanal Qlue Per Wilayah Tahun 2017**

Bulan	Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Utara	Total
Jan	8130	2865	4083	4411	3331	22820
Feb	11100	3792	5603	5091	3581	29167
Mar	11198	4137	6191	5618	4086	31230
Apr	9123	3233	5206	5203	2817	25582
May	6021	2220	4869	3613	1150	17873
Jun	6496	2209	4287	2103	1171	16266
Jul	6940	2212	3040	2669	1899	16760
Aug	7758	3039	3031	2592	2040	18460
Sep	7717	2855	2936	2840	1748	18096
Oct	5600	2617	3742	2430	1640	16029
Nov	3547	2227	2968	2396	1267	12405
Des	3133	1671	2565	2311	1079	10759
<b>Total</b>	<b>86763</b>	<b>33077</b>	<b>48521</b>	<b>41277</b>	<b>25809</b>	<b>235447</b>

Adapun Jumlah Pengaduan Masyarakat Melalui Kanal Qlue Per Bulan Berdasarkan Status Laporan (Presentase TL Adalah Hasil Jumlah Dari Proses Sampai Selesai Dibagi Total Laporan), dengan presentase tindak lanjut 91.66% (215.810 laporan) sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.33**  
**Pengaduan Masyarakat Melalui Kanal Qlue Berdasarkan Status Laporan Tahun 2017**

Bulan	Wait	Process	Disposisi	Coordination	Complete	Total	% TL
Jan	1305	5239	0	0	16276	22820	94%
Feb	4219	1652	0	534	22762	29167	86%
Mar	4343	3022	0	644	23221	31230	86%
Apr	2044	5547	0	559	17432	25582	92%
May	1494	3623	0	306	12450	17873	92%
Jun	1957	3719	0	327	10263	16266	88%
Jul	1953	4459	0	323	10025	16760	88%
Aug	815	4427	0	1671	11547	18460	96%
Sep	726	2735	325	2928	11382	18096	96%
Okt	711	1725	162	2828	10603	16029	96%
Nov	726	1720	148	2714	7097	12405	94%
Des	858	1385	66	2188	6262	10759	92%
<b>Total</b>	<b>21151</b>	<b>39253</b>	<b>701</b>	<b>15022</b>	<b>159320</b>	<b>235447</b>	<b>91.66%</b>
<b>Persentase</b>	<b>9%</b>	<b>17%</b>	<b>0%</b>	<b>6%</b>	<b>68%</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>

Tabel 2.34

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta berdasarkan RPJMD 2012-2017

NO.	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2012	TARGET KINERJA PROGRAM											
					2013		2014		2015		2016		2017			
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Jumlah titik CCTV yang beroperasi dikantor-kantor pemerintah, RSUD, sekolah dan BLK	0	42 Kecamatan, 42 Puskesmas kecamatan, 5 RSUD 6 (Balai kota dan kantor walikota)	261 Kelurahan	0	292 Puskesmas Kelurahan	90 SMU dan SMK negeri, BLK	89 SMU dan SMK negeri, BLK					
			2	Integrasi Sistem informasi perencanaan, Pengelolaan keuangan Daerah dan Pengawasan pengelolaan Pembangunan	0	0	2 Sub Sistem	3 sub sistem	2 Sub Sistem	4 sub sistem	2 Sub Sistem	9 Sub sistem	4 Sub Sistem	12 subsistem		
			3	Bertungnya aplikasi pelayanan publik PTSP Berbasis Teknologi Informasi	0		100% (provinsi dan wilayah kota)	100% (provinsi dan wilayah kota)								
2		Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik	Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direpson dari berbagai saluran media	33% Aspirasi yang terespon	44%	52%	50%	70%	55%	72%	75%	81%	89%			



		2	Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial	Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial	Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial	Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial	Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial	Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial	Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial	Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial	Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial	Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial						
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun	42	0	42	50	60	75	180	125	216	125	266	125	323		
		2	Jumlah Titik Lokasi layanan Pemda yang terkoneksi dengan Jaringan komunikasi (Fiber Optic)	6 (balaikota dan kantor walikota), 4 samsat dan 10 dinas teknis	0	42 kecamatan dan 42 puskesmas kecamatan, 5 RSUD	44 kecamatan dan 42 puskesmas kecamatan, 6 RSUD	261 Kelurahan	261 Kelurahan	292 Puskesmas Kelurahan	0	0	0	90 SMU dan SMK Negeri, BLK	0	89 SMU dan SMK Negeri, BLK	0	
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi	3	Jumlah <i>Data Center</i> yang berfungsi	0	1 unit <i>Data Center</i>	1 unit <i>Data Center</i>	1 unit <i>Data Center</i>	1 unit <i>Data Center</i>	1 unit <i>Data Center</i>	3 Kantor Walikota Pemda DKI Jakarta	3 Kantor Walikota dan 39 Lokasi Kantor Pemda DKI Jakarta	36 lokasi kantor Pemda DKI Jakarta	3 Kantor Walikota dan 39 Lokasi Kantor Pemda DKI Jakarta	5 BTS (Kep. Seribu) dan 6 BTS didaerah penyangga	5 BTS (Kep. Seribu) dan 6 BTS didaerah penyangga	5 BTS	20 BTS	
		4	Jumlah <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) yang berfungsi	0	1 unit DRC	1 unit DRC	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)	2 Kantor Walikota dan 39 Lokasi Kantor Pemda DKI Jakarta	3 Kantor Walikota dan 39 Lokasi Kantor Pemda DKI Jakarta	3 Kantor Walikota dan 39 Lokasi Kantor Pemda DKI Jakarta	3 Kantor Walikota dan 39 Lokasi Kantor Pemda DKI Jakarta	3 Kantor Walikota dan 39 Lokasi Kantor Pemda DKI Jakarta	3 Kantor Walikota dan 39 Lokasi Kantor Pemda DKI Jakarta	3 Kantor Walikota dan 39 Lokasi Kantor Pemda DKI Jakarta	3 Kantor Walikota dan 39 Lokasi Kantor Pemda DKI Jakarta	3 Kantor Walikota dan 39 Lokasi Kantor Pemda DKI Jakarta
		1	Berfungsinya telpon berbasis <i>Fiber Optic</i> Pemda DKI Jakarta	0	0	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)	2 Kantor Walikota (Pusat dan Barat)
		2	Tersedianya sarana komunikasi <i>radio Trunking</i>	0	0	5 BTS	5 BTS	5 BTS	5 BTS	5 BTS	5 BTS	5 BTS	5 BTS	5 BTS	5 BTS	5 BTS	5 BTS	5 BTS





5	Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	1	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem nasional	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terlatih	500 orang	700	750 Orang	761	700 Orang	970	700 Orang	1250 orang		

**Tabel 2.35**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja langsung	104,3	223,9	217,1	154	167,6	89,4	167,1	130,8	129,2	144,2	85,7	74,6	60,2	83,9	86,0	<b>12,6</b>	12,7
Belanja tidak langsung	<b>35,7</b>	<b>42</b>	<b>77,1</b>	<b>99</b>	<b>95,2</b>	<b>33,8</b>	<b>34,5</b>	<b>78,6</b>	<b>89,3</b>	<b>84,7</b>	<b>94,7</b>	<b>82,1</b>	<b>101,9</b>	<b>90,2</b>	<b>89,1</b>	27,8	25,8



## **II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, murah, mudah dan baik serta melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tatalaksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat.

Patut menjadi perhatian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum di provinsi. Provinsi DKI Jakarta memiliki kedudukan yang strategis sebagai ibukota sekaligus barometer perekonomian nasional dan internasional sebagai kota bisnis dan jasa. Untuk dapat mempertahankan keunggulan tersebut, Jakarta harus memiliki daya saing yang handal sehingga diperlukan strategi yang tepat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan kota yang efektif, optimalisasi pasar yang akan memperkuat daya beli masyarakat serta peningkatan daya tarik kota. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilandasi dengan visi yang jauh ke depan, terukur, dan memerhatikan konstelasi persaingan kota lingkup global sehingga kota Jakarta dapat berperan dalam kerangka regionalisasi ekonomi.

Untuk menjadi kota internasional yang kompetitif, Jakarta perlu membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang maju, modern dan handal. Penggunaan TIK merupakan tulang punggung pembangunan Jakarta menuju kota pintar yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, meminimalisasi dampak sosial dan lingkungan serta penggunaan energi yang bijaksana dan ramah lingkungan. Pendayagunaan TIK akan sangat mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan



ekonomi kota, terutama pada sektor transportasi, logistik, dan sektor lainnya termasuk pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, perlu dilakukan penataan kembali secara sistematis prasarana dan sarana, kelembagaan, sumber daya manusia, dan aturan hukum/tata laksana TIK yang memadai sehingga akan terwujud sinergi komponen-komponen TIK yang serasi dan mampu meningkatkan daya saing Kota Jakarta, baik di tingkat regional ASEAN maupun tingkat global.

Bercermin kepada ketersediaan sumber daya dan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global, dapat dirumuskan tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik lima tahun ke depan sebagai berikut:

### **1. Tantangan**

- Membangun pemerintahan yang bersih, modern dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi (*Smart City*);
- Masih kurangnya SDM Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang memiliki sertifikat internasional ataupun nasional dalam bidang TIK;
- Kapasitas SDM teknis pemerintahan TIK dan statistik yang lemah;
- Masih kurangnya aparatur usia produktif di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang memiliki latar belakang IT, komunikasi, persandian, statistik dan data *scientist*;
- Perlunya penyesuaian SDM di bidang TIK dan disesuaikan dengan tupoksi serta capaian RPJMD dan RPJPD;
- Skema Belanja TIK Pemerintah sangat otonom, orientasi dominan pada belanja dan regulasi tidak membatasi secara tegas;
- Fokus Belanja lebih banyak pada infrastruktur;
- Aplikasi dan database belum secara menyeluruh saling terhubung;
- *Eleadership* yang kurang kuat;
- Fokus pengembangan *eGovernment* belum menyentuh ke permasalahan rakyat karena adanya kecenderungan pemerintah lebih banyak berfokus pada birokrasi;
- Resistensi karena tidak tercapai kesepakatan dan kurangnya sosialisasi;



- Harmonisasi kebijakan dan pengadaan infrastruktur yang membutuhkan proses cukup panjang;
- Terbatasnya SDM yang menguasai *eGovernment* serta kurangnya pengembangan kapasitas dan kapabilitas institusi;
- Setiap instansi membangun sistem *eGovernment* sendiri sehingga terjadi pulau-pulau sistem elektronik dan terjadi pemborosan belanja infrastruktur;
- Adanya kebijakan dan program baru, seperti tanda tangan elektronik, sehingga perlu analisa kebutuhan tanda tangan elektronik;
- Maraknya serangan *cyber* terhadap keamanan informasi;
- Kapasitas data center belum dimanfaatkan secara optimal;
- Meningkatnya kebutuhan *management bandwidth* terkait peningkatan kebutuhan akses sistem dan aplikasi untuk mempercepat pelayanan publik;
- Jaringan interkoneksi dari Balai kota menuju SKPD saat ini hanya ada satu *link*, sehingga dibutuhkan *backup link*;
- Masih adanya SKPD/UKPD yang *hosting* dan menggunakan jaringan di luar Pemprov DKI Jakarta;
- Kebutuhan perencanaan lima tahun ke depan akan tersentralisasi kepada keamanan informasi;
- Kebijakan pemerintah pusat mengenai *eGovernment* yang mendorong pelayanan publik berbasis IT;
- Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat tidak diiringi dengan perubahan kebijakan atau aturan terkait pengelolaan keuangan daerah;
- Dalam sinkronisasi kebijakan perlu koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan masih persektor dan belum terintegrasi;
- Proses perencanaan penganggaran melalui sistem *eBudgeting* masih cukup panjang sehingga membutuhkan kesiapan yang cukup matang. Hal tersebut tidak sebanding dengan *timeline* penganggaran;
- *Trend* pelayanan urusan pemerintahan yang bergeser ke arah layanan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi;



- Masih belum maksimalnya koordinasi antarSKPD terkait pengadaan barang jasa terkait IT;
- Perkembangan pesat media komunikasi, termasuk media berbasis internet dan sosial media;
- Banyaknya informasi tentang kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum tersampaikan kepada masyarakat luas;
- Tingginya frekuensi informasi yang berkembang melalui media massa termasuk sosial media yang memengaruhi opini masyarakat;
- Pengaruh *hoax* di masyarakat yang signifikan memengaruhi masyarakat;
- Tingginya kebutuhan tempat penyimpanan data yang kompeten di DKI Jakarta;
- Kebutuhan standar untuk server yang dapat di terima oleh DC Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta standar bahasa programming;
- Besarnya potensi tindakan kejahatan yang menggunakan teknologi informasi yang mengganggu fasilitas dan infrastruktur publik;
- Berkembangnya isu ramah lingkungan dan *paperless office* yang menuntut pemanfaatan sumber daya alam terutama kertas dan hasil hutan lainnya secara lebih efisien dan hemat;
- Belum tertatanya jaringan telekomunikasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- Tingginya kebutuhan publikasi tidak diimbangi dengan kebijakan penganggaran terkait publikasi;
- Belum berkembangnya jejaring statistik di internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Minimnya *standard operating procedure* terkait teknologi informasi dan keamanan sistem informasi.

## 2. Peluang

- Banyaknya lembaga penyedia beasiswa pendidikan bagi aparatur pemerintahan untuk penguatan potensi dan kompetensi aparatur pemerintahan;
- Pemanfaatan media massa, baik surat kabar cetak maupun elektronik dan online, untuk menyampaikan hasil kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- Penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung kinerja pengawasan terhadap informasi yang tidak sesuai;
- Semakin mudahnya pengaplikasian teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat;
- Semakin majunya teknologi keamanan sistem informasi dan semakin meningkatnya kemampuan berbagai instansi pemerintahan dalam penanganan tindak kejahatan *cyber (cyber crime)*;
- Optimalisasi pemanfaatan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berpotensi menguras sumber daya alam;
- Semakin beragam dan semakin praktisnya piranti keras yang ada di pasaran dalam mendukung peningkatan kinerja;
- Berkembangnya perusahaan di bidang telekomunikasi di Provinsi DKI Jakarta;
- Perlunya standarisasi terkait pembangunan aplikasi;
- Penguataan kelembagaan, NSPK, *bussiness process re-engineering* penguatan kapasitas SDM, infrastruktur berbagi pakai;
- Kebutuhan aplikasi berbagi pakai dari pemerintah pusat;
- Semakin banyaknya pihak penyedia yang mulai memahami prosedur keuangan pemerintah daerah;
- Kebijakan pemerintah pusat untuk pemusatan data center;
- Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya SKPD, tentang Perencanaan mengenai penganggaran barang dan jasa terkait IT yang harus melalui proses rekomendasi;
- Pengaturan jaringan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta;
- Optimalisasi *Big Data* sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan;
- Pengembangan kota *Smart City* menjadi tren pembangunan;
- Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan;
- Dukungan dari pimpinan untuk mewujudkan *smart city*.

Setiap tantangan dan peluang di atas, harus dapat diatasi dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan Visi RPJMD DKI Jakarta.





### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Provinsi DKI Jakarta, dalam hal tingkat kelayakhunian kota, berdasarkan hasil survei *Indonesia Most Livable City Index* (MLCI) tahun 2017, mendapatkan nilai indeks sebesar 62,6 atau berada di urutan ke-15 dari 26 kota di 19 Provinsi. Jika ditilik dari indeks kebahagiaan, DKI Jakarta mendapat skor 71,33 atau berada pada peringkat 19 dari 34 provinsi. Dua capaian tersebut menyiratkan bahwa “kinerja besar” pelayanan birokrasi Provinsi DKI Jakarta masih perlu dipacu lebih kencang untuk menghadirkan dampak nyata yang makin positif bagi setiap warganya. Lebih lanjut, pelayanan publik yang lebih baik, cepat, terbuka, terjangkau, dan mudah serta mampu menyelesaikan permasalahan warga merupakan tuntutan masyarakat sekaligus sebagai isu strategis dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Tuntutan pelayanan berstandar tinggi tersebut selaras dengan dan dalam upaya memenuhi target Visi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025: **“Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Global”**. Kata kunci permasalahan terpenting adalah pada “daya saing global” yang jika ditarik dalam layanan birokrasi perangkat daerah maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta memiliki peran sentral dalam meningkatkan kelas pelayanan birokrasi pada standar global melalui pemanfaatan *Information Technology* (IT).

Dengan kedudukan DKI Jakarta sebagai ibukota Negara yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan dengan standarisasi tinggi menjadi tuntutan masyarakat luas. Dengan kedudukan yang demikian, DKI Jakarta menjadi barometer bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya dalam mengelola birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam melayani masyarakat. Untuk itulah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu penopang utama berhasil tidaknya upaya layanan publik dalam kerangka keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan (*open government*) yang lebih transparan dan akuntabel. Pada tataran ini, pengelolaan teknologi informasi dan statistik





merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, terutama layanan berbasis IT, dan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat.

Berbagai permasalahan hadir dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik berbasis IT dan terbatasnya akses masyarakat dan aparatur pada keterbukaan informasi publik untuk segera dicarikan solusi inovatif terbaik sehingga terwujud pemerintahan yang *accountable, participatory* dan *transparent*. Dalam hal ini, agar renstra dapat digunakan sebagai instrumen penting dalam mendefinisikan bagaimana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta akan bertransformasi menjadi “pelayan komunikasi, informasi, statistik dan persandian” berkelas global maka analisis permasalahan dan isu strategis menjadi tahapan penting yang harus dipahami dengan baik untuk kemudian dijadikan dasar dalam menguraikan berbagai kebijakan strategik lima tahun mendatang.

### **III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Pasal 1 Permendagri No. 86 Tahun 2017 mendefinisikan permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan suatu keharusan guna mengurai dan memahami berbagai persoalan yang terjadi untuk dicarikan solusi inovatif terbaik.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sebagaimana diketahui bersama, dapat menjadi faktor akselerasi pembangunan, karenanya peluang untuk mempercepat pembangunan berbasis teknologi informasi dan komunikasi haruslah dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan semakin pesatnya perkembangan di dunia teknologi informasi dan semakin mudahnya publik mengakses informasi kapanpun dan dimanapun, kelengkapan infrastruktur perangkat lunak dan perangkat keras haruslah



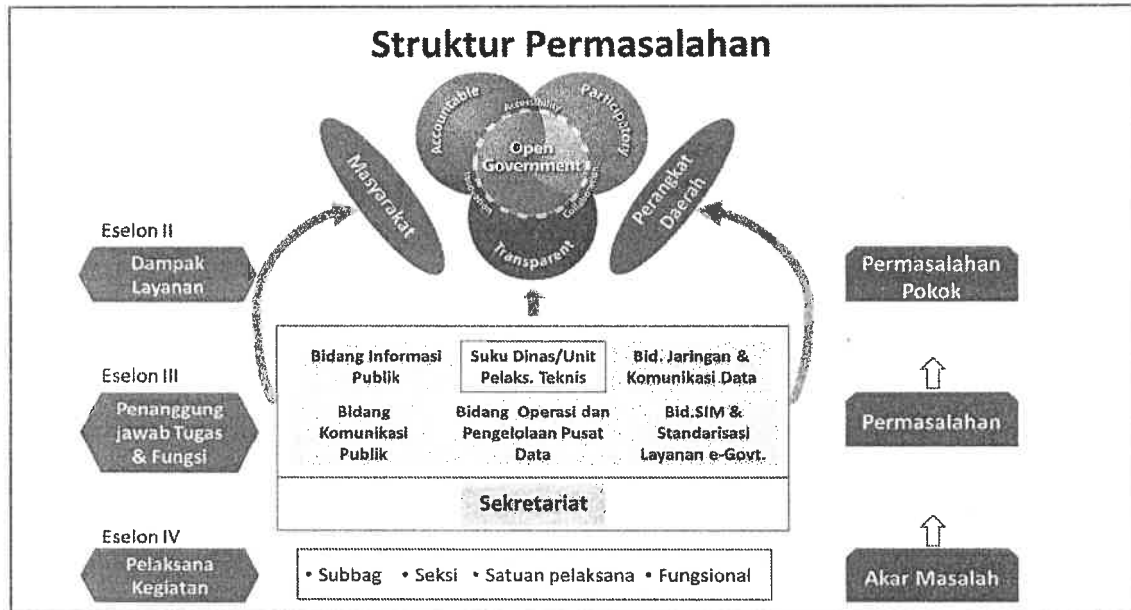
dapat mengimbangi kebutuhan yang ada. Ketimpangan antara perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dan kesiapan infrastruktur wilayah dapat menyebabkan ekses negatif terhadap pembangunan yang berlangsung dan penanganan ekspektasi masyarakat yang cenderung telah siap dalam memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana otonomi daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian memegang peranan penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Terlepas dari berbagai keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta pada periode-periode sebelumnya yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap layanan perangkat pemerintahan daerah lainnya, masih terdapat banyak permasalahan yang harus dipecahkan demi terlaksananya semua tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta untuk lima tahun kedepan.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dapat dianalisis dan dipetakan melalui kerangka logis analisis permasalahan secara berjenjang dari aspek dampak layanan, penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga, dan dukungan kelembagaan (sarana-prasarana, teknologi-informasi, SDM-internal, dan sistem operasional) untuk mendapatkan fungsi-fungsi manajemen yang paling kritis dalam mendongkrak kinerja organisasi secara keseluruhan. Kerangka logis analisis permasalahan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.1, memperlihatkan bahwa untuk memudahkan pengembangan kebijakan strategis dan kebutuhan identifikasi kinerja sesuai struktur organisasi, analisis permasalahan harus diurai secara berjenjang sebagai tanggung jawab pejabat eselon II, III, IV dan seterusnya di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan pokok hadir dan menjadi tanggung jawab eselon I sebagai dampak layanan dari permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh sekretariat, bidang-bidang, dan sekretaris (eselon III). Permasalahan harus diurai lagi untuk memahami akar masalah yang selanjutnya akan menjadi tanggung jawab eselon IV.



Gambar 3.1  
Kerangka Logis: Analisis Permasalahan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



Berdasarkan analisis capaian kinerja dan isu strategis yang ada di setiap elemen Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, permasalahan pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari dua sisi: (1) masyarakat, sebagai bagian dari pemerintahan, yakni “terbatasnya informasi publik yang dapat diperoleh masyarakat” sehingga menjadi penghambat layanan aparatur pemerintahan kepada masyarakat; dan (2) lembaga perangkat daerah, sebagai pelaksana pemerintahan, yakni “sebagian OPD belum memanfaatkan TIK secara optimal dan terintegrasi untuk menunjang kinerja layanannya” sehingga berdampak pada kinerja layanan aparatur pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta yang tidak optimal dan terintegrasi. Ketidakefektifan pemanfaatan TIK tersebut disebabkan antara lain karena kapasitas SDM teknis pemerintahan TIK yang lemah sehingga pemahaman terhadap TIK itu sendiri masih kurang yang pada akhirnya menghambat proses integrasi TIK di semua lini pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, masih adanya SKPD/UKPD yang *hosting* dan menggunakan jaringan di luar Pemprov DKI Jakarta juga menjadi isu strategis berikutnya yang menyebabkan permasalahan belum terintegrasinya sistem jaringan antar SKPD/UKPD di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, dapat ditarik

kesimpulan bahwa terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta:

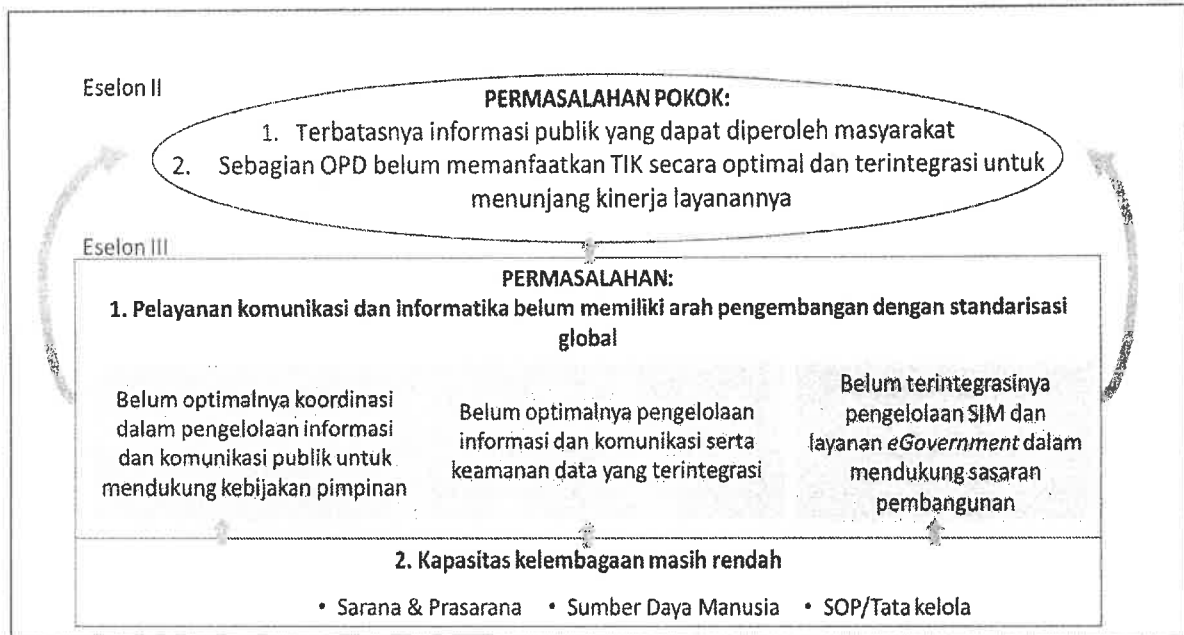
- 1. Terbatasnya informasi publik yang dapat diperoleh masyarakat;**
- 2. Sebagian OPD belum memanfaatkan TIK secara optimal dan terintegrasi untuk menunjang kinerja layanannya.**

Kedua permasalahan pokok tersebut kemudian secara rinci dapat dipetakan kedalam permasalahan dan akar masalah sebagaimana terlihat pada gambar dan tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas**  
**Dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Terbatasnya informasi publik yang dapat diperoleh masyarakat 2. Sebagian OPD belum memanfaatkan TIK secara optimal dan terintegrasi untuk menunjang kinerja layanannya	Pelayanan komunikasi dan informatika belum memiliki arah pengembangan dengan standarisasi global	Belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan pimpinan
		Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi serta keamanan data yang terintegrasi
		Belum terintegrasinya pengelolaan SIM dan layanan eGovernment dalam mendukung sasaran pembangunan
	Kapabilitas kelembagaan masih rendah	Ketersediaan sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas Sumber daya manusia
		SOP/tata kelola belum sepenuhnya dilaksanakan

**Gambar 3.2**  
**Pemetaan Analisis Permasalahan**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta**



Gambar di atas memperlihatkan bahwa permasalahan sebagai turunan dari permasalahan pokok yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut.

**1. Pelayanan komunikasi dan informatika belum memiliki arah pengembangan dengan standarisasi global**

Teknologi informasi dan komunikasi dengan standarisasi global dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan arus informasi dapat mengalir dengan sangat cepat sekaligus dapat menghubungkan wilayah-wilayah yang terpisah secara geografis (memiliki pemisah geografis). Karenanya ketersediaan sebuah laman web sangatlah dibutuhkan untuk dimiliki oleh instansi pemerintahan dalam upayanya menyampaikan informasi-informasi terkait pelayanan instansi tersebut. Namun yang terjadi saat ini, belum seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki laman web atau telah memiliki hanya saja belum optimal pemanfaatannya. Hal ini menjadi faktor yang melemahkan pelayanan informasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat.

Selain itu, dalam memberikan pelayanan komunikasi dan informasi dibutuhkan koordinasi yang baik antar-OPD sehingga dapat tercipta pelayanan dengan standar global.



Kondisi yang ada saat ini adalah belum adanya koordinasi yang optimal dalam pengelolaan informasi dan komunikasi dalam mendukung kebijakan pimpinan. Hal ini terlihat antara lain dari respon OPD terhadap aspirasi di media massa yang masih kurang. Petugas data dan informasi OPD kurang memiliki inisiatif dalam memutakhirkan data sebagai bahan publikasi sehingga OPD kurang terbuka dalam menyampaikan materi pemberitaan. Kurang tepatnya strategi penyebaran informasi juga menjadi penghambat terciptanya pelayanan komunikasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, dalam menciptakan koordinasi yang baik, forum kerjasama lintas pemangku kepentingan terkait penyebaran informasi masih belum terjalin optimal, penyebaran informasi masih dilakukan *by request* dan konvensional.

Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan peran-peran pemerintahan haruslah ditangani dengan lebih serius di masa depan, hal ini dilakukan untuk dapat mewujudkan pelayanan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi elektronik (*eGovernment*) yang dapat memberikan efisiensi, ketersebaran yang lebih merata, dan transparansi pelayanan. Penerapan *eGovernment* dikembangkan tidak hanya untuk mengikuti *trend* yang terjadi di kalangan masyarakat, namun juga untuk mewujudkan pelayanan yang merata, rendah biaya, dan dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat.

Kesadaran unit organisasi dalam mengembangkan pelayanan berbasis *eGovernment* mulai meningkat namun masih ditemukan pembangunan sistem informasi dan aplikasi secara terpisah-pisah. Menurut data dari Kementerian Komunikasi Informatika bahwa sampai saat ini hanya 75 instansi yang menerapkan integrasi layanan elektronik. Hal tersebut juga terjadi di Pemda DKI Jakarta dimana aplikasi dan database yang ada di setiap OPD masih belum terintegrasi secara menyeluruh satu dengan yang lain. Sebagai contoh, sistem informasi pemerintah daerah yang belum terintegrasi dengan sistem informasi asset, sistem pengadaan barang, sistem pengelolaan keuangan daerah serta sistem informasi pelaporan. Pengamanan jaringan dan data juga menjadi salah satu permasalahan dalam penerapan TIK. Berdasar data terakhir 90% instansi dari total 723 instansi menjadi korban serangan *cyber*. Hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai permasalahan remeh ketika roda birokrasi banyak didukung oleh perangkat digital.



Pemanfaatan data center juga dirasakan masih belum optimal oleh unit terkait yang mana posisi sekarang pada TIER 2 dengan pemanfaatan kapasitas yang baru mencapai 20% (dua puluh persen), yang berarti OPD yang memanfaatkan data center baru sebesar 20% (dua puluh persen) dari total OPD DKI Jakarta. Belum optimalnya pengelolaan SIM dan layanan *e-Government* terlihat dari pembangunan aplikasi OPD/UKPD tidak melalui rekomendasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, integrasi data dan sistem informasi belum dilaksanakan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Hal lain yang menjadi isu strategis terkait urusan komunikasi adalah perkembangan media komunikasi melalui media massa termasuk sosial media yang memengaruhi opini masyarakat. Tingginya komunikasi melalui sosial media membuat informasi mudah tersebar dan masyarakat dengan mudah mempercayai berita yang tersebar melalui jaringan komunikasi berbasis internet sehingga jika hal ini tidak diantisipasi oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengganggu keamanan nasional dan global.

Dengan menilik kembali pada permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas, aspek pemerataan pelayanan informasi adalah salah satu isu utama yang menjadi perhatian di masa depan. Di lain sisi, melihat bentang geografis dan tingkat pertumbuhan di Provinsi DKI Jakarta, wilayah Kepulauan Seribu cenderung memiliki hambatan yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah DKI Jakarta yang berada di daratan utama. Untuk itu, harus ada sebuah tindakan strategis yang khusus diberikan dalam rangka memenuhi pelayanan yang adil kepada masyarakat yang tinggal di wilayah Kepulauan Seribu.

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akar masalah dari **“Pelayanan komunikasi dan informatika belum memiliki arah pengembangan dengan standarisasi global”** adalah sebagai berikut:

- a. **Belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan pimpinan:**
  - ✓ Respon perangkat daerah terhadap aspirasi di media massa masih kurang;
  - ✓ Belum optimalnya koordinasi/keterlibatan OPD dalam analisis pemberitaan serta penanganan dan tindak lanjut aduan masyarakat;



- ✓ Petugas data dan informasi OPD kurang memiliki inisiatif dalam memutakhirkan data sebagai bahan publikasi;
- ✓ OPD kurang terbuka dalam menyampaikan materi pemberitaan;
- ✓ Strategi komunikasi penyebaran informasi belum efektif menyampaikan kebijakan publik dan prioritas pembangunan daerah;
- ✓ Forum kerjasama lintas pemangku kepentingan terkait penyebaran informasi masih belum terjalin optimal;
- ✓ Penyebaran informasi masih dilakukan *by request* dan konvensional;
- ✓ Masyarakat kurang memahami keterbukaan informasi publik;
- ✓ Perda dan Pergub statistik sektoral belum ada;
- ✓ *Monitoring* berita/media *online* belum sepenuhnya efektif mendukung kebijakan daerah;

**b. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi serta keamanan data yang terintegrasi:**

- ✓ Layanan data center belum distandarisasi;
- ✓ Tingginya registrasi sengketa informasi;
- ✓ Kurangnya pemahaman tentang keamanan data dan informasi;
- ✓ Kebijakan, regulasi dan SOP keamanan data dan informasi belum disosialisasikan dan diimplementasikan secara optimal;
- ✓ Tidak semua Server web/aplikasi SKPD masuk ke dalam data center dan jaringan intranet milik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- ✓ Belum ada ketentuan terkait pemanfaatan jaringan intranet dan internet;
- ✓ Alokasi anggaran jaringan intranet dan internet mengacu pada permintaan SKPD sehingga tidak dapat memenuhi *update* kebutuhan SKPD;
- ✓ SKPD belum menggunakan secara optimal jaringan intra yang disediakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- ✓ Masih adanya kode rekening TALI yang mengakomodir sewa internet;
- ✓ Masih adanya kode rekening *repeater*/HT berbasis analog;
- ✓ Kurangnya sosialisasi kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan telekomunikasi;





- ✓ Dalam melakukan proses backup data masih tergantung dengan pihak LKPP;
  - ✓ Pengaturan untuk keamanan data dan informasi belum diatur/dilakukan secara mandiri;
  - ✓ Masih adanya ego sektoral dalam pemakaian data Bersama;
- c. **Belum terintegrasinya pengelolaan SIM dan layanan *eGovernment* dalam mendukung sasaran pembangunan:**
- ✓ Pembangunan aplikasi SKPD/UKPD tidak melalui rekomendasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
  - ✓ Integrasi data dan sistem informasi belum dilaksanakan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
  - ✓ Pelayanan publik berbasis TIK belum dilaksanakan;
  - ✓ Resistensi perangkat daerah terhadap kebijakan TIK;
  - ✓ Perencanaan pembangunan sistem informasi dan infrastuktur pada perangkat daerah tidak mengacu pada Rencana Induk TIK;
  - ✓ Manajemen proyek (*Program Manajemen Officer*) untuk mengawal pembangunan dan pengembangan sistem informasi belum dilaksanakan;
  - ✓ Unit Pengelola TIK belum dimiliki semua perangkat daerah;
  - ✓ Data statistik sektoral yang tersedia belum lengkap dan terintegrasi;
  - ✓ Mekanisme pengelolaan data statistik sektoral belum tersedia;
  - ✓ Sistem Informasi Statistik masih dalam proses pengembangan.

## 2. Kapasitas kelembagaan masih rendah

Secara umum, kapasitas kelembagaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan lagi. Berbagai permasalahan kelembagaan yang penting untuk diperhatikan diantaranya adalah belum optimalnya peran dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga teknis pemerintah bidang pengelolaan komunikasi, informasi dan statistik. Kemudian, terbatasnya akses informasi yang dapat diperoleh masyarakat dan sebagian besar OPD belum memanfaatkan TIK sehingga belum tercipta integrasi yang baik dalam menciptakan kinerja layanan komunikasi dan informasi menjadi tanggung jawab pejabat eselon II.



Minimnya sarana dan prasarana serta SOP dalam melaksanakan kebijakan juga menjadi akar permasalahan berikutnya. Berbagai permasalahan yang muncul dari sisi kelengkapan sarana dan prasarana, antara lain: belum tercukupinya kapasitas ruang data center untuk mengakomodir data dari semua OPD Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak semua server web/aplikasi OPD masuk ke dalam data center dan jaringan intranet milik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena belum ada ketentuan terkait pemanfaatan jaringan intranet dan internet. Kemudian, layanan data center yang ada belum distandarisasi karena pengadaan infrastruktur *hardware* dan *software* pada perangkat daerah belum seluruhnya melalui proses rekomendasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman tentang keamanan data dan informasi, kebijakan, regulasi dan SOP keamanan data dan informasi karena belum disosialisasikan sehingga tidak dapat diimplementasikan secara optimal.

Dilihat dari sisi sumber daya aparatur, faktor sumber daya aparatur memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan, khususnya pelayanan publik berbasis IT, oleh karena itu lemahnya kapasitas kelembagaan menimbulkan penurunan kinerja bagi lembaga tersebut. Selain itu, permasalahan juga terjadi terkait kurangnya aparatur usia produktif dan aparatur dengan latar belakang pendidikan yang sesuai urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandiaan. Hal ini harus ditangani dengan bijak untuk dapat mewujudkan pelayanan prima di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan kapasitas dengan pelatihan atau program-program peningkatan kapasitas lain perlu mendapat perhatian lebih untuk dilakukan di masa depan. Masih sedikitnya SDM ASN yang memiliki sertifikat nasional/internasional terutama dalam bidang TIK merupakan salah satu faktor yang berpotensi menghambat laju kencang implementasi *eGovernment*. Implementasi digital dalam pemerintahan juga masih belum jelas arahnya ketika instansi tidak memiliki *masterplan* dalam pembangunan dan pengembangan TIK. Hal tersebut makin berat dengan masih lemahnya *eLeadership* di jajaran pengambil kebijakan pemerintah daerah serta produk hukum yang masih belum mampu mengakomodasi perubahan sosial dan lingkungan akibat pesatnya perkembangan teknologi.



Berdasarkan analisis di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akar masalah dari “Kapasitas Kelembagaan masih rendah” adalah sebagai berikut:

**a. Ketersediaan sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan:**

- ✓ Kapasitas ruang data center terbatas untuk mengakomodir perangkat server perangkat daerah;
- ✓ Pengadaan infrastruktur *hardware* dan *software* pada perangkat daerah belum seluruhnya melalui proses rekomendasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- ✓ Infrastruktur, baik *hardware* maupun *software*, untuk pengolahan data belum tersedia.
- ✓ Data-data dari perangkat daerah belum dipusatkan pada data *warehouse*;
- ✓ Harmonisasi kebijakan dan pengadaan infrastruktur yang membutuhkan proses cukup panjang;
- ✓ Tingginya kebutuhan tempat penyimpanan data yang kompeten di DKI Jakarta;
- ✓ Kebutuhan standar untuk server yang dapat di terima oleh DC Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta standar bahasa programming.

**b. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas Sumber daya manusia:**

- ✓ Masih kurangnya SDM Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang memiliki sertifikat internasional ataupun nasional dalam bidang TIK;
- ✓ Kapasitas SDM teknis pemerintahan TIK yang lemah;
- ✓ Minimnya aparatur usia produktif di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang memiliki latar belakang IT, komunikasi, persandian dan data *scientist*;
- ✓ Perlunya penyesuaian SDM di bidang TIK dan disesuaikan dengan tupoksi serta capaian RPJMD dan RPJPD;
- ✓ *Eleadership* yang kurang kuat;
- ✓ Terbatasnya SDM yang menguasai *eGovernment* serta kurangnya pengembangan kapasitas dan kapabilitas institusi.

**c. SOP/tata kelola belum sepenuhnya dilaksanakan.**

- ✓ Belum adanya *grand design* pengembangan data dan jaringan yang dapat memberi arah atau standar dalam jangka menengah/panjang;
- ✓ Kebijakan, regulasi dan SOP pembangunan dan pengembangan TIK belum disosialisasikan dan diimplementasikan secara optimal;



- ✓ Pembangunan aplikasi pada perangkat daerah tidak disertai dengan proses bisnis dan SOP yang memadai;
- ✓ Minimnya SOP terkait teknologi informasi dan keamanan sistem informasi.

### III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, rumusan Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 adalah:

**"Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global"**

Visi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. Memasuki era pembangunan lima tahun keempat RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025, Visi, Misi serta Janji kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, program yang dimandatkan oleh warga Jakarta dalam mewujudkan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022, sebagaimana yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

**Tabel 3.2**  
**Telaahan Bidang Urusan Informasi dan Komunikasi**  
**RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022**

<b>Visi RPJMD DKI Jakarta 2017-2022:</b> Jakarta Kota Maju, Lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua
<b>Misi #3 RPJMD DKI Jakarta 2017-2022:</b> Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
<b>Janji Kerja #7 Kepala Daerah DKI Jakarta 2017-2022:</b> Membangun pemerintahan yang bersih, modern dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas dan keteladanan dengan mengoptimalkan Pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi ( <i>Smart City</i> )
<b>Tujuan #2 MISI #3 RPJMD DKI Jakarta 2017-2022</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
<b>Sasaran #2 Tujuan #2 MISI #3 RPJMD DKI Jakarta 2017-2022</b> Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi
<b>Strategi Misi #3 RPJMD DKI Jakarta 2017-2022:</b> 1. Optimalisasi sistem pengaduan warga yang terintegrasi, optimalisasi layanan <i>environment</i> sosial dan dukungan TIK, optimalisasi penyediaan analisis <i>bigdata</i> untuk sektor prioritas. 2. Digitalisasi sistem tindak lanjut SKPD/UKPD atas aspirasi warga Jakarta pada media massa.



<ol style="list-style-type: none"><li>3. Peningkatan kualitas pelayanan, aparatur, database kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan.</li><li>4. Menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral, melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik, membangun dan mengintegrasikan Sistem Informasi Statistik Peningkatan data sektoral SKPD/ wilayah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Statistik.</li><li>5. Optimalisasi teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa.</li><li>6. (a) Identifikasi kebutuhan penyelenggaraan persandian; (b) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan persandian; (c) Sosialisasi <i>Security Awareness</i>; (d) Pelatihan di bidang persandian; (e) Pengelolaan sumberdaya persandian; (f) Operasional pengamanan persandian;</li><li>7. Identifikasi kebutuhan, menentukan skala prioritas, pengalokasian anggaran, registrasi perangkat komputer yang digunakan untuk operasional tata kelola pemerintahan berbasis elektronik secara bertahap, <i>redundant</i> perangkat jaringan, <i>redundant bandwidth</i> jaringan.</li><li>8. Identifikasi kebutuhan, menentukan skala prioritas, investasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pengalokasian anggaran, peningkatan <i>coverage</i>, pemeliharaan berkala.</li><li>9. Membuat kajian dan regulasi, identifikasi kebutuhan kapasitas <i>data centre</i> dari seluruh SKPD/UKPD, menghitung daya tampung eksisting dan daya tampung yang dibutuhkan, membuat desain ruang <i>data center</i> serta DED (<i>Detail Engineering Design</i>), pembangunan perluasan <i>data centre</i>, relokasi perangkat data dari SKPD/UKPD, penyediaan perangkat.</li><li>10. Membuat surat edaran, melakukan sosialisasi, melakukan monitoring pembuatan subdomain di seluruh SKPD, mengkoordinasikan dengan BKD untuk menjadikan bagian dari KPI, <i>assesment</i> TIK pada SKPD.</li><li>11. <i>Assesment</i> TIK pada SKPD, penguatan fungsi Dinas KOMUNIKASI, INFORMATIKA dan Statistik khususnya rekomendasi dan <i>controlling</i>, komitmen dari pimpinan, Penguatan SDM (jumlah dan kualitas), Pembentukan IT, Implementasi Project Tim, Implementasi RITIK.</li><li>12. Pemenuhan standarisasi LKPP, Standarisasi ISO 27001, terpenuhinya Standard Sistem Manajemen Keamanan Informasi Standardisasi LPSE dan SNI/ISO 27001</li></ol>
<b>Program RPJMD DKI Jakarta 2017-2022:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik</li><li>2. Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)</li><li>3. Program Pengembangan Data Statistik Sektoral</li><li>4. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi</li></ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD DKI Jakarta 2017-2022:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks eGovt.</li><li>2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.</li></ol>
<b>Indikator Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika RPJMD DKI Jakarta 2017-2022:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase laporan warga melalui Aplikasi Interaktif Jakarta Smart City.</li><li>2. Persentase respon SKPD terhadap aspirasi warga Jakarta melalui media cetak.</li><li>3. Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media masa dan perlu dilakukan diklarifikasi.</li><li>4. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi.</li><li>5. Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta.</li><li>6. <i>Service level agreement</i> jaringan.</li><li>7. <i>Service level agreement</i> telekomunikasi intra pemerintah daerah.</li><li>8. <i>Service level agreement</i> data center.</li><li>9. Pemenuhan standard LPSE dan SNI/IEC 27001.</li><li>10. Jumlah Cakupan layanan eGovt.</li></ol>



Pelaksanaan misi/program yang telah ditetapkan tersebut tentu tidak lepas dari beberapa hal yang dapat menjadi potensi penghambat dan pendorong sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah**

<b>Misi: Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas</b>		
<b>Program</b>	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	Masih lemahnya koordinasi antar perangkat daerah	Tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel serta melibatkan partisipasi publik lebih banyak dalam proses pembangunan
Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	E-leadership di jajaran pengambil kebijakan masih harus ditingkatkan	Pelayanan publik harus semakin mudah, efektif dan efisien dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan lebih optimal
Program Pengembangan Data Statistik Sektoral	Kualitas serta kuantitas data dan informasi statistik masih belum dapat	Peningkatan kebutuhan terhadap peningkatan kualitas data dan informasi



	dipenuhi seluruhnya	statistik yang lebih cepat (faster), lebih mudah (easier), lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan semakin meningkat
Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	Masih lemahnya kepedulian terhadap keamanan terutama terkait dengan data dan informasi	Tren perkembangan digital semakin memegang peranan penting dalam proses interaksi antar organisasi maupun antar individu mendorong semakin tingginya resiko kejahatan siber sehingga harus ada kesiapan dari organisasi

### III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam dokumen Renstra ini, sudah selayaknya untuk selalu sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional dan Kementerian/Lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang

benar. Untuk itu, sangatlah perlu memerhatikan Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Sandi Negara.

**a. Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai *leading sector* di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 berfokus untuk membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi, dan *Government Public Relations* (GPR).

Pembangunan komunikasi dan informatika di Indonesia harus menjadi gabungan antara pengembangan infrastruktur yang memadai dan tersedianya layanan Komunikasi dan Informatika di semua daerah, tidak terkecuali di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, hingga wilayah non-komersial lainnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, negara harus mengoptimalkan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dengan efisien dalam pemakaian sumberdaya dan efektif dalam aplikasi penggunaannya. Informasi yang dikelola dengan baik dan melibatkan sumber daya pitalebar (*bandwidth*) akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara sesuai dengan alam dan budayanya sehingga menjadi kekayaan yang sangat berharga. Pengetahuan itu dapat menjadi landasan dan berkontribusi bagi pembangunan berbagai sektor, seperti industri, pariwisata, maritim, energi, pertanian, dan pendidikan. Dengan arah kebijakan yang tepat,





bidang komunikasi dan informatika akan berperan dalam mentransformasi masyarakat menuju masyarakat yang berdikari dan berdaya saing tinggi.

Sasaran lain dalam pembangunan komunikasi dan informatika adalah menyediakan layanan *eGovernment* yang memadai disertai pengelolaan pusat data nasional sebagai kekayaan strategis bangsa. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional, dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Itulah yang menjadi salah satu hal penting dari sembilan agenda prioritas atau Nawacita pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik, tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat, minimal dengan tingkat literasi TIK nasional 75%.

Dengan tingkat literasi itu, pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi *publik* akan meningkat. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita yang kemudian diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan RPJMN Tahun 2015—2019, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. **Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;**
3. **Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;**
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. **Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;**
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;



9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan agenda prioritas pemerintah tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada tiga agenda prioritas. Ketiga agenda tersebut adalah Nawacita-2, Nawacita-3 dan Nawacita-6.

**b. Badan Pusat Statistik**

Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

*Respondent burden* atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden agar informasi yang diperoleh dapat bersifat akurat dan sesuai dengan fakta. Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad hoc* dimana seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat



kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei, baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat dan pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah. Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

### c. Lembaga Sandi Negara

Visi Lembaga Sandi Negara adalah menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional. Makna dari kata Visi Lembaga Sandi Negara adalah Lembaga Sandi Negara merupakan satu-satunya lembaga penyedia dan pengelola persandian negara; Lembaga Sandi Negara bertanggung jawab mengamankan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara melalui persandian dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga Sandi Negara; Lembaga Sandi Negara berkewajiban menyediakan dan/atau memberikan informasi berklasifikasi melalui analisis kriptografi dan steganografi kepada Presiden dan komunitas intelijen; Informasi bersandi diperoleh dari kegiatan intelijen sinyal dan/atau pemberian Kementerian atau Lembaga; Lembaga Sandi Negara memiliki peran dan kontribusi dalam mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Misi Lembaga Sandi Negara menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan pembinaan persandian negara; mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau negara; melaksanakan kegiatan intelijen sinyal; menyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional; dan menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

### III.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendesak, mendasar, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan. Beberapa hal di dalam Rencana Jangka Panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 yang dapat menjadi masukan dalam



penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah:

### **1. Peningkatan Daya Saing Global**

Jakarta sebagai kota yang merupakan simpul (hub) dalam kegiatan perekonomian regional dan internasional harus memiliki daya saing yang handal. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan strategi yang tepat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan kota yang efektif dan peningkatan daya tarik kota. Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilandasi dengan visi yang jauh ke depan, terukur dan memerhatikan konstelasi persaingan kota lingkup global sehingga Kota Jakarta dapat berperan dalam kerangka regionalisasi ekonomi yang meliputi *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *AFTA+3 (Jepang, China, Korea Selatan)*, *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* dan *Asian Pacific Economic Cooperation (APEC)*.

### **2. Perbaikan dan Peningkatan Iklim Investasi**

Iklim investasi yang kondusif merupakan faktor penting untuk meningkatkan investasi di DKI Jakarta. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana yang meliputi: penyempurnaan sistem dan prosedur berinvestasi, transparansi informasi bisnis, peningkatan pelayanan, persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum serta ketersediaan infrastruktur pendukung. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam skala nasional, regional, dan global yang meliputi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan prinsip kemitraan.

### **3. Reformasi Birokrasi**

Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, tepat, mudah dan terjangkau. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi yang memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain, misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga-lembaga lainnya, agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat.

#### **4. Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Daerah**

Untuk mendukung kinerja kota, diperlukan inovasi dan kreativitas daerah dalam berbagai aspek dan skala. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Sedangkan skala inovasi dan kreativitas daerah meliputi lokal, nasional, regional dan global. Pengembangan inovasi dan kreativitas daerah harus didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian dan teknik rekayasa. Dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis, efektif, efisien dan terpadu.

#### **5. Pengembangan Telematika Jakarta**

Jakarta ke depan dituntut untuk menjadi kota internasional yang kompetitif. Untuk mewujudkan rencana ini diperlukan pembangunan infrastruktur telematika yang maju, modern dan handal. Dalam pembangunan telematika diperlukan prasarana dan sarana, kelembagaan, sumber daya manusia, dan aturan hukum/tata laksana yang memadai. Ke depan, keempat unsur ini harus ditata kembali secara sistematis sehingga akan terwujud sinergi komponen-komponen telematika yang serasi, sehingga mampu meningkatkan daya saing Kota Jakarta, baik di tingkat regional ASEAN maupun tingkat global. Pembangunan telematika harus dilaksanakan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, efisiensi dan tingkat pemanfaatan yang optimal untuk lapisan masyarakat dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan mendukung kualitas ruang kota.

Beberapa permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

##### **1. Teknologi Informasi:**

- a. *E-leadership* yang masih kurang;
- b. Aplikasi masih belum terintegrasi;
- c. Sarana dan prasarana infrastruktur TI yang masih belum memadai dan belum optimal;
- d. Sistem keamanan data serta kebocoran fisik dan elektronik karena belum terpenuhinya standar sistem manajemen keamanan informasi;
- e. TIK untuk pelayanan publik belum efektif dan terintegrasi;
- f. Kurangnya SDM TIK yang kompeten maupun yang bersertifikasi;



- g. Banyak SKPD/UKPD masih menggunakan internet bukan jaringan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

## 2. Komunikasi

- a. Kurangnya penyebaran informasi melalui media luar ruang LED Video Display yang dikelola internal;
- b. Belum tersedianya sistem pengelolaan hasil dokumentasi video dan foto yang terintegrasi dan dapat diandalkan;
- c. Kerjasama dengan media massa dan komunitas masih kurang;
- d. Website Pemprov DKI Jakarta ([jakarta.go.id](http://jakarta.go.id)) kurang dikenal masyarakat dengan masih rendahnya pengunjung website berita Pemprov DKI Jakarta;
- e. Kurangnya kesadaran para SKPD/UKPD untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui media massa;
- f. Kuantitas dan kualitas data yang disampaikan oleh SKPD/ UKPD belum optimal;
- g. Belum ada Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemprov DKI Jakarta;
- h. Implementasi narasi tunggal di portal website resmi Pemprov DKI Jakarta;
- i. Kurangnya partisipasi dan ketertarikan masyarakat dan aparatur terhadap media sosial milik pemerintah;
- j. Terbatasnya pemahaman badan publik terhadap keterbukaan informasi publik;
- k. Masih kurangnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas.

## 3. Telekomunikasi

- a. Penggunaan frekuensi radio komunikasi ilegal pada SKPD/UKPD Pemprov DKI Jakarta;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana telekomunikasi;
- c. Biaya investasi untuk penyediaan infrastruktur yang tidak murah.

## 4. Statistik

- a. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik
- b. Terbatasnya aparatur di bidang statistik;
- c. Kapasitas kelembagaan yang terbatas sehingga penyelenggaraan statistik belum dapat dikoordinasikan sampai ke wilayah;
- d. Pengelolaan data dan informasi pembangunan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi

## 5. Persandian

- a. Belum optimalnya fungsi tata kelola, pengelolaan sumber daya, pengawasan dan evaluasi urusan persandian dan keamanan informasi;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan layanan persandian dan keamanan informasi; dan
- c. Belum adanya rencana induk atau *grand design* dan *roadmap* pengembangan persandian dan keamanan informasi;
- d. Lemahnya kelembagaan persandian dan keamanan informasi;
- e. Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi layanan keamanan informasi bagi perangkat daerah;
- f. Kurangnya kesadaran keamanan informasi aparatur pemerintah daerah;
- g. Kurang memadainya sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi;
- h. Belum dilaksanakannya penetapan informasi dikecualikan dan tingkat kerahasiaan informasi dikecualikan;
- i. Belum optimalnya penerapan standar sistem manajemen pengamanan informasi pada sistem elektronik milik pemerintah daerah provinsi;
- j. Kebutuhan peranan persandian dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan *eGovernment*; *smart province*, *big data*, *open data*, dan satu data;
- k. Kebutuhan pengamanan informasi publik melalui penggunaan sertifikat elektronik.

Setelah menelaah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Rencana Jangka Panjang Daerah DKI Jakarta 2005-2025, Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta dokumen Rencana Strategis K/L, maka isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelayanan dengan mengedepankan efisiensi, yaitu menghasilkan lebih banyak keluaran dengan sumber daya minimal, kemudahan kostumisasi masal melalui pemanfaatan sistem informasi telekomunikasi dan teknologi cerdas yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga menghasilkan keluaran sesuai dengan





kebutuhan pengguna meski dalam skala besar, serta pelibatan teknologi informasi dalam kolaborasi lintas sektoral, manajemen kegiatan, serta transisi peran pemerintah dari penyedia ke fasilitator guna mewujudkan pemerintahan yang menjangkau semua kalangan.

2. Transformasi pengelolaan sektor publik karena tuntutan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat akan mendorong lebih banyak keterlibatan dan komunikasi dengan warga dalam proses pemerintahan supaya pengelolaan sektor publik dapat lebih gesit, meyakinkan, efisien, dan melek teknologi.
3. Teknologi merupakan penghubung antara program dan individu sehingga dapat membantu arus informasi di sektor publik serta menjadikannya komponen penting dari operasional sektor publik sehari-hari. Hal tersebut menempatkan *Chief Information Officer (CIO)* dalam posisi penting untuk mengintegrasikan antara pengambil keputusan dan pemangku kepentingan.
4. Penerapan API di sektor publik semakin meningkat ketika banyak alat, peraturan, dan antarmuka digunakan untuk mengakses data sehingga menjadi penting di era sekarang dalam rangka merealisasikan layanan berbagi dan peningkatan pelayanan publik.
5. Semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi yang dapat mempengaruhi kebijakan.
6. Perubahan pola interaksi pemerintah dengan warga secara *real time*, di berbagai *platform* teknologi, menciptakan risiko *cyber*. Hal tersebut tak dapat dihindari sehingga diperlukan pendekatan antisipatif berbasis manajemen risiko.
7. Data dan kekayaan intelektual berevolusi dan mengundang bentuk baru kejahatan berupa pencurian informasi sehingga peran kepemimpinan petugas keamanan informasi utama harus menjadi lebih kuat dan lebih strategis dengan membantu pengawas kepatuhan untuk membangun budaya organisasi yang mampu mengelola risiko *cyber* bersama.
8. Peningkatan volume dan kecanggihan serangan *cyber* meningkatkan kesadaran *stakeholder* untuk mengimplementasikan teknologi yang lebih aman, mampu melakukan pengawasan terhadap ancaman dan merespon setiap insiden dengan terkoordinasi, mampu melewati pengujian ketahanan sistem kritis, dan disokong oleh tenaga keamanan *cyber* yang profesional dan tangkas.



9. Besarnya ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi menciptakan peluang untuk peningkatan produktivitas dan inovasi yang lebih besar namun berimplikasi pada meningkatnya jumlah pengguna, perangkat, data, dan proses yang membutuhkan perlindungan dari serangan dan ancaman *cyber*.
10. Globalisasi teknologi informasi dan komunikasi yang melampaui batas geografis dan politik mengakibatkan peningkatan ancaman terhadap aset informasi dari penyerang yang berada di belahan dunia manapun.
11. Akumulasi data di "*cloud*", dikombinasikan dengan sistem terdistribusi dan akses jarak jauh menimbulkan tantangan keamanan yang semakin tinggi.
12. Teknologi *mobile* meningkatkan risiko untuk pengeksposan data sensitif dan proses bisnis.
13. Perbedaan *standard* keamanan dan toleransi risiko setiap elemen organisasi menunjukkan bahwa penyeragaman pendekatan keamanan kurang efektif daripada pendekatan solusi berbasis risiko yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi.
14. Pemerintahan yang berorientasi hasil akan lebih memanfaatkan data dan analisis statistik untuk pengambilan keputusan serta penyampaian informasi pembangunan.
15. Semua komunikasi dengan publik harus jelas, bermanfaat, profesional dan selalu dievaluasi untuk memastikan nilai uang yang dibelanjakan (efektif dan efisien).
16. Tuntutan akan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan harus mampu membuat pemerintah lebih responsif dan aspiratif.
17. Kompetensi dan jumlah sumber daya manusia sebagai salah satu modal akselerasi organisasi harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pencapaian tujuan organisasi.
18. Tren perkembangan digital dalam hal ini konektivitas yang didukung infrastruktur, *digital skill* yang menjadi salah satu jalan meningkatkan taraf hidup, bisnis digital sebagai sektor baru dalam perekonomian, dan pemerintahan digital dengan keterbukaan data sebagai faktor peningkat kepercayaan masyarakat akan semakin mewarnai dan mempengaruhi masa depan.

### **III.5 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)**

Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya. Wujud pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikan cakupan dan

substansi TPB/SDGs pada Panca Upaya Utama Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Langkah selanjutnya adalah seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Bappeda, mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

**Gambar 3.2**  
**Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs)**



Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan erat terhadap 1 (satu) tujuan dari 17 tujuan TPB/SDGs. Satu tujuan tersebut yaitu tujuan nomor 9 “Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi “, target dan indikatornya antara lain terdapat dalam tabel 3.3



**Tabel 3.4**  
**Telaahan Bidang Urusan Informasi dan Komunikasi**  
**RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022**

<b>Kode Indikator</b>	<b>Indikator SDGs</b>
INDIKATOR SDGs: 16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik Yang Menjalankan Kewajiban Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
INDIKATOR SDGs: 16.10.2.(b)	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi.



## BAB IV

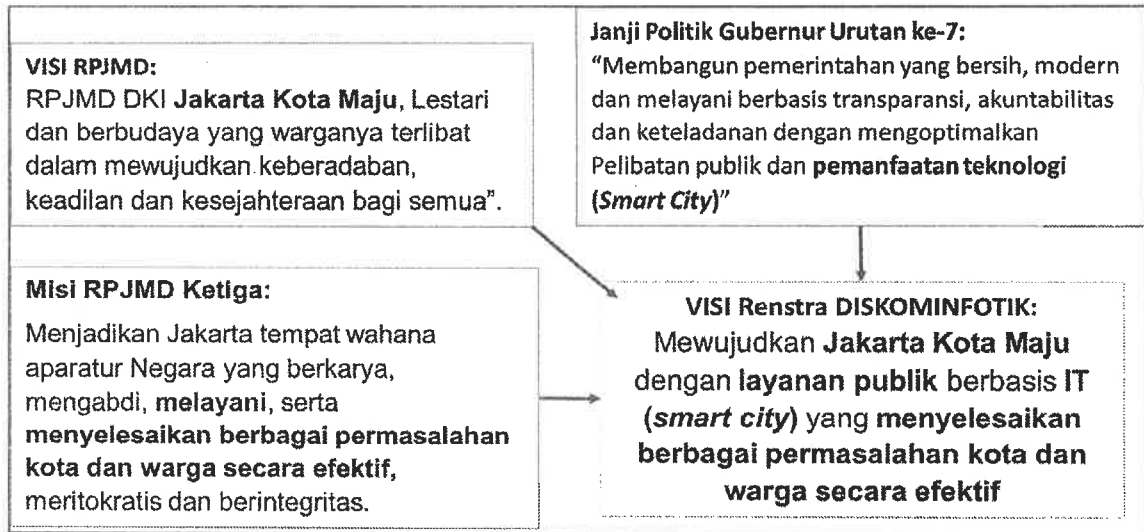
### TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu perangkat daerah pada pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan *open government* (pemerintahan yang terbuka dan partisipatif) guna memberikan solusi inovatif bagi masyarakat mengingat posisi Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Dengan segala kompleksitas permasalahan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lain, solusi inovatif untuk mengurai kompleksitas permasalahan tersebut salah satunya adalah melalui penataan data dan informasi yang terintegrasi. Hal ini berdasar pada fakta bahwa segala permasalahan dapat dicari solusi pemecahannya manakala didukung dengan data yang lengkap, jelas dan *up to date* secara *real time*. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan kondisi warga DKI Jakarta yang sangat *well-informed* maka pemberian layanan oleh setiap perangkat daerah dengan memanfaatkan kemajuan IT sebagai sesuatu yang tak dapat ditawar lagi. Pada tahap ini, kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian menjadi sangat penting.

Agar penyelenggaraan layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dapat memenuhi tuntutan warga sekaligus dapat mendukung, terintegrasi dan selaras dengan visi gubernur sebagaimana tercantum dalam Visi RPJMD DKI Jakarta 2017-2022: **“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”** dan Misi Ketiga RPJMD DKI Jakarta 2017-2022: **“Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas”** maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta harus merumuskan visi dan misi organisasi sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi ini juga merupakan pemandu arah bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaanya.

**Gambar 4.1**  
**Menerjemahkan Visi dan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta ke Visi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022**



Sebagai kesinambungan dari berbagai upaya atau transformasi yang telah dilakukan pada periode-periode sebelumnya sekaligus untuk mendukung pelaksanaan akselerasi pembangunan daerah yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk membenahi dan meningkatkan kualitas berbagai jenis layanannya melalui Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

**“Mewujudkan Jakarta kota maju dengan layanan publik berbasis IT (*smart city*) yang menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif”**

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 sekaligus menerjemahkan dan mengacu pada misi ketiga RPJMD Provinsi DKI Jakarta, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, sebagai berikut:



1. Mengembangkan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi publik berkelas dunia;
2. Mengembangkan *eGovernment* dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman; dan
3. Mengembangkan SDM serta sarana & prasarana layanan yang unggul.

Visi dan misi ini dirumuskan guna mewujudkan infrastruktur sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT yang lebih efisien dan efektif; pengembangan aplikasi yang diterapkan di lingkungan SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai wujud nyata pelaksanaan *eGovernment* guna meningkatkan pelayanan data dan informasi publik yang handal dan aman; serta adanya payung hukum/standarisasi dalam bidang urusan komunikasi dan informatika untuk meningkatkan pelayanan publik di DKI Jakarta. Untuk mewujudkan Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya.

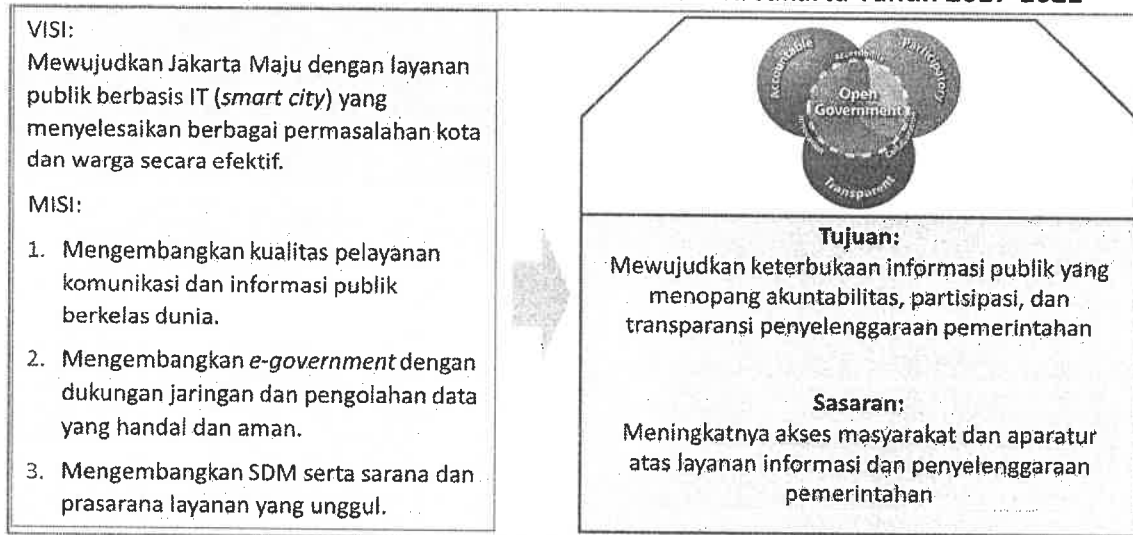
#### **IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Adapun sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran ini kemudian dijadikan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam dokumen rencana perangkat daerah, tujuan dan sasaran strategis harus dapat mewakili dukungan kinerja seluruh bidang atau elemen dalam organisasi sekaligus merupakan bagian dari dan harus dapat menopang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 yang akan diwujudkan melalui lima misi dan untuk mewujudkan Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang akan dicapai melalui tiga misi sebagaimana disebutkan di atas serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis di bidang layanan komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, sebagai satuan kerja dengan memerhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan lima tahun kedepan, menetapkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran**

**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022**



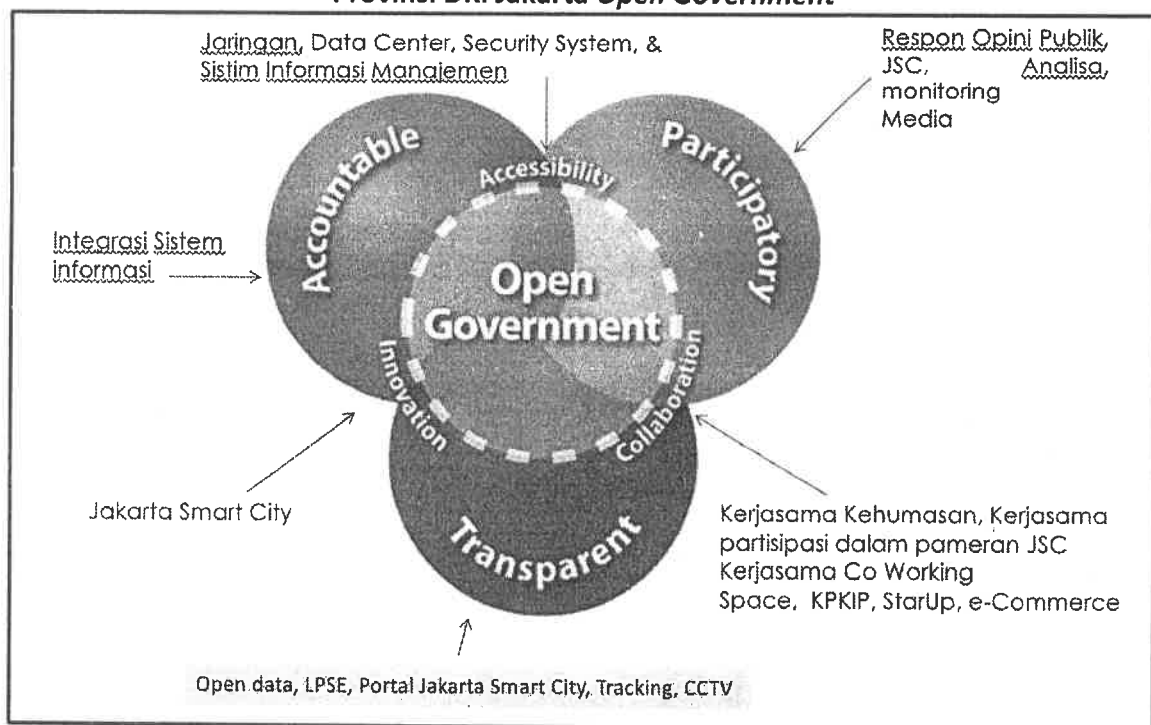
Gambar di atas memperlihatkan bahwa tujuan (akhir) yang ingin dicapai dari penyelenggaraan layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat tugas dan fungsi bidang urusan komunikasi dan informasi, statistik, dan persandian, yaitu: **mewujudkan keterbukaan informasi publik yang menopang akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan** di Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang ingin diraih, yaitu **meningkatkan akses masyarakat dan aparatur atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan**. Melalui dukungan (layanan) bidang urusan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta kepada





seluruh OPD, termasuk pula pelayanan langsung kepada masyarakat, diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka (*open government*) yang pada akhirnya mendekatkan (akses) layanan birokrasi dengan masyarakat yang memungkinkan inovasi dan kolaborasi lebih intensif. Konsepsi *open government* sebagai sebuah upaya untuk mendorong terwujudnya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang terbuka dan partisipatif dalam memberikan solusi inovatif bagi masyarakat dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

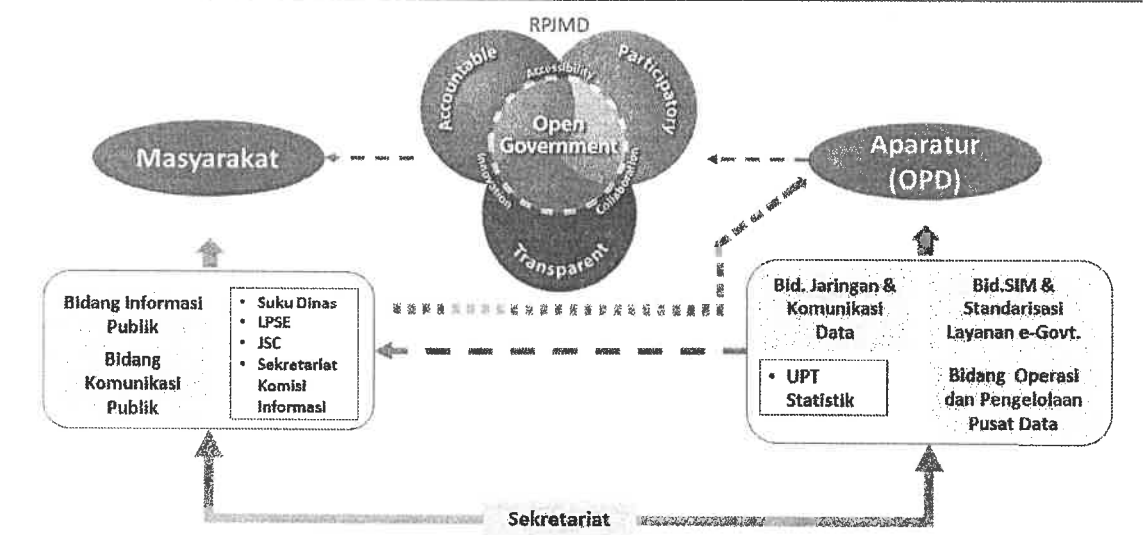
Gambar 4.3  
Provinsi DKI Jakarta *Open Government*



Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki peran sangat penting bagi penyelenggaraan *open government* Provinsi DKI Jakarta (beserta seluruh perangkat daerah) dengan layanan yang akuntabel, partisipatif, dan transparan. Perbaikan dalam layanan komunikasi secara serempak bersama seluruh OPD pada dasarnya dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri karena menjembatani partisipasi masyarakat (jika direspons dengan baik) melalui akses, inovasi, dan kolaborasi semua OPD DKI Provinsi Jakarta.

Berpijak pada pemahaman tentang *open government* di atas, maka secara teknis kerangka logis layanan pada dasarnya dipisahkan dalam dua kelompok yaitu: (1) pelayanan terhadap aparatur; dan (2) pelayanan terhadap masyarakat dimana layanan terhadap aparatur atau OPD dilakukan pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas layanan publik seperti dijelaskan dalam gambar berikut.

**Gambar 4.4**  
**Kerangka Logis Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta**



Melihat kepada kerangka logis struktur pelayanan di atas, jelas bahwa untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 harus dilaksanakan secara bersinergi dan saling mendukung antar aparatur di setiap bidang di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian dapat memberikan pelayanan bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian dengan lebih terbuka dan partisipatif, baik itu kepada OPD lain maupun masyarakat DKI Jakarta yang membutuhkan adanya keterbukaan informasi publik sebagai ciri khusus terwujudnya *open government* di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Adapun penjabaran tujuan ke dalam sasaran yang lebih spesifik sekaligus penyelarasannya dengan tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut.



**Tabel 4.1**

**Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022**

<b>Visi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022</b> Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua	
<b>Misi #3 RPJMD DKI Jakarta 2017-2022</b> Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas	
<b>Tujuan #2 RPJMD DKI Jakarta 2017-2022</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	
<b>Sasaran #2 RPJMD DKI Jakarta 2017-2022</b> Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>  Indeks e-Govt
<b>Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017-2022</b> Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang menopang akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	
<b>Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017-2022</b> Meningkatkan akses masyarakat dan aparatur atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	<b>Indikator Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017-2022</b> 1. Indeks e-Govt. 2. Nilai keterbukaan informasi publik 3. Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah

Sebagaimana tampak pada tabel di atas, salah satu indikator penting (IKU) dinas yang dapat mewakili sumbangan kinerja bidang-bidang, termasuk Sudin dan UPT, adalah “Peringkat Keterbukaan Informasi Publik” yang merujuk pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 4.5  
Memahami Keterbukaan Informasi Publik



Sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas, tanggungjawab penting Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah pengelolaan opini dan aspirasi publik terkait kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tanggung jawab tersebut diimplementasikan sesuai tugas dan fungsi sebagai peran strategis dinas dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik berbasis TIK guna menopang arus informasi kebijakan kepala daerah yang dapat dirujuk pada visi dan misi gubernur dan wakil gubernur sebagaimana telah dijabarkan pada RPJMD dan setiap tahun dioperasionalkan dalam RKP.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut:



**Tabel 4.2**  
**Tujuan, Sasaran dan Target Capaian Kinerja**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Tahun 2017-2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kon-disi Awal 2017	Target Capaian Kinerja Tahun ke-					Kon-disi Akhir 2022
				2018	2019	2020	2021	2022	
Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang menopang akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	85,70	86	87	89	91	93	93
		Indeks e-Government	3,39	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55	3,55
		Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	-	20	20	20	20	20	100

\*Catatan: - IKM dihitung berdasarkan atas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik kepada masyarakat.

- Dalam hal Indeks e-gov tidak kontinu penghitungannya maka indikator ini bisa diusulkan untuk dihapus



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah upaya sinergis berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi pada dasarnya adalah (menunjukkan) prioritas layanan perangkat daerah. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dirumuskan dengan memerhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas (analisis) permasalahan dan isu strategis tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan berbasis teknologi informasi. Di samping itu, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta juga diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan integritas dan perbaikan layanan aparatur berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

**Tabel 5.1**  
**Janji Kerja, Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi ke-3 RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022**

<p><b>Janji Kerja #7 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta 2017-2022:</b></p> <p>Membangun pemerintahan yang bersih, modern dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas dan keteladanan dengan mengoptimalkan Pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi (<i>Smart City</i>)</p>
<p><b>Strategi/Arah Kebijakan Misi #3 RPJMD DKI Jakarta 2017-2022:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi sistem pengaduan warga yang terintegrasi, optimalisasi layanan <i>environment</i> sosial dan dukungan TIK, optimalisasi penyediaan analisis <i>bigdata</i> untuk sektor prioritas.</li> <li>2. Digitalisasi sistem tindaklanjut SKPD/UKPD atas aspirasi warga Jakarta pada media massa.</li> <li>3. Peningkatan kualitas pelayanan, aparatur, <i>database</i> kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan.</li> <li>4. Menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral, melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik, membangun dan mengintegrasikan Sistem Informasi Statistik Peningkatan data sektoral SKPD/ wilayah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Statistik.</li> <li>5. Optimalisasi teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa.</li> </ol>

6. (a) Identifikasi kebutuhan penyelenggaraan persandian; (b) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan persandian; (c) Sosialisasi *Security Awareness*; (d) Pelatihan di bidang persandian; (e) Pengelolaan sumberdaya persandian; (f) Operasional pengamanan persandian;
7. Identifikasi kebutuhan, menentukan skala prioritas, pengalokasian anggaran, registrasi perangkat komputer yang digunakan untuk operasional tata kelola pemerintahan berbasis elektronik secara bertahap, *redundant* perangkat jaringan, *redundant bandwidth* jaringan.
8. Identifikasi kebutuhan, menentukan skala prioritas, investasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pengalokasian anggaran, peningkatan *coverage*, pemeliharaan berkala.
9. Membuat kajian dan regulasi, identifikasi kebutuhan kapasitas *data centre* dari seluruh SKPD/UKPD, menghitung daya tampung eksisting dan daya tampung yang dibutuhkan, membuat desain ketersediaan dan penataan ruang *data center* serta DED (*Detail Enggining Design*), pembangunan perluasan *data centre*, relokasi perangkat data dari SKPD/UKPD, penyediaan perangkat.
10. Membuat surat edaran, melakukan sosialisasi, melakukan monitoring pembuatan subdomain di seluruh SKPD, mengkoordinasikan dengan BKD untuk menjadikan bagian dari KPI, *assesment* TIK pada SKPD.
11. Assesment TIK pada SKPD, penguatan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik khususnya rekomendasi dan *controlling*, komitmen dari pimpinan, Penguatan SDM (jumlah dan kualitas), Pembentukan IT, Implementasi Project Tim, Implementasi RITIK.
12. Pemenuhan standarisasi LKPP, Standarisasi ISO 27001, terpenuhinya Standard Sistem Manajemen Keamanan Informasi Standardisasi LPSE dan SNI/ISO 27001.

Terkait janji politik Gubernur DKI Jakarta No. 7: “Membangun pemerintahan yang bersih, modern dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi (*Smart City*)” maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta merumuskan arah kebijakan yang terintegrasi dengan janji politik Gubernur tersebut dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun ke depan. Gambar berikut ini menunjukkan pemetaan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta guna menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis lima tahun mendatang.

**Gambar 5.1**  
**Pemetaan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2017-2022**



Gambar di atas memperlihatkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta selama periode 2017-2022 akan menerapkan 2 (dua) strategi, yakni: (1) Peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informatika berstandar internasional, dan (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan, dalam rangka mewujudkan sasaran “meningkatnya akses masyarakat dan aparatur atas layanan informasi & penyelenggaraan pemerintahan”. Strategi kedua pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat strategi pertama dalam mewujudkan sasaran. Dengan demikian, sebagai upaya strategik untuk lima tahun mendatang, strategi yang telah dirumuskan tersebut harus dapat diterjemahkan oleh setiap bidang, termasuk suku dinas, unit pelaksana teknis dan sekretariat, berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

**1. Peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informatika berstandar internasional**

Peningkatan layanan komunikasi dan informatika di satu sisi dimaksudkan untuk dapat menopang (sehingga dapat memperbaiki kualitas) keputusan para pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, peningkatan kapasitas dan kualitas layanan dimaksudkan agar masyarakat dapat mengikuti berbagai dinamika pengelolaan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh *stakeholder*



terkait (secara bersama-sama) dalam kerangka membangun *open government*. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi pemanfaatan IT sangat diperlukan. Hal ini karena pemanfaatan IT secara tepat dapat mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan cepat. Selain itu, Pemanfaatan IT juga dapat meningkatkan keterhubungan antar-OPD sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih terintegrasi dan terbuka. Pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial berbasis kelompok masyarakat, dalam hal ini masyarakat dapat memanfaatkan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi, khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah di sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan *open government* akan terwujud dengan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Keberadaan media cetak maupun elektronik sebagai wahana penyebar informasi kepada masyarakat masih diakui eksistensinya, hanya saja memerlukan inovasi dan teknologi yang lebih modern. Pemeliharaan dan pengembangan website merupakan salah satu hal penting dalam pemanfaatan IT. Website dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs. Berbagai konten baru dan *update* yang ditampilkan dapat memberikan informasi yang lebih mutakhir mengenai kegiatan dan prestasi yang dilakukan pemerintah, sehingga keterbukaan informasi dalam hal ini dapat terwujud.

Peningkatan ketersediaan data dan statistik yang akurat sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta ke depan. Dengan data yang akurat dan detail, diharapkan arah pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan visi dan misi Provinsi DKI Jakarta. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta akan menciptakan tata kelola pelayanan yang optimal dengan berbasis IT melalui arah kebijakan sebagai berikut:

**a. Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang Mendukung Kebijakan Pimpinan**

Koordinasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik dilakukan untuk tujuan: *pertama*, penyampaian informasi dasar kepada masyarakat atas penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan, termasuk pelayanan informasi publik. *Kedua*, penyampaian informasi bersifat tematik atas kebijakan strategis daerah atau kebijakan gubernur, khususnya sebagaimana diamanatkan dalam prioritas jangka menengah (RPJMD) dan



tahunan (RKPD). Prioritas terhadap dukungan data dan informasi dalam penanganan kebijakan strategis juga menyangkut peningkatan kualitas penanganan isu/kebijakan aktual yang disoroti oleh publik OPD terkait.

Koordinasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik dilakukan untuk memastikan hadirnya kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat. Keadilan dirasakan dalam setiap sendi pengelolaan kota, mulai dari perumusan regulasi sampai pelaksanaan pelayanan publik. Hal ini juga dilakukan untuk mengajak seluruh elemen kota ikut bergerak memberdayakan warga yang lemah dan terpinggirkan. Warga merupakan pelaku utama pembangunan bersama pemerintah sebagai rekan kolaborator yang menggerakkan dan memberikan dukungan serta menangkap dan mengembangkan praktik baik, kearifan lokal dan solusi inovatif dari masyarakat.

Upaya-upaya strategik yang dibangun dalam rangka mendukung peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dilakukan melalui:

- (1) pembinaan, pengelolaan dan pengembangan informasi publik serta pengelolaan opini dan aspirasi publik pengelolaan informasi publik dan statistik, serta pelayanan informasi publik; dan
- (2) pembinaan, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah, yang lebih detil terinci dalam arah kebijakan sebagai berikut:
  - Optimalisasi sistem pengaduan warga yang terintegrasi, optimalisasi layanan environment sosial dan dukungan TIK, dan optimalisasi penyediaan analisis bigdata untuk sektor prioritas;
  - Digitalisasi sistem tindaklanjut OPD atas aspirasi warga Jakarta pada media massa;
  - Perbaikan kualitas *monitoring* berita/media *online* yang lebih berdaya guna;
  - Peningkatan kerjasama lintas OPD dalam analisis isu pemberitaan publik yang bersifat strategik;
  - Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dan kinerja pemerintah daerah;
  - Meningkatkan keterlibatan OPD dalam pemberitaan dan respons atas aspirasi penting dari media massa;



- Asistensi OPD dalam pemuktahiran informasi; dan
- memperbaiki teknik komunikasi dalam penyebaran informasi.

**b. Optimalisasi Pemanfaatan IT dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi serta Pengamanan Data Menuju *Smart Government***

Optimalisasi pemanfaatan IT dalam pengelolaan informasi dan komunikasi serta pengamanan data menuju *smart government* dilakukan dalam rangka mendukung kinerja pelayanan informasi publik, dukungan terhadap layanan SIM dan e-govt kepada/oleh OPD maupun layanan data/jaringan langsung kepada OPD dalam rangka mewujudkan *smart government* yang lebih baik dan selaras dengan *grand design* pengembangan arsitektur pengelolaan dan pemanfaatan TIK Milenial jangka panjang. Pemanfaatan kemajuan TIK dikembangkan guna meningkatkan standarisasi penggunaan berbagai perangkat pengolaan data dan informasi berstandar global untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang kian tinggi dari waktu ke waktu. Pemanfaatan IT secara optimal akan dapat mendorong Jakarta menjadi kota global dengan segala keragaman dan kegiatannya serta terbuka terhadap perubahan dan kemajuan dunia sehingga seluruh masyarakat maupun dunia usaha dapat merasakan manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Upaya-upaya strategik tersebut dilakukan dengan optimalisasi pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan di bidang layanan infrastruktur *Data Center (DC)*, *Disaster Recovery Center (DRC)* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di samping itu, juga dilakukan berbagai pembinaan, pengelolaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan serta pengintegrasian jaringan dan komunikasi data, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *eGovernment* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Penataan ulang *grand design* Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang lebih memenuhi tantangan masa depan;
- Pengendalian implementasi TIK agar sesuai dengan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Peningkatan kapasitas dan daya tampung yang dibutuhkan termasuk untuk mengakomodir kebutuhan konsolidasi pusat data sesuai standard pusat data;



- Melaksanakan mitigasi resiko dalam rangka menjaga keberlangsungan layanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (eGov).
- Pemenuhan standarisasi LKPP, Standarisasi ISO 27001, terpenuhinya Standard Sistem Manajemen Keamanan Informasi Standardisasi LPSE dan SNI/ISO 27001;
- Peningkatan pengamanan informasi berbasis TIK
- Optimalisasi Government Radio Network dan perangkat telekomunikasi intra pemerintah

Adapun untuk mereposisi pengelolaan statistik perlu upaya-upaya: (a) pembinaan statistik sektoral, (b) peningkatan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik, (c) penyelenggaraan kegiatan statistik untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, dan (d) membangun dan mengintegrasikan Sistem Informasi Statistik Peningkatan data sektoral OPD/wilayah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Statistik. (e) peningkatan kapasitas kelembagaan statistik

#### **c. Optimalisasi Pengelolaan SIM dan layanan eGovernment yang Harmonis**

Harmonisasi diarahkan agar SIM dan layanan *eGovernment* yang dikelola OPD dalam koordinasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik lebih terintegrasi dan menopang kebijakan (strategis) daerah, disamping peningkatan kualitas layanan berbagai bidang urusan pemerintahan. Optimalisasi pengelolaan SIM dan layanan *eGovernment* juga diarahkan agar dapat mendukung peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informasi publik, termasuk dalam pengendalian dan pengambalian keputusan strategik pimpinan daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan.

Upaya-upaya dimaksud dilakukan dengan pembangunan, pengembangan, pengelolaan teknis, pembinaan, evaluasi sistem informasi, standarisasi layanan *eGovernment* melalui berbagai perbaikan dalam kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan teknis sistem informasi yang terintegrasi, penyusunan kebijakan statistik daerah, kegiatan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), sebagai berikut:

- Memastikan seluruh aplikasi berbasis web dan portal resmi OPD menggunakan subdomain jakarta.go.id

- Melakukan assesment TIK pada OPD dalam rangka standarisasi pengelolaan TIK
- Penyusunan, sosialisasi serta implementasi regulasi, kebijakan, dan SOP pembangunan TIK;
- Pengembangan/peningkatan kualitas SIM bagi pengambilan keputusan pimpinan;
- Pembentukan steering comitee (SC) dalam rangka penyusunan, implementasi, dan pengendalian RITIK;
- Percepatan integrasi aplikasi dan Sistem Informasi OPD;
- Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan strategis daerah;
- Implementasi manajemen proyek (*management officer program*) bagi prioritas pembangunan daerah.
- Peningkatan layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Managemen

## **2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**

Strategi pengembangan kapasitas kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya agar lebih efektif, efisien dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas layanan bidang-bidang termasuk suku dinas dan UPT. Peningkatan kapasitas kelembagaan dikoordinasikan oleh kesekretariatan guna meningkatkan kapasitas sumber daya, pengetahuan, sarana dan prasarana serta proses untuk mendukung upaya mewujudkan *smart organization* yang terampil dalam menggunakan TIK berstandar global. Berbagai upaya yang dilakukan oleh kesekretariatan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta antara lain melalui:

- Pengoordinasian SDM dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
- Pembinaan dan pengembangan SDM khususnya tenaga fungsional dan tenaga teknis urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- Pengelolaan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, sarana prasarana, barang, publikasi kegiatan, pengaturan acara Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; serta



- Pengoordinasian penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Dengan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta akan menjadi lebih baik dan mampu mengatasi permasalahan komunikasi, informatika, statistik dan persandian daerah Provinsi DKI Jakarta melalui arah kebijakan sebagai berikut:

**a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana**

Untuk menjalankan pelayanan lebih optimal kepada masyarakat yang mengharapkan informasi yang transparan, akuntabel dan terbuka maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta harus secara optimal memanfaatkan sistem jaringan yang terkoordinasi dan terintegrasi antar OPD dilingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Agar sistem jaringan terintegrasi dengan baik maka upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi secara efektif dan efisien. Pemanfaatan sarana dan prasarana akan dapat meningkatkan serta mewujudkan ketersediaan data/informasi secara cepat, *reliable* dan akurat serta keterpaduan sistem informasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Arah kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kuantitas data dan letak geografis pemrosesannya untuk mempercepat proses arus komunikasi di lingkungan kerja pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mendukung aplikasi SIMDA yang dituangkan dalam pola induk pengembangan fasilitas informasi dan komunikasi data sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi pembangunan daerah yang partisipatif dan membuka keterhubungan informasi antara pemerintah pusat dengan daerah, antar daerah, dunia usaha dan sektor-sektor lainnya.

**b. Peningkatan kualitas SDM**

Terkait aspek kepegawaian, sangat penting untuk secara kontinyu melakukan *upgrade* ilmu pengetahuan setiap pegawai (SDM) dalam Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta mengingat TIK yang senantiasa terus berkembang. Upaya *upgrading* kualitas SDM dapat dilakukan antara lain melalui pelatihan maupun pembinaan pola karier aparatur berdasarkan pada standar kompetensi global, baik persyaratan umum, persyaratan manajerial, dan persyaratan teknis, sehingga berdampak positif terhadap kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Adapun pengembangan kompetensi dilakukan dengan mengefektifkan kerja sama pengembangan kompetensi

bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang selama ini sudah dilakukan dengan BPSDM.

**c. Perbaikan tata kelola dan SOP**

Melihat segala sumber daya baik sarana dan prasarana, SDM serta kapabilitas yang dimiliki DisKomunikasi, Informatik Provinsi DKI Jakarta dapat dipastikan DisKomunikasi, Informatik Provinsi DKI Jakarta memerlukan *standard operating procedures (SOP)* untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi yang bertaraf internasional. Oleh karena itu, dalam pengembangan kapasitas Kelembagaan ini harus dilakukan perbaikan tata kelola dan SOP sehingga semua komponen lembaga yang terdiri atas fisik, infrastruktur, teknologi, sumberdaya keuangan, kepemimpinan strategis, program akan termanajemen serta terhubung baik dengan organisasi lain. Pengelolaan SOP yang terstruktur dan jelas pada akhirnya akan memengaruhi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menjadi lebih baik dan mampu mengatasi permasalahan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta.

Ringkasan keterkaitan, relevansi, dan konsistensi anatra pernyataan visi dan misi RPJMD yang telah ditetapkan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Visi:</b> Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua			
<b>Misi:</b> Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang menopang akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyeleng. pemerintahan	Peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informatika berstandar internasional	Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang Mendukung Kebijakan Pimpinan



penyelenggaraan Pemerintahan			Optimalisasi pemanfaatan IT dalam pengelolaan informasi dan komunikasi serta pengamanan data menuju smart government
			Optimalisasi pengelolaan SIM dan layanan eGovernment yang harmonis
		Peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
			Peningkatan kualitas SDM
		Perbaikan tata kelola dan SOP	



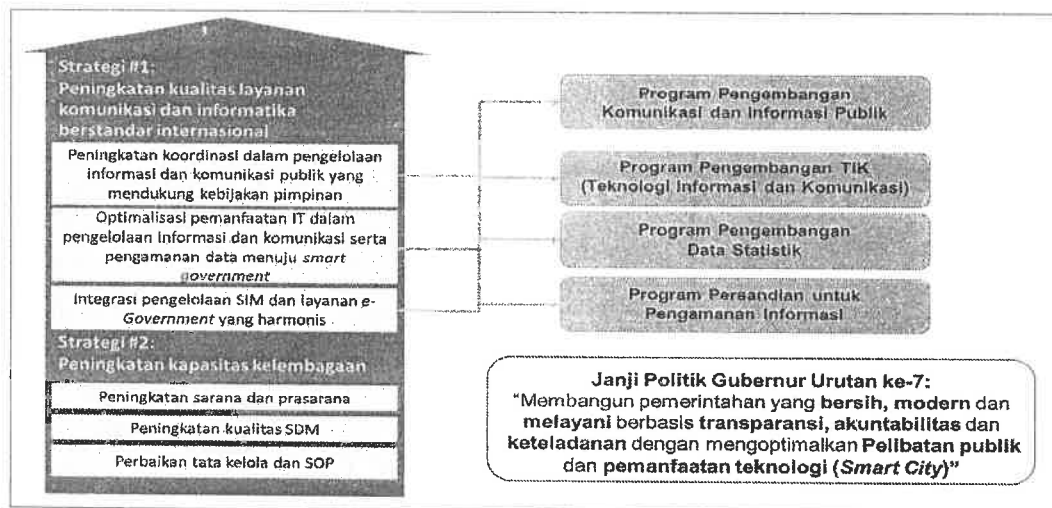
## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan di Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa mendatang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Program dengan demikian merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan tugas dan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

**Gambar 6.1**  
**Menghubungkan Arah Kebijakan dan Program**  
**Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta**



Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode Keg	Program dan Kegiatan	Indikator Program (output) Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp dalam jutaan)						Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi akhir periode				
						Tarinet	Rp	Tarinet	Rp	Tarinet	Rp	Tarinet	Rp	Tarinet	Rp
Mewujudkan keterlibatan informasi publik yang mengoptimalkan akses, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	107	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	Pertama informasi yang diemulsi dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terdapat foto yang beresolusi di media sosial yang diunggah ke media sosial Pemprov DKI Jakarta	80%	0	22.340.866,750	86	23.617.265,315	90	24.946.489,332	91	26.400.010,626	93	26.400.010,626
Mewujudkan keterlibatan informasi publik yang mengoptimalkan akses, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	4862		Terdapat hasil monitoring berita serta respon atas aspirasi publik melalui media massa	12	0	3.061.104,563	12	3.362,215,019	12	3.709,936,521	12	4.074,330,174	12	4.074,330,174
Mewujudkan keterlibatan informasi publik yang mengoptimalkan akses, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	4862		Terdapat hasil dokumentasi dan materi publikasi kegiatan dan kegiatan Pemprov DKI Jakarta yang mengoptimalkan semua informasi bagi masyarakat	12	0	19.385,762,187	12	20.250,050,296	12	21.761,552,811	12	22.325,680,452	12	22.325,680,452
Mewujudkan keterlibatan informasi publik yang mengoptimalkan akses, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	107	Program Komunikasi dan Informasi Publik	Jumlah masyarakat yang mengkonsumi informasi publik dari kanal/jaluran informasi Dinas Kominfo	3033614 orang	0	15.767,855,648	5100000 orang	22.110,195,000	5800000 orang	24.696,295,167	6600000 orang	27.996,795,547	6600000 orang	27.996,795,547
Mewujudkan keterlibatan informasi publik yang mengoptimalkan akses, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	4862		Terdapat hasil publikasi berbentuk berita, video dan foto melalui website bertajuk	12	0	5.044,747,086	12	5.540,215,195	12	6.104,116,114	12	6.714,556,385	12	6.714,556,385
Mewujudkan keterlibatan informasi publik yang mengoptimalkan akses, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	4864	Pengembangan dan Pengadaan Kemizan dan Kejajama Kehumasan	Dokumentasi kegiatan, program dan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kegiatan kegiatan komunikasi seperti seminar, diskusi, talkshow (gala warfare) dan sebagainya	1	0	687,934,112	1	756,731,924	1	832,405,116	1	915,645,628	1	915,645,628
Mewujudkan keterlibatan informasi publik yang mengoptimalkan akses, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	4865	Lomba Fotografi dan Video, Penerimaan Prohod DKI Jakarta	Terkatasnya kegiatan lomba foto dan video serta tingginya jumlah masyarakat untuk berpartisipasi mengikuti perlombaan	1	0	308,816,695	1	359,698,385	1	373,668,201	1	411,035,021	1	411,035,021
Mewujudkan keterlibatan informasi publik yang mengoptimalkan akses, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	4867		Informasi publik berbasis media terdapat di media luar ruang	12	0	4.256,211,440	12	4.699,832,584	12	5.125,815,843	12	5.638,397,428	12	5.638,397,428
Mewujudkan keterlibatan informasi publik yang mengoptimalkan akses, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	4868	Praktik baik dan Penerimaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Publik	Terdapat sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan praktik baik komunikasi publik yang memuat dari berbagai	1	0	500,000,000	1	600,000,000	1	700,000,000	1	800,000,000	4	800,000,000
Mewujudkan keterlibatan informasi publik yang mengoptimalkan akses, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan	4868	Pengadaan dan Penerimaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Publik	Terdapat sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan praktik baik komunikasi publik yang memuat dari berbagai	12	12	500,000,000	12	600,000,000	12	700,000,000	12	800,000,000	60	800,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode Keg	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp dalam jutaan)										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kumulatif akhir periode	
						Tarinet	Rp	Tarinet	Rp	Tarinet	Rp	Tarinet	Rp	Tarinet	Rp			Tarinet	Rp
Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mengoptimalkan akses masyarakat sipil, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat sipil atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	498	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Publik	Terdapatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pendokumentasian dan publikasi yang memadai dan efektifitas	12	12	560.000.000	12	600.000.000	12	700.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	Prov DKI Jakarta	
Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mengoptimalkan akses masyarakat sipil, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat sipil atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	497	Partisipasi kekheterbukaan masyarakat atas layanan informasi dan perubahan informasi	Terdapatnya fasilitas maupun sarana penunjang pemetaan dan penyediaan informasi	1	1	3.236.396.658	1	3.500.034.115	1	3.916.037.538	1	4.307.641.291	1	4.307.641.291	1	4.307.641.291	Prov DKI Jakarta	
Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mengoptimalkan akses masyarakat sipil, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat sipil atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	500		Terselenggaranya layanan informasi publik berupa data	0	12	864.404.516	12	950.644.867	12	1.043.979.464	12	1.150.522.410	12	1.150.522.410	12	1.150.522.410	Prov DKI Jakarta	
Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mengoptimalkan akses masyarakat sipil, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat sipil atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	502		Terdapatnya pelayanan informasi publik Provinsi DKI Jakarta	12	12	887.225.477	12	975.948.025	12	1.073.542.838	12	1.180.897.111	12	1.180.897.111	12	1.180.897.111	Prov DKI Jakarta	
Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mengoptimalkan akses masyarakat sipil, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat sipil atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	575	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Informasi Publik	Terdapatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pendokumentasian dan penyebaran informasi	12	12	355.296.870	12	391.376.557	12	430.514.213	12	473.565.635	12	473.565.635	12	473.565.635	Prov DKI Jakarta	
Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mengoptimalkan akses masyarakat sipil, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat sipil atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	5752	Pengembangan laman SMS Blast Pemprov DKI Jakarta	Terdapatnya informasi kebijakan dan kegiatan internal Pemprov DKI Jakarta melalui SMS Blast	1	1	581.000.000	1	588.200.000	1	596.300.000	1	598.400.000	1	598.400.000	1	598.400.000	Prov DKI Jakarta	
Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mengoptimalkan akses masyarakat sipil, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat sipil atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	6143	Pengembangan media sosial	Terdapatnya pengembangan media sosial	0	12	7.000.000.000	12	2.500.000.000	12	3.000.000.000	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	Prov DKI Jakarta	
Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mengoptimalkan akses masyarakat sipil, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat sipil atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	6279	Pengadaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Publik Suku Dinas Jakarta Utara	Terdapatnya Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Publik	1	1	714.472.793	1	216.644.865	1	285.641.990	1	336.182.823	1	336.182.823	1	336.182.823	Prov DKI Jakarta	
Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mengoptimalkan akses masyarakat sipil, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat sipil atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	628	Pengadaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Publik Suku Dinas Kominfo Jakarta Timur	Terdapatnya Pengadaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Publik	1	1	110.416.000	1	137.236.400	1	157.977.660	1	181.616.809	1	181.616.809	1	181.616.809	Prov DKI Jakarta	
Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mengoptimalkan akses masyarakat sipil, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat sipil atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	6297	Pengadaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Publik Suku Dinas Kominfo Jakarta Pusat	Terdapatnya Pengadaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Publik	1	1	114.967.000	1	54.340.000	1	54.340.000	1	96.340.000	1	96.340.000	1	96.340.000	Prov DKI Jakarta	
Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mengoptimalkan akses masyarakat sipil, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat sipil atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	7299	Pengembangan Monitoring dan Analisa Berita Medis	Dimulai hasil analisa isu pembekalan yang berembung di media massa	480	480	2.782.827.111	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Prov DKI Jakarta	

Tujuan	Sasaran	Kode Reg	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp dalam jutaan)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung Jawab			Lokasi	
					Tahun	Rp	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3			Rp
							Tarinet	Rp	Tarinet	Rp	Tarinet	Rp		
Mewujudkan keterbukaan informasi masyarakat atas pelayanan publik, akuntabilitas, transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	7320	Pengelolaan Dokumentasi dan Publikasi Komunitas Berbasis Media Sosial Proind DKI Jakarta	Jumlah publikasi kegiatan Pemprov DKI Jakarta melalui media cetak dan online	90	14.367.392.559	0	0	0	0	0	0	0	Prov DKI Jakarta Bidang Komunitas Publik
Mewujudkan keterbukaan informasi masyarakat atas pelayanan publik yang memotong birokrasi, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	7334	Pencarian, Pengembangan dan Pengelolaan Portal Berita Pemprov DKI Jakarta	Terdapatnya hasil publikasi berbentuk foto, video dan foto melalui website bertajuk Jakarta	16200	4.566.928.460	0	0	0	0	0	0	0	Prov DKI Jakarta Bidang Informasi Publik
Mewujudkan keterbukaan informasi masyarakat atas pelayanan publik yang memotong birokrasi, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	7335	Pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan dan Kelembagaan Kebutuhan Masyarakat	Jumlah kegiatan kemasyarakatan dengan melibatkan kepengurusan	19	677.398.384	0	0	0	0	0	0	0	Prov DKI Jakarta Bidang Komunitas Publik
Mewujudkan keterbukaan informasi masyarakat atas pelayanan publik yang memotong birokrasi, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	7337	Jomblo fotografi dan Video Pemertintah Proind DKI Jakarta	Jumlah karya para pemangung utama dari lokal dan Instagram	200	380.742.450	0	0	0	0	0	0	0	Prov DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik
Mewujudkan keterbukaan informasi masyarakat atas pelayanan publik yang memotong birokrasi, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	7338	Pengelolaan Publikasi Berbasis Media Tercekat dan Media Luar Ruang	Jumlah informasi publik berbasis media tercekat dan media luar ruang	2	1.807.101.310	0	0	0	0	0	0	0	Prov DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik
Mewujudkan keterbukaan informasi masyarakat atas pelayanan publik yang memotong birokrasi, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	7339	Pengabdian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Publik	Terdapat dan terpeliharanya sarana dan prasarana komunikasi publik	1	1.028.719.707	0	0	0	0	0	0	0	Prov DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik
Mewujudkan keterbukaan informasi masyarakat atas pelayanan publik yang memotong birokrasi, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	7340	Pencarian Pengembangan Dan Pelebaran Informasi Publik Melalui PPD Provinsi DKI Jakarta Terbuka	jumlah informasi data terbuka yang dapat diakses oleh publik	1250	664.933.796	0	0	0	0	0	0	0	Prov DKI Jakarta Bidang Informasi Publik
Mewujudkan keterbukaan informasi masyarakat atas pelayanan publik yang memotong birokrasi, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	7348	Pengelolaan Dan Pelebaran Informasi Publik Melalui Dokumentasi dan Publikasi Komunitas Publik	Terdapatnya Pengelolaan Dokumentasi dan Publikasi Komunitas Publik	1	805.568.676	0	0	0	0	0	0	0	Prov DKI Jakarta Bidang Informasi Publik
Mewujudkan keterbukaan informasi masyarakat atas pelayanan publik yang memotong birokrasi, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	7352	Pengabdian dan Pelebaran Informasi Publik dan Prasarana Komunikasi Publik	Terdapat dan terpeliharanya sarana dan prasarana komunikasi publik	12	313.451.700	0	0	0	0	0	0	0	Prov DKI Jakarta Bidang Informasi Publik
Mewujudkan keterbukaan informasi masyarakat atas pelayanan publik yang memotong birokrasi, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	7367	Pengelolaan Layanan SMS Blast Pemprov DKI Jakarta (Pengabdian)	Pesentase penyelesaian informasi melalui sms blast kepada masyarakat	100	158.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Prov DKI Jakarta Bidang Informasi Publik
Mewujudkan keterbukaan informasi masyarakat atas pelayanan publik yang memotong birokrasi, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan pelayanan pemerintahan	7385	Pengelolaan media sosial	Terdapatnya kegiatan media sosial	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Prov DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik

Tujuan	Sasaran	Kode Keg	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp dalam jutaan)												Unit Kerja Perangkat Daerah PANGANGUNG JAWAB	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi akhir periode			
						Tarjelt	Rp	Tarjelt	Rp	Tarjelt	Rp	Tarjelt	Rp	Tarjelt	Rp	Tarjelt	Rp		
Mewujudkan akses informasi publik yang mendapat akuntabilitas, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan akses informasi publik dan akuntabilitas, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	7377	Keagamaan Substansi Acan Ganes tahun 2018	Terlaksananya publikasi Acan Ganes	1	2.903.913.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Komunikasi Publik	Prov DKI Jakarta	
Mewujudkan akses informasi publik yang mendapat akuntabilitas, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan akses informasi publik dan akuntabilitas, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	10569	Pewilayaraan Pembinaan dan Pengembangan Jejaring dan Jejaring Publik di Provinsi DKI Jakarta	Terseleksi nya Pembinaan dan Pengembangan Jejaring dan Jejaring Publik di Provinsi DKI Jakarta	0	216.015.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Komunikasi Publik	Prov DKI Jakarta	
Mewujudkan akses informasi publik yang mendapat akuntabilitas, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan akses informasi publik dan akuntabilitas, partisipasi dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan	10571	Lomba Jurnalistik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta	Terselenggaranya Lomba Jurnalistik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta	1	73.666.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Komunikasi Publik	Prov DKI Jakarta	



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Perangkat daerah pada dasarnya merupakan pelaksana teknis dalam rangka mewujudkan kinerja bidang urusan berkenaan. Sebagaimana diketahui, Dinas Kominfo dan Statistik mengampu tiga bidang urusan sekaligus, yaitu: bidang urusan komunikasi dan informasi, statistik, dan persandian. Dalam kaitan itu, rencana strategik dipandang sebagai dokumen yang menjelaskan bagaimana kinerja direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan nantinya dalam suatu sistem akuntabilitas. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme perencanaan, pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi. Dengan demikian, indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Indikator kinerja Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah. Terkait indikator kinerja pada

tujuan dan sasaran Renstra, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang akan dicapai 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2017–2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		2018	2019	2020	2021	2022	
		Target	Target	Target	Target	Target	
Indeks e-Government	3,39	3,35	3,4	3,45	3,5	3,55	3,55
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	85,7	86	87	89	91	93	93
Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	-	20	20	20	20	20	100

**Tabel 7.2**  
**Indikator Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022**

No	Indikator Program	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Presentase Laporan Warga melalui aplikasi interaktif Jakarta Smart City	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	100

3	Persentase Respon SKPD Terhadap Aspirasi Warga Jakarta melalui Media Cetak	80	80	0	0	0	0	80
4	Persentase Laporan Warga melalui Aplikasi Interaktif Jakarta Smart City	62	74	77	81	87	87	87
5	Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan perlu dilakukan klarifikasi	80	0	83	86	90	93	93
6	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi	100	0	100	100	100	100	100
7	Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta	3043614	0	4400000	5100000	5800000	6600000	6600000
8	Prosentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0	0	0	0	0	0	0
9	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0	25	40	55	75	95	95
10	indeks kepuasan pelayanan kantor	3	4	4	4	4	4	4
11	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	3	3	4	4	4	4
12	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan	0	20	20	20	20	20	100





	persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah							
13	Service Level Agreement Jaringan	90	0	98	99	99	99	99
14	Service Level Agreement	95	95	0	0	0	0	95
15	Service Level Agreement Telekomunikasi Intra Pemerintah Daerah	95	0	96	96	97	97	97
16	Service Level Agreement Data Center	98	0	99	99	99	99	99
17	Pemenuhan Standard LPSE dan SNI ISO/IEC 27001	65	0	100	100	100	100	100
18	Jumlah cakupan layanan e-gov	28	38	48	58	68	78	78
19	Service Level Agreement Telekomunikasi Intra Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0
20	Service Level Agreement Data Center	0	0	0	0	0	0	0
21	Prosentase Kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemda yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara	0	0	0	0	0	0	0
22	Jumlah cakupan layanan e-gov	12	0	0	0	0	0	0
23	Pemenuhan Standard LPSE dan SNI ISO/IEC 27001	0	0	0	0	0	0	0



## BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 merupakan upaya untuk melanjutkan berbagai kebijakan bidang urusan komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian sesuai tantangan dan isu strategis lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan dukungan oleh semua pihak demi tercapainya *open government*.

### A. Kesimpulan

Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta lima tahun ke depan. Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran di lingkup Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI



Jakarta untuk mengedepankan aspek perencanaan perangkat daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

**LAMPIRAN 1. Cara Perhitungan Indikator IKU (BAB 4)**

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Definisi Operasional
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase	Layanan persandian adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengamanan data dan informasi, meliputi : 1. Pengamanan terhadap jaringan 2. Pengamanan terhadap aplikasi 3. Pengamanan terhadap dokumentasi 4. Pengamanan terhadap fisik ruangan pimpinan 5. Implementasi sertifikat elektronik 6. Daftar informasi yang dikecualikan dan terklasifikasi (Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian / Jumlah seluruh perangkat daerah x 100%)
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Indeks E Gov	Indeks	Indeks E Gov sebagai acuan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah dibagi menjadi 5 dimensi sebagai talak ukur pemeringkatan. Kelima dimensi tersebut adalah dimensi kebijakan, dimensi kelembagaan, dimensi infrastruktur, dimensi aplikasi dan dimensi perencanaan
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Penilaian untuk mengetahui implementasi UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik, sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik

**LAMPIRAN 2. Cara Perhitungan Indikator Program (RPJMD)**

No	Program	Indikator Program	Satuan	Definisi Operasional
1	Program Komunikasi dan Informasi Publik	Presentase Laporan Warga melalui aplikasi interaktif Jakarta Smart City	%	Persentase penyelesaian pengaduan warga melalui kanal pengaduan resmi yang dapat diselesaikan (Jumlah respon SKPD terhadap aspirasi warga melalui aplikasi interaktif/ Jumlah aspirasi warga melalui aplikasi interaktif x 100% )
2	Program Komunikasi dan Informasi Publik	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi	%	Jumlah sengketa informasi yang difasilitasi dibanding jumlah sengketa informasi yang terdaftar di Komisi Informasi dikali 100%
3	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	Persentase Respon SKPD Terhadap Aspirasi Warga Jakarta melalui Media Cetak	%	Masih banyaknya isu berkembang di masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti melalui klarifikasi-klarifikasi berita yang seimbang berdasarkan data dan fakta yang akurat
4	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	Persentase Laporan Warga melalui Aplikasi Interaktif Jakarta Smart City	%	Persentase penyelesaian pengaduan warga melalui kanal pengaduan resmi yang dapat diselesaikan (Jumlah respon SKPD terhadap aspirasi warga melalui aplikasi interaktif/ jumlah aspirasi warga melalui aplikasi interaktif) x100%
5	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan perlu dilakukan klarifikasi	%	Masih banyaknya isu berkembang di masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti melalui klarifikasi-klarifikasi berita yang seimbang berdasarkan data dan fakta yang akurat (Informasi yang dikemas oleh Pemprov DKI Jakarta/ Isu yang perlu diklarifikasi x 100%)

6	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi	%	jumlah sengketa informasi yang difasilitasi dibanding jumlah sengketa informasi yang terdaftar di Komisi Informasi dikali 100%  (SPSI:SRPSI)x100%  PSI= Penyelesaian Sengketa Informasi yang terfasilitasi  RPSI= Sengketa Informasi yang Terdaftar  ((Jumlah respon SKPD terhadap aspirasi warga melalui aplikasi interaktif/ jumlah aspirasi warga melalui aplikasi interaktif) x100%)
7	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta	orang	jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta (media online dihitung frekuensi kunjungan, media cetak(eksemplar), media sosial(follower), acara (peserta) dst)
8	Program Pengembangan Data Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	Penyelenggaraan statistik sektoral adalah penyediaan dan pemanfaatan data statistik yang ditujukan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah (Jumlah data statistik sektoral yang tersedia dibagi jumlah data statistik sektoral yang dibutuhkan x100%)
9	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	Realisasi Penyerapan Anggaran : < 25% -> 1, >25% - 50% -> 2,



	Komunikasi dan Informatika			>50% - 75% -> 3, >75% - 100% -> 4
10	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	Realisasi Penyerapan Anggaran : < 25% -> 1, >25% - 50% -> 2, >50% - 75% -> 3, >75% - 100% -> 4
11	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	%	Layanan persandian adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengamanan data dan informasi, meliputi : 1. Pengamanan terhadap jaringan 2. Pengamanan terhadap aplikasi 3. Pengamanan terhadap dokumentasi 4. Pengamanan terhadap fisik ruangan pimpinan 5. Implementasi sertifikat elektronik 6. Daftar informasi yang dikecualikan dan terklasifikasi  (Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian / Jumlah seluruh perangkat daerah x 100%)
12	Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Service Agreement Jaringan	%	Perjanjian level pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta dalam rangka ketersediaan jaringan  Jaringan Intranet dan internet: (jumlah waktu operasional jaringan)/(jumlah waktu operasional ideal jaringan)x 100%
13	Program Pengembangan TIK (Teknologi	Service Agreement	%	Jaringan Intranet dan internet:(jumlah waktu operasional

	Informasi dan Komunikasi)			jaringan)/(jumlah waktu operasional ideal jaringan)x 100% , nilai 95 % diperoleh dari (472 /522 titik(yang ideal) x100%
14	Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Service Level Agreement Telekomunikasi Intra Pemerintah Daerah	%	Waktu operasional normal BTS Radio Trunking Digital (TETRA) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  (Total waktu operasional - total waktu gangguan / (Total waktu operasional)x100%
15	Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Service Level Agreement Data Center	%	Perjanjian level pelayanan dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menjamin uptime server dan aplikasi melalui operasional data center  (Jumlah Waktu operasional dalam range normal)/(Total waktu operasional)x100%
16	Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Pemenuhan Standard LPSE dan SNI ISO/IEC 27001	%	Pemenuhan 17 standardisasi LPSE dan Pemenuhan Sertifikasi SNI ISO/IEC 27001 % capaian = ( S/17 ) * 70% + i * 30% S = jumlah standard LPSE yang terpenuhi i = jumlah sertifikasi ISO SNI yang terpenuhi
17	Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Jumlah cakupan layanan e-gov	sistem informasi	Sistem Informasi pelayanan eksternal dan internal yang terintegrasi (Jumlah Sistem Informasi yang terintegrasi)
18	Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Persentase Kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemda yang diselenggarakan secara daring dengan	%	Membuat surat edaran, melakukan sosialisasi, melakukan monitoring pembuatan subdomain di seluruh SKPD, mengkoordinasikan dengan BKD untuk menjadikan bagian dari



		memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara		KPI, Assesment TIK pada SKPD (Jumlah domain Resmi Pemerintah DKI Jakarta/Jumlah Website Resmi Pemerintah DKI Jakarta)x100%
--	--	---	--	--

**LAMPIRAN 3. Cara Perhitungan Indikator SDG's (BAB 3)**

Kode Indikator	Indikator SDGs	Cara Perhitungan
INDIKATOR SDGs: 16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik Yang Menjalankan Kewajiban Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Jumlah PPID yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI
INDIKATOR SDGs: 16.10.2.(b)	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi.	Jumlah sengketa yang selesai/ Jumlah sengketa x 100